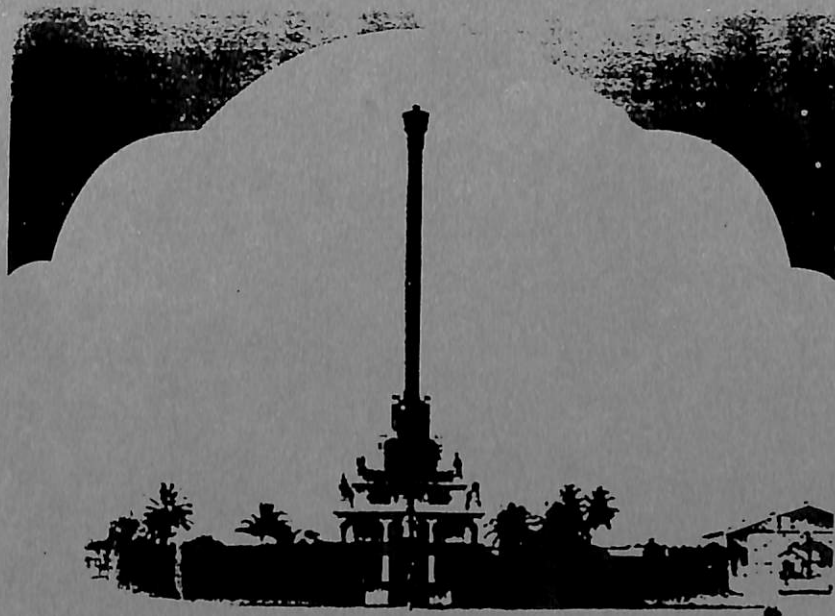




alai Pelestarian
ai Tradisional

5
L

Pendidikan di Aceh

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

1999 **12**

H a b a

Informasi kesejarahan
dan nilai tradisional

No. 12 Th. III
Edisi Oktober-Desember 1999

PELINDUNG

Direktur Jenderal Kebudayaan
Kakanwil Depdikbud Provinsi DI Aceh

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Kajian Jarahnitra
Banda Aceh

PENASEHAT AHLI

Rusdi Sufi
M. Amin Rajeni
Nasruddin Sulaiman
Zulfan

REDAKTUR PELAKSANA

Agus Budi Wibowo
Irfani Dewi Wanti
Indriani
Sri Wahyuni

DEWAN REDAKSI

Seno
Irvan Setiawan
Sri Waryanti
Elita Batara Munti
Titit Lestari

SEKRETARIAT

Djuniat
Makmun Abdullah
Yulhanis
M. Saleh
Azizah
Chairul Azman
Hasimi
M. Jamil
Cut Nadia Fitriana

ALAMAT REDAKSI

Jln. Tuanku. Hasyim Banta Muda 17 Banda Aceh
Telp. (0651) 23226. 24216
Faks. (0651) 24216

Diterbitkan oleh :

Balai Kajian Jarahnitra Banda Aceh

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan misi Balai Kajian Jarahnitra Banda Aceh dari pembaca. Redaksi dapat juga menyingkat dan memeriksa tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya

ISSN : 1410 - 3877

STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Info

- ❑ Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh terlibat dalam Gebyar Budaya Aceh II 99 dan selenggarakan diskusi dan lomba budaya.
- ❑ Balai Kajian Jarahnitra Banda Aceh akan adakan penelitian aspek kesejarahan dan kenilai-tradisional.

Wacana

- | | |
|----------------------|--|
| Safwan Idris | Peranan Pendidikan di Aceh dan Kaitannya dengan DOM |
| Shabri A. | Keberadaan Kopelma Darussalam dan Kaitannya dengan Ke-istimewaan Aceh Di Bidang Pendidikan |
| Rusdi Sufi | Guru dan Karyanya di Aceh pada Abad XVII dan XIX |
| Sri Waryanti | Kolonialisme, Pendidikan dan Munculnya Elit Modern di Aceh Abad 20 |
| Seno | Keberadaan Pendidikan di Aceh pada Zaman Kolonial Belanda |
| ✓ Sudirman | Lembaga Pendidikan Dayah pada Masyarakat Aceh |
| Sri Wahyuni | Pembaharuan Pendidikan Agama di Aceh pada Masa Kolonial Belanda |
| ✓ Cut Nadia Fitriana | Sistim Pendidikan Rangkang Pada Masyarakat Aceh |

Cerita Rakyat

Haba Jugi Tapa

Pustaka

Jurnal Laporan Hasil Penelitian Kesejarahan dan Nilai Tradisional *SUWA*

Cover

Tugu Darussalam. Simbol Pelaksanaan Cita-cita Masyarakat Aceh (sumber ANRI Wilayah Prov. D.I. Aceh).

Tema Haba No. 13 *Budaya Aceh Memasuki Abad 21*

PENGANTAR

Redaksi

Tahun 1999 merupakan tahun yang mengharubiru bagi dunia pendidikan di Aceh. Pada tahun ini banyak sekolah-sekolah di beberapa kabupaten dibakar oleh pihak-pihak yang tidak dikenal. Selain itu, ada beberapa guru yang dibunuh tanpa berperilaku kemanusiaan. Mereka yang membunuh dan membakar tampaknya tidak bertanggung jawab dan peduli terhadap nasib anak bangsa yang sedang menuntut ilmu dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia menghadapi tantangan di era milenium yang akan datang.

Bagaimanapun juga, pendidikan adalah modal dasar bagi mereka yang ingin meraih sukses, baik bagi seorang individu maupun sebuah bangsa atau negara. Karenanya, pendidikan harus menjadi sebuah prioritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bulan September merupakan bulan pendidikan bagi masyarakat Aceh. Karenanya, redaksi buletin Haba menampilkan tema Pendidikan di Aceh sebagai tema buletin No. 12 untuk memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana model pendidikan yang ada di Aceh serta pengaruhnya bagi masyarakat, baik pada masa dulu, kini, dan sekarang.

Semoga buletin Haba ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam rangka menambah wawasan dan membuka cakrawala berpikir (Abw).

Redaksi

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh terlibat dalam Gebyar Budaya Aceh II 99 dan Selenggarakan Diskusi BUDAYA dan Lomba

Berakhirnya kegiatan Penyuluhan Bahasa di Taman Budaya Daerah Istimewa merupakan akhir dari kegiatan Gebyar Budaya Aceh II tahun 1999. Acara Gebyar Budaya Aceh II yang dibuka oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Dr. I Gusti Ngurah Anom di Hotel Cakradonya dapat dikatakan cukup sukses. "Walaupun ada riak-riak yang sedang terjadi di beberapa daerah Aceh, ternyata pelaksanaan Gebyar Budaya Aceh tidak ada hambatan yang berarti", kata Dr. Anhar Gonggong, Direktur Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Dirjendbud.

Acara Gebyar Budaya Aceh II ini merupakan lanjutan dari Gebyar Budaya Aceh I tahun 1998. Kala itu, acara inipun dianggap sukses. Kali ini, gebyar menampilkan berbagai acara, yaitu pameran dan pagelaran pakaian adat, pagelaran seni I/II, lomba membaca hikayat, penyuluhan kebudayaan, penyuluhan UU No. 5 tahun 1992 dan penyuluhan bahasa. Acara-acara ini berlangsung di beberapa tempat, seperti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, Museum Negeri Daerah Istimewa Aceh, Taman Budaya Aceh dan Gedung Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Daerah Istimewa Aceh-Sumut.

Sementara itu, Kakanwil Depdikbud Aceh, Drs. Malik Raden, menjelaskan bahwa pelaksanaan Gebyar Budaya Aceh merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan rakyat Aceh melalui sejarah dan budaya, menumbuhkembangkan budaya Aceh, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan serta aktualisasi jati diri bangsa. Karenanya, tema gebyar kali ini adalah Melalui Pemahaman Nilai Budaya, Memperkokoh Wawasan Kebangsaan.

Kali ini Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh dalam Gebyar Budaya Aceh menyelenggarakan acara lomba membaca hikayat Aceh. Lomba dilaksanakan

pada tanggal 28 Agustus 1999. Peserta lomba berjumlah 32 orang yang meliputi kategori remaja dan dewasa. Kategori pertama diikuti oleh murid-murid SMU, SMK, dan MAN sedangkan kategori kedua diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat umum.

Adapun juara-juara dalam lomba ini adalah Zakaria (MAN 1 Banda Aceh), Mahdavi Sahar (SMU Negeri 2 Ingin Jaya), Marhaban (SMU Negeri Peukan Bada) sebagai juara I, II dan III kelompok remaja sedangkan T. Marzatillah (Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry), Chaerul Abdullah (Desa Lamteh, Kab. Aceh Besar), dan Kamaruddin (Kampung Pande Kotamadia Banda Aceh) sebagai juara I, II, dan III. Selain piala, para juara menerima pula uang sebesar Rp. 100 ribu, Rp. 75 ribu, dan Rp. 50 ribu.

Didasari oleh pemikiran bahwa budaya Indonesia harus tetap lestari, maka Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh mengadakan lomba membaca cerita rakyat Aceh dan diskusi budaya tentang cerita rakyat di Tapaktuan. Acara ini berlangsung pada tanggal 14-16 Agustus 1999. Kedua acara ini merupakan satu kesatuan dengan acara Gebyar Seni Budaya '99.

Pada acara lomba mendongeng cerita rakyat ini tampil sebagai juara I adalah Laila Warsiah guru SD 7 Tapaktuan, sedangkan juara II dan III adalah Yuzami, guru SD No. 1 dan Ainal Mardiah guru SD No. 8. Trisnawar guru SDN Lhok Ketapang keluar sebagai juara favorit.

Pada acara diskusi budaya ada dua makalah yang dibawakan dari Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, yaitu *Penanaman Nilai Budaya Aceh melalui Cerita Rakyat* (Tim Balai Kajian Jarahnitra Banda Aceh) dan *Pengungkapan Nilai Budaya Legenda Bandung Bandawasa* (Drs. Agus Budi Wibowo, MSi). (Abw)

Balai Kajian Jarahnitra Banda Aceh Akan Adakan Penelitian Aspek Kesejarahan dan Kenilaitradisional

Tidak lama lagi bangsa Indonesia akan memasuki milenium ketiga yang menuntut perubahan-perubahan mendasar dan tata kehidupan sosial budaya yang selama ini berlangsung. Memasuki tuntutan perkembangan masyarakat dan juga abad milenium ketiga yang dimasuki oleh bangsa Indonesia, maka reformasi sosial budaya menjadi satu hal penting keberadaannya, karena di masa yang akan datang bangsa yang tidak mengikuti perubahan yang terjadi di dalam masyarakatnya dan dunia luar akan ketinggalan zaman.

Sejalan dengan hal tersebut Balai Kajian Jarahnitra Banda Aceh mencoba semakin meningkatkan kinerja dan daya kreatifitas semua pegawai yang ada di lembaga ini. Terbukti setelah selesai dengan berbagai kegiatan yaitu penelitian yang meliputi aspek kesejarahan dan kenilai-tradisional yang terdiri dari *Minyak dan gas Bumi dalam Dimensi Sejarah (Suatu Kajian Sejarah Industri di Aceh)*, *Kedudukan Dayah dalam Masa Revolusi Kemerdekaan*, *Perubahan Pola Perkawinan Pada Etnis Aceh di Pedesaan*, *Makanan Sebagai Suatu Sistem Budaya (Kajian Tentang Faktor Sosial Budaya Berkenaan Dengan Makanan Keluarga Petani Etnis Gayo)*, *Hubungan Antar Etnis Cina Dengan Kaum Pribumi di Kota Medan*, *Alih Aksara Tambuh Tujoh*, serta melakukan satu kali seminar kesejarahan, dan dua kali perlombaan yaitu lomba membaca hikayat dan lomba bercerita cerita rakyat Aceh.

Walaupun berbagai isu dihembuskan terutama menyangkut masalah kestabilan sosial politik di Provinsi Daerah Istimewa Aceh namun motivasi kerja tidak perlu surut, sehingga di pertengahan tahun anggaran, Balai Kajian Jarahnitra Banda Aceh tetap melakukan program kerja lanjutan yaitu melakukan 2 kali penelitian kesejarahan dan kenilai-tradisional, yaitu *Toponimi Daerah*

di Kotamadia Banda Aceh, dan Pengetahuan, Sikap, Keyakinan, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Benda-Benda Peninggalan Sejarah di Kota Banda Aceh, serta Alih Aksara Naskah Kuno Mularobat. Selain itu, diadakan pula program perekaman dan transliterasi sejarah lisan kepada tokoh-tokoh dan pelaku sejarah yang akan dilakukan di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Besar, Barat dan Selatan.

Upaya perekaman ini dilakukan mengingat pentingnya data primer kesejarahan, juga atas inisiatif agar terhimpunnya data sekitar zaman pendudukan Jepang di Aceh, karena sangat langka sekali sumber-sumber tertulis (dokumen aslinya) baik pada Arsip Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, maupun lembaga-lembaga yang berhubungan dengan sumber data tersebut. Sebagai alasan karena arsip-arsip tersebut banyak yang dibumihanguskan oleh Jepang sebelum meninggalkan daerah pendudukannya.

Budaya Aceh Menyongsong Abad 21 adalah tema pilihan Seminar kenilai-tradisional yang direncanakan akan dilaksanakan sekitar minggu kedua bulan Oktober 1999 oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, kegiatan ini adalah rutinitas Balai selain bertujuan memecahkan berbagai persoalan kebudayaan juga alat promosi yang ampuh untuk memperkenalkan Balai kepada khalayak sehingga lembaga ini dikenal lebih dekat oleh masyarakat sebagai sumber informasi kesejarahan dan kenilai-tradisional.

Atas perannya sebagai lembaga yang menyajikan informasi tersebut maka Balai Kajian juga akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 mendatang. (Idw)

Peranan Pendidikan Di Aceh dan Kaitannya Dengan Peristiwa DOM

Oleh Safwan Idris

Pendahuluan

Keterkaitan antara peristiwa DOM (Daerah operasi militer) dan Pasca DOM dengan masalah pendidikan di Aceh merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji karena dengan menemukan keterkaitan ini kita mungkin dapat menemukan jalan dalam menanggulangi masalah Aceh dewasa ini. Memang dilihat sepintas rasanya tidak ada sangkut paut antara peristiwa DOM dengan pendidikan di Aceh, tetapi setelah kita melihat bahwa dalam masa pasca DOM banyak sekali gedung-gedung sekolah yang dibakar, mau tidak mau kita harus mengarahkan juga pencermatan kita kepada permasalahan pendidikan ini sebagai bagian dari upaya kita menemukan cara-cara dalam menyelesaikan masalah Aceh.

Masalah Aceh yang dimaksudkan di sini ialah masalah keamanan dan konflik berkepanjangan di Daerah Istimewa Aceh yang melibatkan kekuatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan telah menimbulkan korban yang banyak baik dipihak masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sekarang ini muncul pertama sekali dengan lahirnya Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin Muhamad Hasan di Tiro pada akhir tahun 1976. Gerakan ini telah berjalan 23 tahun timbul tenggelam dan setelah Operasi Jaring Merah dari 1989 sampai 1998 yang banyak menimbulkan korban, sekarang gerakan ini mulai bangkit lagi setelah dihentikan Operasi Jaring Merah pada bulan Agustus 1998 yang lalu. Dalam masa kemunculan kembali gerakan inilah, banyak sekolah dibakar, di samping kantor camat, yang membakar ini sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Kita perlu

menanyakan apa sebab gedung-gedung sekolah dibakar dan siapa pembakarnya. Kalau kantor-kantor pemerintah seperti Kantor Camat yang dibakar, pembakaran itu tentu ada kaitannya dengan politik yang menjadi inti dari konflik yang telah berkembang di Aceh sekian lama. Kelompok-kelompok yang menentang pemerintah tentu menjadikan kantor-kantor pemerintah sebagai sasaran penghancuran. Memang sekolah yang dibakar merupakan aset negara yang dimiliki pemerintah, tetapi aset ini merupakan aset yang dimiliki publik dan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan politik pihak-pihak yang berkuasa. Karena itu persoalan ini harus dicarikan penyelesaiannya dalam hubungan dengan peristiwa DOM dan pasca DOM di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Yang lebih menarik untuk dicermati bahwa dari lebih seratusan lebih sekolah yang dibakar, sampai sekarang belum ada sekolah agama, baik madrasah, pesantren atau *dayah*. Memang ada pesantren yang dibakar dalam kasus kerusuhan di Beureuneun beberapa bulan yang lalu, yaitu Pesantren yang didirikan oleh Drs. Tgk. H. Faisal Hasan Sufi. Pembakaran ini tidak ada kaitannya dengan DOM tetapi terkait dengan perselisihan paham keagamaan antara Tgk. Faisal dan murid-muridnya, dengan ulama *dayah* tradisional dan murid-murid merdeka. Pembakaran ini juga dilakukan oleh massa yang sudah diprovokasi untuk menentang Drs. Tgk. H. Faisal Hasan Sufi tersebut dan pembakaran pesantren ini merupakan satu-satunya pembakaran lembaga pendidikan agama yang pernah terjadi sampai sekarang ini.

Yang lebih menarik lagi ialah dalam masa pembakaran sekolah ini, minat

masyarakat memasuki lembaga pendidikan agama pada tingkat dasar dan menengah meningkat dengan sangat kentara. Lembaga-lembaga pesantren terpadu diserbu di mana-mana dan peminatnya luar biasa peningkatannya. Untung juga dalam masa ini pemerintah pusat telah menerbitkan lagi 85 madrasah baru di Daerah Istimewa Aceh dan mengangkat ribuan guru baru untuk madrasah-madrasah tersebut. Penegerian dan pengangkatan guru ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penanggulangan masalah Aceh. Kalau ada hubungan masalah antara DOM dan pendidikan di Aceh, tentu pengertian madrasah ini akan memiliki makna penting dalam penyelesaian masalah Aceh.

Berdasarkan gejala-gejala yang terbatas ini, kita akan mencari keterkaitan antara peristiwa DOM dan Pasca-DOM dengan pendidikan di Aceh. Persoalan pendidikan di Aceh dan persoalan DOM merupakan dua fenomena yang memiliki sejarah tersendiri. Asumsi pokok yang menjadi dasar dalam makalah ini ialah bahwa dalam latar belakang sejarah kedua fenomena tersebutlah kita mungkin menemukan keterkaitannya dalam latar belakang pendidikan di Aceh kita mungkin dapat memahami kenapa DOM terjadi dan bagaimana perbaikan kebijakan pendidikan dapat menjadi bagian dari penyelesaian persoalan Aceh. Demikian juga dalam latar belakang munculnya DOM kita mungkin dapat memahami kenapa faktor pendidikan penting dalam penyelesaian ini, sehingga sekolah-sekolah tidak dibakar lagi.

Untuk itu dalam makalah ini kita akan melakukan tiga hal penting. Pertama kita akan menelusuri akar perkembangan pendidikan di Aceh ke dalam sejarah Aceh masa lalu dengan asumsi bahwa masa lalu itu telah membentuk ciri tertentu dalam cara berfikir dan terbentuknya institusi pendidikan dalam masyarakat Aceh. Dalam melihat latar belakang ini kita mengkaitkannya dengan pendidikan sebagai pewarisan nilai-nilai budaya masyarakat Aceh. Kedua, kita akan menelusuri permasalahan operasi militer di Aceh juga dalam akar sejarah Aceh

dengan asumsi bahwa operasi militer di Aceh juga merupakan produk dari perjalanan sejarah Aceh. Ketiga, menjadikan dasar sejarah ini sebagai landasan bagi upaya penanggulangan permasalahan Aceh dewasa ini.

Tulisan ini dilandaskan pada sebuah asumsi pokok bahwa "*we cannot escape history*" seperti yang diungkapkan oleh Mr. Hardi, seorang tokoh penting dalam menyelesaikan permasalahan Aceh pada tahun 1959. Meskipun apa yang dicapai pada Misi Hardi, dilancarkan oleh pemerintah setelah itu, Mr. Hardi telah berhasil melakukan sesuatu yang sangat historis, sangat bersejarah, karena memahami dan tunduk pada hukum-hukum sejarah. Hukum sejarah adalah kaidah-kaidah universal yang harus menjadi pegangan oleh siapapun. Karena itu bila sekarang ini kita ingin menyelesaikan kasus Aceh, maka kita pun harus memahami dan tunduk pada hukum-hukum sejarah yang bersifat universal itu, dan merumuskan kebijakan kita sesuai dengan hukum-hukum sejarah itu.

2. Pendidikan Sebagai Bagian Sejarah Aceh

Sejarah Aceh merupakan bagian dari sejarah Islam atau sejarah umat Islam di wilayah Asia Tenggara. Sejarah umat Islam di Aceh dimulai berabad-abad yang lalu sejak Islam dibawa dan diterima sedikit demi sedikit di Aceh dan di seluruh nusantara ini. Islam mulai dikembangkan di Aceh sejak abad ke delapan dengan masuknya Islam di daerah Perlak (Ferlec dalam literatur Inggris). Perkembangan sejarah Islam di Aceh yang sangat dikenal ialah perkembangan pada abad ketiga belas yaitu dengan berkembangnya Kerajaan Islam Pasai di wilayah Aceh Utara sekarang ini. Kerajaan Islam Pasai ini merupakan kerajaan Islam yang paling dikenal dalam sejarah karena tercatat dengan jelas dalam catatan Marco Polo dan Ibnu Battuta, dua orang pengembara yang banyak meninggalkan catatan sejarah tentang dunia timur ini.

Lahirnya Kerajaan Perlak dan Kerajaan Pasai merupakan bagian awal dari perkembangan sejarah Aceh menjadi sejarah

Islam atau sejarah umat Islam di wilayah Asia Tenggara ini. Perkembangan ini mencapai puncaknya dengan bersatunya seluruh wilayah Aceh dan sekitarnya dalam Kerajaan Aceh Darussalam yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke tujuh belas. Kerajaan Aceh Darussalam ini berlanjut sekitar empat abad atau lebih 400 tahun di masa Sultan Mughayat Syah pada awal abad ke-16 sampai tertawannya Sultan Aceh terakhir oleh Belanda pada awal abad ke-20 ini. Sejarah yang lamanya lebih empat abad ini merupakan sejarah yang berkesinambungan yang telah berhasil membangun suatu identitas tersendiri bagi masyarakat di wilayah ini. Meskipun Belanda berhasil menyatukan Aceh dalam wilayah Hindia Belanda sejak awal abad ke-20, Belanda tidak dapat merubah apalagi menghapuskan identitas Aceh yang berintikan Islam sebagai budaya masyarakatnya.

Dalam masa empat ratus tahun lebih inilah Aceh telah membangun suatu sistem pendidikan yang menyatu dengan agama Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh. Pendidikan ini berintikan pada sistem pendidikan *meunasah* dan *dayah* yang telah berkembang dan menjadi basis dalam sistem pewarisan nilai-nilai budaya di Aceh. Di setiap kampung di Aceh dibangun *meunasah* yang berfungsi sebagai *cultural center*, karena *meunasah* ini memang memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Aceh. Kita sebutkan *educational center*, karena secara formal anak-anak masyarakat Aceh mulai pendidikannya secara formal di lembaga ini dan pendidikan ini adalah pendidikan yang berintikan Islam.

Setelah menamatkan pendidikan awal atau dasar di *meunasah* anak-anak akan melanjutkan pendidikan mereka ke *dayah-dayah*. Pendidikan di sini lebih formal lagi dan biasanya anak-anak Aceh pergi merantau atau *meudagang* atau mengikuti pendidikan pada *dayah*. *Dayah* adalah lembaga pendidikan yang diperlengkapi dengan tempat tinggal dan dalam sistem pendidikan ini anak-anak memang terpisah dari orang tuanya, namun selama ini anak-anak menjadi tanggung jawab pemimpin *dayah*. Sewaktu

mengikuti pendidikan pada *dayah*, guru dan pemimpin *dayah* bukan saja berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga berfungsi sebagai orang tua yang harus menjaga anak-anak itu. Mereka dipatuhi dan dihormati seperti orang tua sendiri. Karena itu pula pemimpin dan guru-guru *dayah* juga tinggal di lingkungan *dayah* itu atau tempat yang dekat dengan *dayah* itu.

Jadi meskipun di Aceh anak-anak berpisah dengan orang tuanya karena mengikuti pendidikan, anak-anak ini tetap mewarisi nilai budaya masyarakatnya melalui guru-guru mereka di *meunasah* atau *dayah*. Anak-anak belajar agama secukupnya pada *meunasah* ini sehingga masyarakat Aceh tidak merasa khawatir terhadap masa depan budaya Aceh yang berintikan Islam ini. Sebagai bagian dari produk pendidikan yang demikian, semua orang Aceh dapat disebut sebagai santri sesuai dengan istilah Clifford Geertz, dan meskipun ada sebagian orang tidak mendapatkan pendidikan agama ini secukupnya, namun pada waktu ia dewasa, ia akan tetap mendidik anak-anaknya sesuai dengan sistem ini dengan menyerahkan anaknya pada lembaga yang ada ini. Masyarakat Aceh akan marah pada orang tua yang tidak memberikan pendidikan agama Islam pada anak-anak mereka.

Setelah Belanda mulai berkuasa di Aceh, maka Belanda mulai membangun sistem pendidikan modern dan bersifat sekuler. Sistem pendidikan yang modern ini dilanjutkan samapai sesudah kemerdekaan oleh pemerintah Indonesia. Suatu ciri yang sangat penting dalam pendidikan modern ini ialah lepas dari pendidikan agama. Ketika sistem ini mulai dikembangkan, pendidikan agama tidak diberikan sama sekali karena pendidikan agama menjadi tanggung jawab orang tua di rumah. Meskipun telah diambil alih oleh pemerintah Indonesia, pendidikan agama dimasukkan ke dalam sistem pendidikan ini, jumlah pendidikan agama yang bisa diberikan sangat terbatas. Dan pendidikan seperti ini sangat berbeda dengan pendidikan yang ada dalam masyarakat sebagai warisan masa lampau Aceh.

Pada zaman Belanda, masyarakat Aceh menganggap pendidikan modern ala barat itu sebagai media dalam mengkafirkan orang Aceh, dan kaum santri di Aceh tetap beranggapan bahwa sistem pendidikan modern ini bertanggung jawab dalam menandatangani keberagamaan, keislaman atau keimanan orang Aceh. Karena pandangan yang demikian masyarakat Aceh yang kuat orientasi budaya Islamnya, sangat enggan menyekolahkan anaknya ke sekolah. Tetapi Belanda berhasil mendidik anak-anak golongan bangsawan di sekolah-sekolah ini. Ini merupakan awal keretakan budaya antara kaum ulama atau santri dengan kaum bangsawan di Aceh. Kalau dalam perjalanan sejarah Aceh kita menemukan konflik antara ulama dan *uleebalang*, konflik ini tidak dapat dilepaskan dari peran pendidikan ini.

Sistem pendidikan baru yang modern yang miskin unsur agama ini mengancam identitas budaya masyarakat Aceh yang berarti mengancam identitas Aceh yang telah berkembang ratusan tahun tersebut. Namun setelah berkembang begitu lama ada sebagian masyarakat Aceh juga menyadari bahwa pendidikan Barat ini penting juga dikembangkan. Dari kesadaran ini lahir gerakan pembaharuan yang antara lain menciptakan lembaga pendidikan baru yang menyatukan pendidikan agama dan pendidikan Barat modern. Dan inilah yang kemudian disebut sistem pendidikan madrasah. Dengan lahirnya sistem yang bersifat sintesis ini, maka dalam masyarakat Aceh terdapat tiga model pendidikan yaitu sistem pendidikan *dayah*, pendidikan sistem madrasah dan pendidikan sistem sekolah atau pendidikan modern.

Dari ketiga model tersebut, pemerintah sepenuhnya menjalankan pendidikan modern yang sangat minim pendidikan agama itu dan karena pendidikan ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah, maka kemampuan menampung murid-murid tentu sangat besar. Sebagian besar anak-anak di Aceh memasuki sistem pendidikan ini, dan karena di sini jumlah pendidikan agama sangat terbatas, bagi masyarakat yang prihatin terhadap keberagaman anak-anaknya

terpaksa mencari pendidikan agama di lembaga di luar sekolah tadi. Mereka memasukkan anak-anak mereka ke tempat-tempat pengajian, sehingga pengajian ini juga berkembang di lingkungan sekolah itu sendiri yang terkenal dengan Madrasah Diniyah. Namun dengan demikian kegiatan pendidikan sebagai upaya pewarisan nilai-nilai menjadi terpisah-pisah dan hilang kesatuannya.

Sebagian lagi masyarakat Aceh mencoba memasukkan anaknya ke madrasah di mana pendidikan agama dan pendidikan modern diberikan bersama-sama meskipun jumlahnya masing-masing menjadi terbatas. Karena jumlah madrasah ini sangat sedikit dan pembiayaannya pun sangat kurang, maka jumlah yang bisa ditampung pun sangat sedikit. Madrasah ini dibiayai oleh pemerintah melalui Departemen Agama, tetapi Departemen Agama tidak mempunyai peluang untuk memperluas daya tampung madrasah ini. Sedangkan pendidikan model pesantren sepenuhnya milik masyarakat dan dibiayai sepenuhnya oleh masyarakat. Pemerintah boleh dikatakan tidak memiliki satupun pesantren meskipun sebenarnya pesantren itu merupakan khazanah budaya bangsa yang sangat penting.

Dengan sistem pendidikan yang demikian, sistem pewarisan nilai-nilai budaya Aceh yang berintikan Islam menjadi tidak berjalan sebagai mana diharapkan dan ini mungkin menimbulkan sentimen budaya dari masyarakat Aceh yang berbudaya Islam terhadap pemerintah. Sentimen budaya ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi simpati masyarakat bahkan memicu masyarakat untuk melawan pemerintah. Di sini pendidikan mulai tersangkut masalah politik dan masalah militer karena bila masyarakat melawan pemerintah dan pemerintah menggunakan militer untuk menghadapi perlawanan, maka ini sudah urusan militer dan ini terkait dengan DOM.

Pandangan ini semata-mata didasarkan pada perkembangan sejarah. Bila suatu masyarakat melawan pemerintah sehingga terjadi konflik, tentu ada faktor-faktor lain seperti masalah ekonomi dan sosial lainnya. Ketidakadilan dalam bidang

ekonomi juga dapat memicu konflik dalam masyarakat. Demikian juga bila setelah mendapat pendidikan, pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan tidak tersedia, apalagi bila pendidikan itu seluruhnya diorientasikan ke lapangan kerja seperti yang dirasakan dalam sistem pendidikan modern sekarang ini. Dengan diorientasikan ke lapangan kerja, nilai pendidikan hanya terbatas pada nilai ekonomi saja dan bila imbalan ekonomi tidak diperoleh, tentu akan menimbulkan kerawanan-kerawanan.

Bila lulusan pesantren atau lulusan sekolah agama tidak mendapat pekerjaan sebagai imbalan ekonomi dari pendidikan, anak-anak masih memiliki nilai yang lain dari pendidikannya yaitu nilai agama dan budaya. Jadi di sini masih ada *value* yang lain dari kegiatan pendidikan. Dengan nilai budaya ini, lulusan-lulusan pendidikan dayah dan sekolah agama dapat memainkan peranan sebagai tokoh-tokoh pemimpin dalam masyarakatnya dan mendapatkan imbalan dari ketokohnya itu. Imbalan ini lebih bersifat kultural dari pada bersifat ekonomis meskipun ada juga nilai ekonominya.

3. DOM dan Latar Belakang Sejarah Aceh

DOM yang merupakan singkatan dari Daerah Operasi militer, sebenarnya memiliki pengertian terbatas, yaitu Operasi Jaring Merah yang dilancarkan ABRI dari tahun 1989 sampai tahun 1998 dalam upaya ABRI melawan Gerakan Aceh Merdeka. Meskipun yang menjadi tujuan Operasi Jaring Merah ini adalah orang-orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka, namun operasi ini telah menimbulkan korban yang banyak sekali dan penderitaan yang luar biasa di pihak masyarakat, karena dampaknya yang demikian, maka DOM ini tidak bisa dipahami dalam pengertian sempit. Karena dampaknya yang demikian, maka ada yang mengartikan DOM secara luas sebagai upaya mengganti sebuah kebudayaan bahkan menghapuskan sebuah peradaban.

DOM dalam arti luas ini dapat dipahami bila kita melihat sejarah Aceh dan perkembangan konflik bersenjata di Aceh. Seperti disebutkan di atas sejarah Aceh adalah sejarah umat Islam di nusantara ini.

Sebagai masyarakat yang memiliki identitas Islam yang kuat, sejak awal kemerdekaan masyarakat Aceh, ingin melestarikan identitas ini dengan melaksanakan syariat Islam. Ternyata bukan saja keinginan ini bisa diwujudkan, tetapi kesatuan budaya Aceh dalam bentuk propinsipun dibubarkan. Akhirnya munculah Gerakan Darul Islam di Aceh di bawah pimpinan Tgk. Muhammad Daud Beureueh. Perlawanan Darul Islam yang disebut sebagai kaum republikan yang masih ingin bersatu dengan Indonesia ini diselesaikan pada tahun 1959 dan diakhiri pada tahun 1962 dengan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh.

Sebagai bagian dari penyelesaian kasus Aceh, pada tahun 1959, daerah Aceh yang sudah dipisahkan kembali dengan Sumatera Utara pada tahun 1957, diberi keistimewaan dalam tiga bidang yaitu bidang agama, adat istiadat dan pendidikan. Usaha-usaha merealisasikan ketiga keistimewaan ini timbul tenggelam antara tahun 1959 sampai tahun 1974. Pada tahun 1974 Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan daerah, di mana dalam undang-undang ini, secara material keistimewaan Aceh itu tidak diakui lagi. Memang sebagian masyarakat Aceh masih tetap mengakuinya seperti pengakuan adanya identitas Islam dalam kebudayaan Aceh. Pengakuan ini merupakan pengakuan terhadap hukum sejarah saja, bukan pengakuan legal karena secara legal positif, keistimewaan itu sebenarnya telah diakhiri.

Dua tahun setelah kejadian ini, yaitu pada tahun 1976 meletuslah Gerakan Aceh Merdeka di bawah pimpinan Muhammad Hasan di Tiro. Ini merupakan dampak nyata dari penyelewengan hukum sejarah. Ada yang sudah memperingatkan Amir Mahmud sebagai Menteri Dalam Negeri pada waktu itu tentang masalah ini, tetapi peringatan itu tidak digubris. Namun gerakan ini dapat diakhiri pada tahun 1979 dengan usaha-usaha dari berbagai pihak. Kehadiran Kodam I Iskandarmuda, memainkan peranan penting dalam penyelesaian kasus ini. Tetapi sebagaimana halnya Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1974 masih berlaku, maka Gerakan Aceh Merdeka inipun masih tetap ada dan tokohnya berkeliaran di luar negeri, menunggu kesempatan untuk kembali lagi.

Kesempatan ini muncul setelah Kodam I Iskandarmuda dilikuidasikan oleh Benny Moerdani yang menjabat sebagai Panglima ABRI pada waktu itu. Dalam hal ini nampak sekali bahwa seakan-akan penglikuidasian Kodam (sengaja dibuat untuk ?) membuka peluang kepada munculnya kembali Gerakan Aceh Merdeka. Dengan tidak adanya Kodam di Banda Aceh, usaha-usaha menghadapi Aceh Merdeka tidak bisa dilakukan dengan konsep kekeluargaan seperti yang terjadi pada tahun 1959 dan 1979. Dalam usaha yang demikian Operasi Jaring Merah dilancarkan oleh ABRI dan dikomandokan dari Medan Sumatera Utara. Dan dalam suasana yang demikianlah maka kekacauan di Aceh belum bisa diakhiri sampai sekarang meskipun DOM telah dicabut.

Meskipun Gerakan Aceh Merdeka dan Gerakan Darul Islam dipimpin dua orang yang berbeda di mana yang satu ingin mendirikan negara Islam bersama daerah lainnya dan yang satu lagi ingin mendirikan negara merdeka yang terpisah dari Indonesia, tetapi rakyat yang ikut ke dalam kedua identitas budaya dan sejarah Aceh atau kekecewaan terhadap pelanggaran hukum sejarah sebagai suatu *sunnatullah*. Kalau dalam gerakan yang pertama musuh idologinya adalah Pancasila, maka gerakan yang kedua musuh idologinya ialah dominasi kultur Jawa dalam pemerintahan Republik Indonesia. Kedua idologi ini nampaknya masih agak susah mengakomodasi aspirasi syariat Islam di Aceh.

Selain itu DOM sebagai bagian sejarah, bukan hanya memiliki dimensi kebudayaan tetapi juga ada dimensi konflik agamanya, dan bila ini menyangkut konflik agama maka merahnya jaring makin bertambah-tambah. Adanya dimensi agama terlihat dari beberapa indikator. Pertama, masyarakat Aceh memang fanatik terhadap agamanya dan memusuhi Portugis dan Belanda atas dasar agama ini. Kedua, tidak

dapat dibantah bahwa pada awal Orde Baru pengaruh elite non-muslim dalam politik besar sekali, termasuk dalam ABRI itu sendiri. Mungkin lahirnya konsep Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang menghapuskan keistimewaan Aceh ada sangkut paut dengan elite Non-Muslim ini. Ketiga, likuidasi Kodam dan peluncuran DOM tidak terlepas dari Benny Moerdani sebagai seorang Jenderal yang beragama Katolik. Dan keempat pemusatan komando operasi DOM di Medan juga mengandung anasir permusuhan agama ini.

Bila asumsi-asumsi ini benar, maka dilihat dari perkembangan sejarah, memang DOM merupakan suatu usaha pembinasan identitas budaya Islam di Aceh yang telah berkembang ratusan tahun itu. DOM telah menimbulkan dampak psikologis yang luar biasa sehingga bisa menggoyahkan identitas budaya Aceh. Di lain pihak upaya-upaya kristenisasi memang aktif ditujukan ke Aceh. Kasus yang sangat menonjol adalah insiden Peureulak yang melibatkan 4 orang misionaris, tiga dari Amerika Serikat dan seorang dari Singapura. Ini terjadi setelah kasus beureuneuen di mana rakyat diprovokasi sampai membakar pesantren tadi.

Barangkali inilah pengertian DOM dalam arti yang lebih luas sebagai bagian dari sejarah kekerasan militer di Aceh dan inilah DOM yang perlu dicermati oleh kita semua yaitu DOM yang bisa mengacu kepada pembinasan suatu kebudayaan. Untuk menghindarkan dari pembinasan ini tentu saja rakyat akan mendukung usaha memisahkan diri dari Republik Indonesia karena penyatuan ke dalam Republik Indonesia ternyata membahayakan identitas budaya Islam ini. Dilihat dari segi ini, yang menjadi kunci penyelesaian masalah Aceh, bukanlah pemimpinnya seperti Muhammad Hasan di Tiro, tetapi yang menjadi inti permasalahan adalah kelestarian identitas Islam masyarakat Aceh itu sendiri.

4. Pendidikan Dalam Mewujudkan Keistimewaan Aceh

Sistem pendidikan tentu memainkan peranan penting dalam menjaga identitas ini sehingga dengan demikian sistem pendidikan

ini dapat memainkan peranan penting dalam menghadapi kasus DOM di Aceh. Di sinilah keterakitan yang sangat penting antara peranan pendidikan dan fenomena DOM di Aceh. Karena demikian penting maka dalam penyelesaian kasus Aceh pada tahun 1959 yang lalu, keistimewaan yang diberikan bukan saja dalam bidang agama dan adat-istiadat sebagai identitas budaya masyarakat Aceh, tetapi juga dalam bidang pendidikan sebagai media pewarisan nilai-nilai budaya tersebut. Karena itu pulalah, langkah pertama yang diambil setelah dicapai kesepakatan dengan Misi Hardi pada bulan Mei 1959, adalah pencaangan dimulainya pembangunan pendidikan di Aceh pada tanggal 2 September 1959 tersebut juga.

Konsep pendidikan Darussalam yang dicanangkan pada tanggal 2 September 1959 tersebut adalah pendidikan terpadu untuk masyarakat Aceh. Keterpaduan ini disimbolkan oleh keberadaan lembaga pendidikan agama dan lembaga pendidikan umum secara bersama-sama di kota Pelajar Mahasiswa Darussalam. Dan karena konsep inilah, sampai sekarang ini, Darussalam dianggap sebagai jantung hati rakyat Aceh. Sayang sekali konsep ini belum berjalan di Aceh secara menyeluruh sehingga perjuangan masyarakat Aceh mempertahankan identitas budaya Islamnya dapat diwujudkan dan dapat mengakhiri konflik yang berkepanjangan ini.

Penyelesaian masalah Aceh sekarang ini hanya bisa dilakukan dengan pemahaman yang memadai tentang sejarah Aceh ini. Memang ada faktor-faktor lain yang harus

dipertimbangkan seperti kemungkinan kasus Aceh ini sebagai bagian dari rekayasa internasional. Yang penting dilakukan adalah agar para pemimpin Republik Indonesia di Jakarta dan di tempat-tempat lain bersedia mempelajari, memahami dan menerima kenyataan ini sebagai hukum sejarah yang tidak mungkin ditolak. Ini sesuai dengan semboyan yang diciptakan oleh Mr. Hardi, *we cannot escape history*. Memahami identitas Aceh yang demikian, berarti memahami bahasa orang Aceh dan ini dapat melancarkan komunikasi untuk menyelesaikan masalah yang sangat emosional karena menyangkut jati diri yang telah tumbuh ratusan tahun itu. Salah satu unsur penting dari Gerakan Aceh Merdeka sekarang berbicara dengan bahasa Aceh. Ini harus dipahami sebagai simbol identitas. Para misionaris sendiri berusaha mempelajari bahasa Aceh untuk tujuan mereka. Dan literatur agama yang disebarkan di Peureulak adalah dalam bahasa Aceh. Dan salah seorang orientalis yang pandai sekali dalam bahasa Aceh, sekarang bekerja sebagai pastor di Australia.

Pengembangan pendidikan di Aceh yang sesuai dengan nilai budaya ini akan mampu memulihkan motivasi rakyat Aceh untuk mengikuti pendidikan dan kalau motivasi ini ada, insyaallah, usaha pembinaan sumber daya manusia di Aceh dapat ditingkatkan, dengan peningkatan SDM ini diharapkan kekuatan masyarakat Aceh menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul akan lebih baik lagi. *Insyaallah*.



Prof. Dr. Safwan Idris, MA, lahir di Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 5 September 1949, adalah Rektor IAIN Ar-Raniry memperoleh gelar sarjana tahun 1971 dan sarjana lengkapnya dari FKIP Universitas Syiah Kuala tahun 1974. Setelah ini melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat dan memperoleh MA dalam ilmu perpustakaan tahun 1978 dan dalam policy pendidikan tahun 1980. Kemudian memperoleh gelar PhD dalam policy pendidikan tahun 1982 di Universitas Wisconsin, Madison. Di samping jabatan di atas, beliau adalah ketua MDI Aceh tahun 1988 sampai sekarang. Ketua Majelis ulul Albab P.B. Dayah Isnhafuddin

Acch, Ketua Bazis Aceh, dan juga anggota pengurus MUI Daerah Istimewa Aceh tahun 1987 sampai sekarang. Aktif sebagai pemakalah dalam berbagai seminar di dalam dan luar negeri dan juga menulis berbagai artikel di jurnal-jurnal ilmiah.

Keberadaan Kopelma Darussalam dan Kaitannya dengan Keistimewaan Aceh di Bidang Pendidikan

Oleh Shabri A.



Dalam rangka mencapai tujuan

tersebut, pada tanggal 21 April 1958 dibentuk suatu badan pelaksana yang disebut "Jajasan Dana Kesejahteraan Aceh (JDKA)". Yayasan ini berasas atas sendi dasar kemampuan rakyat yang teratur untuk kepentingan rohani maupun jasmani, untuk memajukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Aceh dalam arti seluas-luasnya. Langkah pertama untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan berusaha mendirikan perkampungan pelajar dan mahasiswa di ibukota Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan ibukota kabupaten, kemudian mengusahakan berdirinya satu universitas untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Langkah selanjutnya, yayasan akan berupaya dalam lapangan sosial, keagamaan, kebudayaan, kemakmuran dan lainnya yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Setelah dilakukan pembahasan dan penelitian secara mendalam, maka diambil tekad untuk membangun sebuah universitas yang diberi nama Syiah Kuala (Unsyiah) dan menetapkan nama Darussalam untuk kota pelajar (Kopelma Darussalam), yang akan merupakan pusat pendidikan di daerah Istimewa Aceh.

Nama Darussalam diambil dari sejarah Aceh pada saat mencapai puncak kemajuan dan peradabannya di bawah pimpinan Sultan Djohansyah pada tahun 1205 M (601 H), yang saat itu berdiri sebuah kerajaan Islam di Aceh Raya, yang terkenal dengan Aceh Darussalam. Darussalam

I
Pada masa jayanya, kota Banda Aceh disempurnakan namanya menjadi Bandar Aceh Darussalam sebagai ibukota kerajaan Aceh Darussalam, yang berkembang terus menjadi kota bertaraf internasional dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, keagamaan dan kebudayaan.

Secara geografis Aceh berada paling ujung Utara dari wilayah Republik Indonesia. Letak yang paling ujung dan jauh dari jaringan komunikasi dengan pusat pemerintahan menyebabkan terjadinya isolasi. Keadaan terisolir baik fisik maupun mental sangat tidak menguntungkan dalam pembangunan.

Menyadari ketinggalan-keinggalan Aceh, maka sejak terbentuknya provinsi Aceh pada awal tahun 1957, pemerintah daerah yang dipimpin oleh Gubernur Ali Hasjmy dan penguasa perang daerah yang dipimpin oleh Letnan Sjamaun Gaharu dan Mayor T. Hamzah bersama-sama dengan para pemimpin lainnya, pada waktu itu telah menetapkan dasar-dasar pembangunan daerah baik fisik maupun mental spiritual.

Sebagai suatu daerah di antara berbagai daerah lain di Indonesia, Aceh mempunyai perbedaan-perbedaan dan kekhususan-kekhususan sendiri, baik di bidang sejarah, budaya, adat istiadat, masalah-masalah tentang pembangunan ekonomi, sumber daya alam, dan masalah kemasyarakatan lainnya.

artinya negeri bahagia, makmur, aman dan tenteram yang rakyatnya hidup sejahtera, sedangkan nama Syiah Kuala diambil dari nama gelar Teungku Syekh Abdurrauf yang terkenal dengan sebutan Syiah Kuala dan beliau merupakan salah seorang ulama besar di Aceh.

Pada tanggal 17 Agustus 1958, dilangsungkan upacara peletakan batu pertama pembangunan Kopelma Darussalam oleh Menteri Agama K.H. Mohammad Ilyas atas nama pemerintah pusat. Pada tanggal 24 Agustus 1958 dilangsungkan lagi upacara peletakan batu pertama pembangunan gedung pertama, yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Prijono.

Pada tanggal 2 September 1959 diadakan upacara besar peresmian pembukaan kota Darussalam, pembukaan selubung tugu dan peresmian pembukaan fakultas pertama yaitu fakultas ekonomi, yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, setiap tanggal 2 September ditetapkan sebagai hari ulang tahun Darussalam dan sebagai hari pendidikan DI Aceh, yang diperingati oleh segenap lapisan rakyat diseluruh penjuru tanah Aceh.¹

II

Daerah Istimewa Aceh dikenal dengan tiga keistimewaannya, yaitu keistimewaan di bidang agama, adat istiadat dan pendidikan. Ketiga keistimewaan tersebut saling terkait satu sama lain, sebagaimana bunyi *hadith maja* "*adat ngon hukom hanjeuet cree lagee zat ngon sifeut*". Hal ini seperti terlihat pada adat istiadat dan

pendidikan yang ada di Aceh bersumber dari ajaran agama Islam.

Lahirnya Kopelma Darussalam yang berlandaskan cita Islam untuk mengisi kemerdekaan di bidang pendidikan, menjadikan setiap siswa dan mahasiswa yang menjalani studi mereka di Darussalam, berarti telah diawali dengan tekad dan dasa cita akan menjadi intelektual yang beriman dan berlandaskan ajaran Islam.

Kopelma Darussalam merupakan cetusan kesadaran untuk mengamalkan ajaran Islam, yang mewajibkan manusia agar tekun menuntut ilmu, berbuat kebaikan dan mengajak manusia mencari serta mensyukuri anugerah Ilahi di permukaan bumi dan menciptakan persatuan dalam ikatan ajaran-Nya.

Atas dasar yang bersendikan ajaran Islam, maka Kopelma Darussalam menetapkan lambang kedamaian dan cinta kasih, tempat mencetak manusia yang beriman dan berbakti, tempat menggali ilmu pengetahuan untuk disumbangkan kepada manusia, serta tempat membina manusia yang berjiwa besar, berpengetahuan luas dan berbudi luhur.²

Pembangunan Kopelma Darussalam dan Perguruan Tinggi Unsyiah, tidak lepas dari sorotan politik yang berkembang pada waktu itu. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan aspirasi rakyat Aceh, di samping Unsyiah di Darussalam didirikan pula sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi Agama yang disebut Institut Agama Islam Negeri Djamiyah Ar-Raniry (IAIN Ar-Raniry) dengan berbagai fakultas. Sebagai suatu hal yang unik, di Darussalam juga

¹Marzuki Nyakman, "Suka Duka Pembangunan Kopelma Darussalam", dalam *10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan*, (Banda Aceh : Yayasan Pembinaan Darussalam, 1969), hal. 53-54.

²Ali Hasjmy, "Konsepsi Ideal Darussalam", dalam *10 Tahun Darussalam dan Hari Jadi Pendidikan*, (Banda Aceh : Yayasan Pembinaan Darussalam, 1969), hal. 67.

dibangun sebuah pesantren tinggi dengan nama Dayah Teungku Chiek Pante Kulu. Di samping itu di Darussalam juga dibangun sebuah Akademi Pemerintahan Dalam Negri (APDN).³ Hampir seluruh bangunan yang berdiri di Darussalam merupakan sumbangan dari rakyat Aceh. Hal seperti itu merupakan salah satu ciri khas Kopelma Darussalam, yang lahir dari kandungan cita-cita dan swadaya masyarakat. Di samping bantuan yang diperoleh dari pemerintah pusat, hingga kini rakyat Aceh melalui Pemda tetap memberi bantuan sepenuhnya bagi kelangsungan hidup, pembinaan dan perkembangan Darussalam.

Universitas Darussalam melahirkan ribuan sarjana dalam berbagai jenis keahlian dan bidang pengetahuan. Demikian juga Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ar-Raniry) telah melahirkan sarjana ahli di bidang agama, mulai dari sarjana bidang hukum Islam, pendidikan, Ushuluddin, dakwah, dan Adab sebagai kader-kader kebudayaan masa mendatang.

Kopelma Darussalam selain sebagai kampus pendidikan tinggi, juga merupakan mazhab tarbiyah (doktrin pendidikan) dan sumber cita, maka Kopelma Darussalam mempunyai satu pandangan hidup, yang menganut filsafat "diriku tak ada di luar pengabdian kepada Allah".⁴

Sejak tahun 1960, pemerintah Daerah Istimewa Aceh telah memikirkan usaha-usaha ke arah tercapainya mutu yang tinggi dalam bidang pendidikan di Aceh, meliputi berbagai jenis tingkatan, antara lain dengan menetapkan tanggal 2 September sebagai hari pendidikan Daerah Istimewa Aceh, yang dirayakan setiap tahun secara

sadar dan khidmat serta merata di seluruh Aceh.

Hari pendidikan ini dimaksudkan untuk mempertebal kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arti pendidikan, menanamkan rasa keinsafan ke dalam hati segenap lapisan masyarakat Aceh bahwa pendidikan merupakan alat yang penting bagi tercapainya kemajuan dalam berbagai cabang kehidupan, baik untuk kebutuhan diri sendiri, masyarakat, negara dan bangsa, maupun untuk kecerdasan dan ketinggian derajat kehidupan manusia segenap umat manusia.

Hari pendidikan Daerah Istimewa Aceh ditetapkan secara resmi dengan keputusan kepala daerah Istimewa Aceh tanggal 5 Oktober 1960 Nomor 90/1960. Sehubungan dengan lahirnya hari pendidikan tersebut, maka pemerintah Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Daerah Tingkat II di seluruh Aceh telah menyediakan piala-piala pendidikan bergilir, yang diberikan tiap-tiap perayaan hari pendidikan kepada daerah-daerah dan sekolah-sekolah yang berhasil mempertinggi mutu pelajaran.

Langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah ini bertujuan untuk membangkitkan semangat para pelajar dan pendidik ke arah kegiatan dan kesungguhan, sehingga mereka senantiasa berusaha mencapai kemajuan dan perkembangan mutu pendidikan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, dimaksudkan kecuali untuk mencapai kemajuan dalam kuantitas perkembangan, juga untuk memperoleh kualitas yang terus menerus meningkat dan sempurna.

Baik Darussalam sebagai "kampus ilmu" ataupun sebagai "Doktrin Pendidikan", yang mempunyai tujuan dan cita yang jelas, maka untuk mencapai cita dan tujuan itu memerlukan alat-alat pelaksana.

³Marzuki Nyakman, *op.cit*, hal. 60-61.

⁴Ali Hasjmy, *op.cit*, hal. 67.

Alat-alat pelaksana sebagai penerus cita Darussalam terdiri dari bermacam bentuk di antaranya, *pertama* Lembaga Pendidikan, merupakan salah satu alat pelaksana yang terpenting baik pendidikan rendah, menengah maupun pendidikan tinggi. Untuk itu didirikanlah Universitas Syiah Kuala dengan berbagai fakultasnya, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ar-Raniry) dengan berbagai fakultasnya. Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Dayah Teungku Chiek Pante Kulu (pesantren luhur) sebagai proyek pemerintah daerah, SMA/SMEA dan lainnya. *Kedua* Lembaga Ilmu, di samping lembaga pendidikan, didirikan pula berbagai lembaga ilmu dan riset. Di antaranya, Studi Klub Islam Darussalam, Lembaga Riset ekonomi, Lembaga Riset Kehewan, Lembaga Riset Pertanian, Lembaga Riset Teknik, Lembaga Riset Pendidikan, Lembaga Dakwah Islamiyah dan sebagainya.

Ketiga Yayasan, Di samping lembaga-lembaga dan badan-badan yang bergerak dalam bidang ilmu dan mental, juga didirikan badan-badan dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang fisik, maka didirikanlah Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh, Yayasan Pembina Darussalam, Yayasan Pembina Ekonomi, Yayasan Pembina Djamiah Ar-Raniry, dan lainnya. *Keempat* Surat Kabar atau Majalah. Kecuali langsung mendidik para pemuda dalam berbagai lembaga pendidikan, juga masyarakat harus dididik dan diberi pengertian tentang Darussalam. Segala ide, cita-cita, doktrin, ajaran dan ilmu yang berkembang di Darussalam harus disebar luaskan kepada seluruh masyarakat. Untuk itu diterbitkan dan didirikan Majalah Sinar Darussalam, Majalah Gema Ar-Raniry, Majalah Fakta Ekonomi, Buku Mars Darussalam, berbagai buku peringatan ulang

tahun dari lembaga-lembaga, Ikatan Pers Mahasiswa dan sebagainya.

Kelima Perkampungan atau Taman Pelajar. Darussalam sebagai doktrin pendidikan, sumber cita, pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan, kampus mahasiswa dan gelanggang pengolahan serta pelaksanaan dakwah Islamiyah, berkeyakinan bahwa tidak akan tercapai cita-cita dan tujuannya jika kegiatannya hanya dipusatkan pada tingkat kegiatan tinggi saja. Oleh karena itu, cita dan doktrin pendidikan Darussalam harus dimulai juga dari bawah, mulai dari pendidikan rendah, menengah, dengan mendirikan pusat-pusat pendidikan di tiap-tiap kecamatan dan kabupaten. Di setiap kabupaten diusahakan mendirikan pusat pendidikan yang dinamakan Perkampungan Pelajar, seperti Perkampungan Pelajar Muda Sedia di Langsa, Perkampungan Pelajar Babussalam di Kutacane, dan sebagainya. Di samping itu, di setiap kecamatan diusahakan mendirikan pusat pendidikan yang dinamakan Taman Pendidikan. Baik perkampungan pelajar maupun Taman Pelajar merupakan alat pelaksana dari Darussalam sebagai sumber cita dan doktrin pendidikan. Oleh karena itu, politik pembangunannya juga sama dengan politik pembangunan kampus Darussalam, yaitu "Pembangunan di dasarkan atas kekuatan rakyat dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat".

III

Sejarah perjuangan merebut kemerdekaan di Aceh dan kelanjutan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan, merupakan beban tanggung jawab yang kontinu, yang harus dituangkan dalam usaha-usaha konkrit dan positif

Zaman kemerdekaan yang telah diwujudkan itu, memberikan kesempatan dan kemungkinan untuk mengejar ketinggalan,

terutama dalam bidang pendidikan dan kehidupan masyarakat di segala bidang. Keinginan itu dituangkan dalam suatu rencana dan cita-cita yang pertama, yaitu dalam bidang pendidikan Perguruan. Hal itu kemudian diwujudkan dengan pembinaan suatu kompleks pendidikan; Kopelma Darussalam.

Atas dasar pemikiran itu, maka Darussalam adalah lambang kedamaian dan cinta kasih, tempat manusia yang beriman dan berbakti, tempat menggali ilmu pengetahuan untuk disumbangkan kepada umat manusia, berjiwa besar, berpengetahuan luas dan berbudi luhur. Ilmu pengetahuan itu sebagai senjata pembangunan mental dan fisik adalah tugas dan hasrat bina dari Kopelma Darussalam.

Penamaan kompleks pendidikan itu dengan nama Darussalam, memberi pengertian bahwa Darussalam tidak hanya kompleks pendidikan, tetapi juga sebagai pusat perumusan perjuangan mencapai suatu cita-cita masyarakat adil dan makmur. Dengan dasar itu pula pada awal abad XVI rakyat Aceh telah menamakan negaranya dengan Kerajaan Aceh Darussalam.

Kopelma Darussalam yang telah menjadikan dirinya sebagai cita masyarakat adil dan sejahtera, menyadari bahwa untuk mencapai suatu cita-cita, tidak mungkin tanpa ada ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Kopelma Darussalam menjadikan dirinya sebagai kampus ilmu, pusat kegiatan segala macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan Darussalam adalah jantung hati rakyat Aceh.



Drs. Shabri A. adalah Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. Ia lahir di Aceh Selatan pada tanggal 5 Mei 1957. Setelah menyelesaikan pendidikan SMTA di Tapaktuan, kemudian pada tahun 1977 melanjutkan studi ke Jurusan Civics Hukum dengan Program minor pada jurusan sejarah Fakultas Keguruan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan selesai tahun 1982. Selama kuliah aktif sebagai asisten dosen pada perguruan tinggi negeri dan swasta. Selain itu, aktif juga dalam berbagai penelitian di antaranya penelitian Regional Indoconsult di Aceh Utara, Inventarisasi Pengembangan Sekolah Dasar Repelita III dan Penyusunan Draft Repelita IV Sektor Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Sejak 1984 bekerja di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Selain tugas rutin yang dikerjakannya, ia juga aktif dalam berbagai seminar, lokakarya dan penataran. Pernah mengikuti diklat penjenjangan, di antaranya diklat penjenjangan SEPALA angkatan LXIV tahun 1994 dan SPAMA angkatan XXI 1996.

Guru dan Karyanya di Aceh Pada Abad XVII dan XIX

Oleh Rusdi Sufi

Ketika Kerajaan Aceh telah mencapai puncak kejayaannya (abad XVII) banyak dikunjungi para cendekiawan (ulama dan pujangga), baik dari manca negara maupun domestik. Di antara mereka yang datang ini ada yang kemudian menetap di Aceh dan ada pula yang kembali ke negeri asalnya. Selama di Aceh mereka ada yang berprofesi guru sebagai pengajar khususnya dalam ilmu agama dan ada juga sebagai pengarang buku tentang berbagai cabang ilmu pengetahuan. Karena banyaknya guru dan pengarang yang berdomisili di Aceh menjadikan Aceh sebagai "kiblat" studi tentang Islam dan ilmu pengetahuan lainnya di Nusantara pada waktu itu.

Berikut ini dipaparkan sejumlah mereka (guru dan pujangga) yang pernah berkiprah di Aceh pada kurun waktu tersebut di atas. Di antaranya adalah Muhammad Azhari sebagai pengajar ilmu metafisika; Syekh Abdul Khair ibn Syekh ibn Al Hajar pengarang kitab *AZaif al Qathi*, seorang yang ahli dalam masalah *dogmatic* dan *mystic*; Muhammad Yamani seorang guru dalam ilmu usul. Selain itu terdapat pula Syekh Muhammad Jailani ibn Hasan ibn Muhammad Hamid yang berasal dari Gujarat pengajar ilmu *Mantik*, *Ma'ani*, *bayan*, ilmu usul dan ilmu Fiqh.¹ Selain itu juga Syekh Bokhari al Jauhari, pengarang kitab *Tajussalatin* atau mahkota segala Raja-raja.

¹Lihat Nuruddin Ar-Raniri, *Bustanus Salatin*, disusun oleh T. Iskandar, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966), hal 33-4 dan Ahmad Daudy, "Syekh Nuruddin Ar Raniry", *Sinar Darussalam*, No. 88, Maret 1978, hal. 119.

Kitab ini mempunyai nilai-nilai keagamaan dan merupakan pedoman untuk raja-raja yang memerintah kerajaan pada waktu itu. Kitab ini demikian besar pengaruhnya di Kepulauan Nusantara, sehingga sampai abad XIX di kalangan kraton-kraton Jawa Tengah dan Semenanjung Tanah Melayu masih digunakan.²

Guru lainnya yang cukup dikenal dan menjadi bahan studi para ilmuwan dan sastrawan sampai sekarang ini ialah Hamzah Fansuri. Ia dilahirkan di Fansur, sebuah desa yang letaknya diperkirakan tidak seberapa jauh dari Barus dan dekat letaknya dengan Singkel sekarang. Kemudian ia mengembara, antara lain, sampai ke ibukota Bandar Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Muda Ali Riayat Syah (1604-1607) dan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Ia merupakan seorang pujangga dan guru agama yang terkenal dengan ajaran tasawuf *Wujudiyah*.³ Jasanya yang paling menonjol dalam bidang pendidikan adalah usahanya memperkaya bahasa Melayu dengan kata-kata Arab, sehingga bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang tidak kalah dengan bahasa-bahasa ilmu pengetahuan dunia lainnya pada waktu itu. Karenanya,

²T. Iskandar, "Atjeh dalam Lintasan Sejarah, Suatu Tinjauan Kebudayaan", *Prasaran* dalam PKA II, Banda Aceh, 1972, hal. 9.

³Mengenai aliran *Wujudiyah* ini, lihat misalnya, Syed Muhammad Naquib Al-Attas, "Raniri and the Wujudiyah of 17th Century Acheh", *Monographs of the Malaysia Branch Royal Asiatic Society III*, (Malaysia Printed Ltd, Singapore, 1966).

Hamzah Fansuri dapat dianggap sebagai perintis pertama dalam mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang sampai sekarang maju pesat (bahasa Indonesia dan bahasa Melayu). Di antara karya-karyanya yang berbentuk prosa ialah *Asrar al-Arifin fi Bayan 'ilmu al Suluk wal Tauhid*, *Syarb al Asyikin wa Zinatul Muwahidin* dan *Al Muntahi*. Ketiga kitab itu ditulis dalam bahasa Melayu dan pada dasarnya membahas masalah-masalah Tauhid, syari'ah, tarekat, hakekat, ma'rifat dan paham wujudiyah. Sebagai seorang pujangga, Hamzah Fansuri juga menulis syair-syair, di antaranya yang terkenal ialah *Syair si Burung Pungguk*, *Syair si Burung Pungai*, *Syair si Dang Fakir* dan *Syair Perahu*, serta *Ruba'i Hamzah Fansuri*.⁴

Guru penting lainnya yang juga menjabat Qadli Malikul Adil dalam pemerintahan Sultan Iskandar Muda ialah Syamsuddin as Sumathrani atau lebih terkenal dengan nama Syamsuddin Pasei. Seperti terlihat dari namanya itu, ia dilahirkan di Samudra Pasei, tetapi tahun kelahirannya tidak jelas diketahui; dan meninggal pada 12 Rajab 1039 H (1630 M). Ia adalah murid dari Hamzah Fansuri dan yang memperkembangkan paham *Wujudiyah* di Aceh.⁵ Kitab-kitab yang ditulis Syamsuddin Pasei adalah *Durrat al Fara'id*, *Hidayah al Habib*, *Miratul Mukmin*, *Miratul Muhakikin*, *Miratul Al Qulub*, *Syarah Ruba'i Hamzah Fansuri* (pembahasan mengenai *Ruba'i Hamzah Fansuri*) dan beberapa karya Sifat Dua Puluh dan Martabat Tujuh.⁶ Studi

⁴Ali Hasjmy, *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 16.

⁵Lihat Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *op.cit.*, hal. 11.

⁶T. Iskandar, *op.cit.*, hal. 9.

yang dilakukan para ahli terhadapnya antara lain: C.A.O. Nieuwenhuise, *Sjamsuddin van Pasai* dan Raymond le Roy Archer dalam *Muhammadan Mysticism in Sumatra* menunjukkan bahwa ia jua termasuk salah seorang ulama besar pada masanya, sehingga tidak mengherankan apabila ia berhasil menduduki jabatan penting di pusat Kerajaan Aceh.

Tokoh guru dan pujangga Islam lain yang pernah pula menetap di Kerajaan Aceh Darussalam ialah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nama lengkapnya ialah Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri al-Quraisy asy-Syafi'i, keturunan Arab, dilahirkan di Ranir dekat Surat di Gujarat (India).⁷ Setelah menjadi ulama, hijrah ke Aceh dan mendapat kedudukan penting dalam badan pemerintahan Sultan Iskandar Tsani (1636-1641) dan juga pada awal pemerintahan Sultan Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675). Boleh dikatakan ia, bersama dengan Syekh Abdurrauf Syiah Kuala, merupakan tokoh pendidikan yang paling berpengaruh di Aceh selama abad XVII dan karenanya telah mengundang sejumlah ahli untuk mengadakan studi terhadap dirinya.⁸ Ia di Aceh penentang ajaran *wujudiyah* yang diajarkan Hamzah Fansuri dan yang dikembangkan Syamsuddin Pasei, karena ajaran itu dianggap menyesatkan ajaran Islam. Dengan bantuan sultan Aceh pada masanya (Iskandar Tsani), Nuruddin Ar-

⁷Mengenai riwayat hidup ringkas Ar-Raniri, lihat A.Daudy, *op.cit.*, No. 88 dan No. 89, hal. 117-123 dan hal. 180-185.

⁸Di antaranya Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *op.cit.*; G.W.J. Drewes, "De Herkomst van Nuruddin Ar-Raniri", *BKI III*, 1955; Tujimah, *Asrar Al-Insan fi Ma'rifat ar-Ruh wa Ar-Rahman*, Jakarta, 1960.

Raniri berhasil memberantas ajaran wujudiyah dengan membakar kitab-kitab karangan Hamzah fansuri dan Syamsuddin Pasei di muka Mesjid Baiturrahman Bandar Aceh Darussalam⁹; dan juga dengan membunuh beberapa pengikut ajaran tersebut.¹⁰ Selama di Aceh Nuruddin Ar-Raniri paling produktif menulis kitab-kitab mengenai ilmu Islam, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Melayu klasik. Sehubungan dengan ini A.Daudy telah berhasil mengumpulkan tidak kurang dari 29 judul karangannya (termasuk yang ditulis di luar Aceh) yang meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan, seperti ilmu fiqh, hadist, tauhid, sejarah, tasawuf, *firaq* (sekte-sekte agama); dan sebagian besar karangannya itu ditulis untuk menyanggah ajaran *wujudiyah* Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumathrani.¹¹ Di antara tulisan-tulisannya itu adalah *Al-Shirath al-Mustaqim*, *Hidayat al-Ihlab fi Al-Tarhib wal-Tarhib*, *Nubdzah fi Da'wa al-zhill ma'a Shahibihi*, *Asrar al-Insan fi Ma'rifat al-Ruh wa al-Rahman*, *Ma'ul Hayat li Ahl al-Mamat*, *Syifa' 'ul-Qulub*, *Hujjat al-Shiddiq lidaf 'i al-Zindiq*, *Al-Lama'an fi Takfir man Qala bin Khalq al-Qur'an* dan *Bustanus Salatin*. Yang tersebut terakhir adalah merupakan karya sastra Nuruddin Ar-Raniri yang terbesar dan paling tinggi mutunya dalam kesusastraan Melayu klasik.¹² Kitab ini selain mengandung nilai-nilai keagamaan, juga mempunyai nilai-nilai

⁹A.J. Gerlach, *Atjih en den Atjinenzen*, (Armhen: 1873), hal. 42.

¹⁰*Ibid.*

¹¹A.Daudy, *op.cit.*, No. 89, hal. 180.

¹²Jumlah karya Nuruddin Ar-Raniri dapat dilihat misalnya dalam Teuku Iskandar, *Kesusastraan Klasik Melayu Sepanjang Abad*. (Jakarta: LIBRA, 1996), hal. 402-409.

sejarah, khususnya mengenai sejarah Kerajaan Aceh.

Setelah lama menetap di Aceh, pada tahun 1644 Nuruddin Ar-Raniri kembali ke kampung kelahirannya (Ranir, India) dan pada tanggal 21 September 1658 tokoh yang sebagian besar usianya diabdikan kepada ilmu pengetahuan ini meninggal dunia di sana. Untuk mengenang jasa-jasanya selama di Aceh, sekarang namanya diabadikan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniri di Darussalam, Banda Aceh.

Tokoh pendidikan lain yang namanya juga diabadikan pada sebuah universitas negeri di Darussalam, Banda Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala ialah Syekh Abdurrauf Singkel atau yang lebih dikenal dengan nama Syiah Kuala. Penamaan ini mungkin berkaitan dengan kuburnya yang terletak di Kuala Krueng (sungai) Aceh (kira-kira 4 km dari Banda Aceh) dan kemungkinan juga ia menetap di sana sambil membuka *dayah*, tempat ia mengajar. Nama lengkapnya ialah Andurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansuri al-Singkel. Kalau dilihat pada bagian akhir namanya itu, ia agaknya sekampung dengan Hamzah Fansuri, namun faham yang dianut oleh kedua tokoh ini jauh berbeda: Hamzah Fansuri, seperti telah disebutkan penganut faham wujudiyah dan Syiah Kuala penganut paham *Ahlul Sunnah wal Jama'ah*. Kemudian ia pindah ke Bandar Aceh Darussalam dan menduduki jabatan penting di sana,¹³ yaitu Qadli Malikul Adil dalam pemerintahan Ratu Safiatuddin (1641-1675) dan kemungkinan juga dalam pemerintahan ratu berikutnya (Ratu Nurul

¹³A.Hasjmy, Bunga Rampai... *op.cit.*, hal. 76-77; Mengenai riwayat hidup ringkas Syekh Abdurrauf Syiah Kuala, lihat misalnya dalam M. Junus Djamil, *Riwayat Hidup Waliyu'l Mulki Sjech Abdu'l-Rauf bin Ali (Syiah Kuala)*, diperbanyak oleh Pusat Latihan Ilmu-ilmu Sosial Aceh, 1975.

Alam Naqiatuddin yang memerintah sejak tahun 1675-1678). Ia sepaham dengan Nuruddin Ar-Raniri, namun penghargaan rakyat Aceh yang diberikan terhadap dirinya jauh melebihi tokoh yang berasal dari luar negeri itu. Hal ini nampak dari ungkapan yang sampai sekarang cukup populer dalam masyarakat Aceh, yaitu: *Adat bak Po teu Meurohom*, *Hukom bak Syiah Kuala*, yang artinya adat di Aceh bersumber dari Iskandar Muda, sedang hukum (Islam) bersumber dari Syekh Abdurrauf Syiah Kuala (tentu hukum yang diangkat dari Al Qur'an dan Hadist). Bahwa ia termasuk seorang besar yang berpengaruh jauh melampaui masanya terbukti juga dari beberapa studi yang diadakan oleh para ahli mengenai dirinya, seperti C. Snouck Hurgronje, D.A. Rinkes, R.O. Winstedt, P. Voorhoeve, Raymond le Roy Archer, dan lain-lain. Adapun karyanya yang sampai sekarang cukup dikenal oleh masyarakat, ialah *Turjumanul Mustafid*, kitab tafsir al Qur'an yang pertama dalam bahasa Melayu dan *Miratuth Thullab*, sebuah kitab Fiqh besar yang sekaligus menunjukkan kedalaman ilmunya. Selain itu, *Bayan Tajalli*, kitab yang menolak paham wujudiyah Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumathrani; *Hujjah Balighal 'ala Jum'at al Mukhasamah*; *Umdatul Muhtajin*; *Kifayat al-Muhajin* dan masih banyak lagi.¹⁴

Selanjutnya, para ulama dan pujangga berikut ini dapat juga dipandang sebagai guru-guru, mengingat hasil karyanya dan kedudukannya, baik sebagai pemimpin sebuah *dayah* ataupun sebagai pejabat teras dalam struktur pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam. Mereka ini, ialah Syekh Jalaluddin Tursany dengan karyanya *Mudharul Ajla Ila Rutbatil A'la* dan kitab

¹⁴T.Iskandar, *loc.cit.*; A.Hasjmy, Bunga Rampai ... *loc.cit.*

Safinatul Hukkam; Syekh Muhammad bin Ahmad Khatib Langien yang tulisannya antara lain, *Dawaul Qulub*; Syekh Abbas Al Asyi (Teungku Chiek Kuta Karang), seorang ulama dan pujangga yang cukup produktif pada bagian ke dua abad XIX, karangan-karangannya antara lain, *Sirajudh Dhalam fi Ma'rifatis Sa'di wan Nahas*, *Kitabur Rahmah*, sebuah kitab mengenai ketabiban dan kitab *Tadzkiratur Rakidin*, sebuah kitab yang ditulis pada tahun 1307 Hijriah yang sampai sekarang masih tersimpan pada *Universiteitsbibliotheek*, Leiden (Ms.Cod.Or.8038). Kemudian, ulama berikutnya ialah: Syekh Jamaluddin bin Syekh Jalaluddin bin Syekh Kamaluddin Tursany al-Asyi dengan karyanya, antara lain *Hidayatul Awam*; Syekh Muhammad Zain, tulisan-tulisannya antara lain Kitab Kasyful Kiram dan *Takhlisul Falah*; Syekh Abdullah dengan kitabnya *Syifaul Qulub*; Syekh Jamaluddin bin Syekh Abdullah Ali Asyi yang karangannya antara lain, *I'lamul Muttaqin*; Syekh Daud Rummy, Syekh Abdurrauf Syiah Kuala, pengarang kitab *Masailul muhtadi li Ikhwanil Muhtadi*. Kitab ini telah dicetak berkali-kali, sampai sekarang masih diperjualbelikan di toko-toko kitab dan tersebar di *gampong-gampong*; isinya adalah mengenai pelajaran agama Islam tingkat permulaan dan dikarang dengan menggunakan metode tanya-jawab, sebuah metode pengajaran yang sampai kini masih dianggap cukup baik.¹⁵ Dan sebagai penutup, rasanya perlu juga diperkenalkan seorang tokoh yang tidak kurang pentingnya, yaitu Teungku Chiek Pantee Kulu (Teungku Haji Muhammad) yang namanya diabadikan pada *Dayah* Teungku Chiek Pantee Kulu di

¹⁵ Mengenai tokoh-tokoh ulama dan pujangga yang disebutkan itu, lihat lebih lanjut, A.Hasjmy, Bunga Rampai ... *op.cit.*, hal. 78-82.

Darussalam Banda Aceh. Ia pengarang kitab *Ilkayat Prang Sabi*, sebuah karya sastra dalam bahasa Aceh yang bernilai tinggi, berisi pokok-pokok ajaran perang sabil (jihad di jalan Allah) seperti yang dituntut oleh agama Islam kepada umatnya. Karya ini telah menggctarkan jiwa rakyat Aceh untuk terjun ke medan pertempuran melawan *kaphee* Belanda, sehingga tidak mengherankan apabila kitab ini menjadi momok bagi

Belanda dan karenanya perlu diadakan razia untuk mencegah kemungkinan rakyat menyimpannya.

Demikian sekelumit paparan tentang guru dan karyanya di Aceh pada abad XVII dan XIX. Semoga tulisan ini dibaca oleh para guru sehingga dapat menjadi motivasi bagi mereka dalam mengajar dan berkarya sebagai wujud konstribusinya bagi bangsa dan negara dewasa ini.



Drs. Rusdi Sufi adalah seorang penulis yang produktif, banyak buku hasil penelitiannya yang telah diterbitkan. Demikian pula tulisan ilmiahnya tentang kesejarahan dan kebudayaan yang dimuat dalam berbagai media massa dan dipresentasikan dalam seminar-seminar, baik lokal maupun nasional. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh (1996-1998). Dalam bidang pendidikan, aktif mengajar sebagai dosen (lektor kepala) Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Sejak Bulan April 1998, ia diangkat sebagai Kepala Arsip Nasional RI Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pendidikan terakhir dilaluinya pada jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1975). Pada tahun 1977 - 1979 mengikuti *Post Graduate Programme* dalam bidang Sejarah di Universitas Leiden, Belanda.

Kolonialisme, Pendidikan, dan Munculnya Elit Modern di Aceh Abad 20

Oleh Sri Waryanti

Hindia Belanda pernah disebut sebagai "*beambtentstaat*", sebuah negara pegawai yang mana terdapat jaringan birokrasi pemerintah yang sangat luas dan rumit. Oleh karena birokrasi di sini merupakan alat instrumen yang sangat penting bagi pelaksanaan tuntutan kolonial, maka hampir boleh dikatakan bahwa sebuah kebijaksanaan diarahkan bagi kepentingan Belanda. Selama abad ke-19 dan lebih nyata lagi sejak awal kolonial yang yang sempurna, sedang sebagian besar tenaga pegawainya didukung oleh orang-orang bumiputera.¹

Tampaknya, apa yang dideskripsikan di atas sedikit banyak ada benarnya. Roda pemerintahan yang dikendalikan oleh Batavia ini senantiasa berputar seperti "mesin-mesin pabrik yang siap memaksimalkan hasilnya". Dengan demikian, pemerintah kolonial boleh berharap bahwa daerah koloni harus dapat memberikan keuntungan perbendaharaan negara.

Karenanya, demi tercapainya tertib administrasi dan perangkat-perangkatnya, maka diperlukan tenaga terdidik yang dapat dipercaya untuk menjalankan administrasi sesuai dengan fungsinya. Pendidikan, karenanya, adalah bagian yang sangat penting dari rangkaian kebijaksanaan pemerintah kolonial untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya.

Di masa kolonialisme, hubungan pendidikan dan masyarakat adalah suatu

yang sangat kompleks.² Sementara kontrol pendidikan dan campur tangan pemerintah berada di tangan orang-orang Di Eropa, aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam masyarakat biasanya sengaja dilupakan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dikembangkan menurut Model Barat, baik organisasi maupun kurikulumnya. Dengan demikian, antara pemerintah dan masyarakat seringkali terdapat perbedaan pandangan dalam cara mereka melihat kehadiran lembaga pendidikan itu. Namun di kalangan masyarakat setempat sendiri bahkan juga muncul berbagai pandangan dengan alasan sendiri-sendiri. Sementara suatu kelompok sosial tertentu melihat kehadiran sekolah-sekolah itu sebagai yang menguntungkan dan karenanya mereka dapat menerima dengan baik, yang lain sebaliknya menolak atau bersikap apatis.

Apakah pola-pola di atas dapat ditemukan dalam cara masyarakat Aceh memberikan reaksinya terhadap pendidikan kolonial? atau bagaimanakah kecenderungan yang terjadi di daerah ini ketika penduduknya diperkenalkan pada sekolah-sekolah yang dibawa oleh pemerintah kolonial? Dari kalangan mana sajakah mereka yang menerima atau menolak berasal? Selanjutnya, sejauh mana dampak pendidikan kolonial terhadap struktur sosial masyarakat setempat?

Politik Pasifikasi

Aceh memiliki sejarah yang panjang dan menjadi kebanggaan karena keberadaan mereka menjadi manusia...

¹Mestika Zed, "Kolonialisme, Pendidikan, Munculnya Elit Minangkabau Modern Sumatera Barat Abad ke-19", dalam *Pendidikan Sebagai Faktor Dinamisasi dan Integrasi Sosial* (Jakarta: Proyek IDSNDepdikbud, 1989), hal. 1-2.

² *Ibid.*

Itu dimiliki sejak sebelum kedatangan kekuatan asing (Portugis dan Belanda) juga ketika wilayah ini diduduki oleh Belanda; tetapi juga setelah kemerdekaan. Kerajaan Aceh adalah kerajaan yang kuat di Selat Malaka. Mereka mempunyai tokoh-tokoh sejarah, baik laki-laki maupun perempuan.

Perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme dimulai sejak Portugis akan menancapkan kakinya di bumi Aceh dan ketika Belanda mempunyai niat sama melalui Perang Kolonial Belanda, yang meletus tahun 1873 hingga awal abad XX. Meskipun Sultan Aceh sudah "berdamai" pada tahun 1903 dengan Belanda dan beberapa pemimpin perlawanan telah gugur, seperti Teungku Chik Di Tiro serta tertangkapnya Cut Nyak Dhien (1905), namun perlawanan-perlawanan bersenjata tetap terus berlanjut sepanjang masa Pergerakan Nasional (1908-1942). Perlawanan perlawanan itu tentunya telah menelan banyak korban di kedua belah pihak, baik di pihak Belanda maupun Aceh.

Tampaknya, walaupun perlawanan itu telah menimbulkan korban yang banyak tidak menyurutkan semangat orang Aceh untuk terus mengusir kolonialisme Belanda. Ketika perlawanan frontal mulai berkurang, orang Aceh melakukan perlawanan secara perseorangan, yang terkenal dengan istilah yang dinamakan oleh orang Belanda sebagai *Atjeh Moorden* (pembunuhan-pembunuhan Aceh).³ Pembunuhan-pembunuhan ini sasarannya orang-orang Belanda (laki-laki, wanita, dan anak-anak) yang dianggap kafir. Tempat-tempat pembunuhan itu dapat terjadi di mana saja, seperti di jalan, pasar, tangsi Belanda, dan lain-lain.

Ideologi perlawanan semacam ini tentunya tidak beda dengan bentuk perlawanan frontal lainnya, yaitu berkaitan dengan Gerakan Perang Sabil. Si pelaku pembunuhan juga mengharapkan dirinya

mati, karena menurut anggapannya, kematian melawan kafir akan merupakan mati syahid dan masuk surga. Pembunuhan yang bermotifkan anti kafir ini dinamakan juga oleh orang Belanda di Aceh sebagai *Het is een typische Atjeh Moord*, suatu pembunuhan khas Aceh. Korban-korban pun banyak yang berjatuhan. Berdasarkan laporan Belanda aksi yang dilakukan oleh orang Aceh ini antara tahun 1910-1920 telah terjadi 79 kali kasus pembunuhan dengan korban di pihak Belanda 12 orang meninggal dan 87 orang luka-luka. Sementara di pihak orang Aceh 49 orang meninggal.⁴

Melihat kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hingga sekitar tahun tiga puluhan keadaan politik terutama yang berhubungan dengan keamanan Aceh masih belum dianggap aman oleh pemerintah Belanda. Hal ini diakui oleh penguasa-penguasa Pemerintah Hindia Belanda. Untuk menghadapi kondisi keamanan yang rawan, pihak Belanda telah melakukan berbagai cara. Misalnya, pembentukan sebuah pasukan elit yang diberi nama *Het Korps Marechaussee* (Pasukan Marsose). Pasukan ini terdiri dari serdadu-serdadu yang dianggap cukup berani untuk menerobos pertahanan para pejuang Aceh ke seluruh pelosok Aceh. Pembentukan pasukan ini ternyata tidak menyelesaikan masalah. Malahan, makin banyak korban yang jatuh di kedua belah pihak. Perang pun tidak juga berakhir. Politik kekerasan yang dijalankan selama ini dianggap gagal.

Karenanya, pemerintah Hindia Belanda merubah lagi kebijaksananya dalam cara menaklukkan Aceh. Mereka melakukan suatu kebijaksanaan baru yang disebut *politik pasifikasi*, yang merupakan pengembangan ide dari C. Snouck Hurgronje. Suatu politik yang menunjukkan sikap damai yang ditunjukkan melalui berbagai usaha dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan.

³Rusdi Sufi, "Pembunuhan Khas Aceh dan Sebutan Aceh Pungo", *Serambi Indonesia* tanggal 23 Juli 1997.

⁴ Rusdi Sufi, *Gerakan Nasionalisme di Aceh (1900-1942)*, (Banda Aceh: Balai Kajian Jarahnitra Banda Aceh, 1998), hal. 6-9.

Melalui politik ini Belanda mulai memperlihatkan sikap lunak kepada masyarakat Aceh. Untuk mengamankan Aceh, mereka tidak lagi bertindak hanya dengan mengandalkan kekerasan, tetapi juga usaha-usaha lain yang dapat menarik simpati rakyat.

Wajah Pendidikan di Aceh Pada Abad 20

Sebagai tindak lanjut *politik pasifikasi* yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda, maka pada permulaan abad ke-20 Aceh menerima sistem pendidikan Barat dari pemerintah. Sebelumnya, pendidikan di Aceh lebih banyak berorientasi kepada pendidikan keagamaan. Pendidikan ini diberikan melalui sistem pendidikan *dayah* atau pesantren. Masuknya, pendidikan yang diperkenalkan oleh Belanda memberikan sebuah alternatif baru bagi masyarakat Aceh, tidak hanya mencakup pendidikan keagamaan.

Sebagai awal perkenalan sistem pendidikan ini, maka pada tahun 1900 beberapa putra *uleebalang*⁵ di antaranya beberapa orang saudara dari *uleebalang* Idi Rayen diikutsertakan untuk mengikuti pendidikan pada sebuah sekolah Belanda di Kutaraja. Selanjutnya, pada tahun 1901 tiga putra *uleebalang* lainnya dari daerah Aceh Besar dikirim pula dan sesudah bersekolah pada sebuah sekolah Belanda di Kutaraja oleh Belanda dikirim ke Fort de Kock (sekarang Bukit Tinggi) untuk memasuki sekolah guru di sana. Pada tahun 1907/1908 hingga tahun dua puluhan terdapat sejumlah putra-putra *uleebalang* yang dikirim ke luar Aceh untuk mengikuti berbagai pendidikan yang dikelola oleh pemerintah Belanda. Misalnya, *Hoofdenzoonsschool* di Asahan, OSVIA di Bandung dan Serang, *Bestuurschool* di Batavia dan MOSVIA di Madiun.

Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga memberi kesempatan kepada pemuda-pemuda Aceh lainnya yang bukan

dari golongan *uleebalang*. Hal ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan pegawai rendahan, mengurangi pengaruh dari pemimpin-pemimpin agama atau para ulama dalam mengurangi kefanatikan mereka terhadap permusuhan dengan Belanda. Untuk ini, pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah rendah atau sekolah rakyat seperti halnya sekolah desa di Pulau Jawa. Di Aceh, pada mulanya sekolah-sekolah jenis sekolah ini disebut dengan nama sekolah *mukim*.

Pada awalnya, pendirian sekolah rakyat dilakukan di *gampong-gampong* di Aceh. Namun pendirian sekolah ini bukan tanpa masalah. Selain karena kurangnya guru an sedikitnya guru yang dapat berbahasa Aceh, masalah ini juga datang karena para *teungku-teungku* atau para pemimpin agama (ulama) banyak yang tidak setuju. Selain itu, banyak para orang tua murid yang menganggap sekolah-sekolah bikinan Belanda ini bersifat kafir.⁶

Sehubungan dengan itu, pemerintah Hindia Belanda di Aceh memberi pengertian bahwa pendidikan yang mereka berikan kepada rakyat melalui sekolah rakyat tidak bertentangan dengan *hukum* atau syariat agama. Pelajaran yang diberikan pada sekolah rakyat ini pada umumnya adalah membaca (tulisan latin dan bahasa Aceh), menulis dalam huruf latin dan huruf Arab serta dikte dalam kedua huruf tersebut. Selain itu diberikan juga pelajaran tentang berhitung dan pecahan sederhana, latihan berbicara dan bercakap-cakap, serta sedikit diberikan pelajaran pengetahuan Ilmu Bumi tentang Hindia Belanda (Indonesia). Uang sekolah yang dibebankan pun tidak terlalu besar, yaitu 5 sampai 10 sen saja.⁷

⁶T. Ibrahim Alfian, "Pendidikan dalam Proses Pembangunan Bangsa Kasus di Aceh", *Makalah* disampaikan pada Hari Ulang Tahun ke-52 PGRI Propinsi Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh.

⁷ Rusdi Sufi, *op.cit.*, hal. 18.

⁵Kelompok ini dipilih karena diharapkan dapat menjadi "jembatan" antara pemerintah dengan rakyat.

Adapun sekolah rakyat atau sekolah desa pertama yang didirikan di Aceh adalah tanggal 30 Desember 1907, yang diprakarsai oleh Gubernur Militer/Sipil dan Daerah-daerah takluknya pada masa itu yaitu Van Daalen. Sekolah ini didirikan di wilayah Aceh Besar distrik Ulee Lheue yang diberi nama *sikula mukim* (sekolah *mukim*) dengan jumlah murid 38 orang. Selanjutnya, pada tanggal 4 Januari 1908 dibuka lagi sekolah serupa dengan jumlah murid 35 orang. Di bawah pemerintahan Gubernur Swart pada tanggal 10 Juni 1908 sekolah-sekolah rakyat ini semakin dikembangkan. Pada akhir tahun 1908 jumlah sekolah ini di wilayah Aceh besar sudah mencapai 21 buah dan hingga bulan Desember 1909 jumlah ini untuk daerah Aceh telah mencapai 63 buah. Pada tahun 1910 jumlah ini meningkat lagi menjadi 85 buah. Menjelang masa akhir pemerintah Hindia Belanda di Aceh (1939) jumlah sekolah-sekolah rakyat atau sekolah desa di seluruh Aceh mencapai 348 buah dengan lebih dari 600 orang pendidik dan lebih dari 36.000 orang murid.⁸

Selain sekolah rakyat, pada tahun yang hampir bersamaan dengan pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk anak perempuan atau yang disebut *Meijescholen*. Sekolah khusus anak perempuan ini pertama didirikan pada tanggal 1 Mei 1910 di distrik Ule Lheue *Mukim* Meuraksa. Pendirian sekolah ini dibantu oleh *uleebalang* setempat. Tcuku Tengoh. Pada pertengahan tahun 1914 jumlah sekolah-sekolah putri yang didirikan oleh pemerintah sudah mencapai 7 buah yang lokasinya menyebar di seluruh *afdeling* di Aceh. Perkembangan sekolah putri ini meskipun tidak sepesat perkembangan pada sekolah rakyat, tetapi setiap tahun juga menunjukkan peningkatan kuantitasnya.

Untuk menunjang pendidikan di Aceh, pemerintah Hindia Belanda juga didirikan sebuah *Normal Cursus* dengan maksud khusus untuk mendidik guru-guru

sekolah rakyat untuk daerah Aceh. Kursus ini mulai dibuka pada tanggal 7 Februari 1907 dengan murid 12 orang.

Selain sekolah-sekolah yang telah disebutkan di atas, pemerintah juga mendirikan sekolah lanjutan rakyat yang disebut *vervolgsschool* (sekolah sambungan atau lanjutan). Murid-murid dari sekolah rakyat atau sekolah desa yang berhasil menamatkan pelajarannya. Adapun masa belajar pada sekolah ini adalah selama dua tahun. Seperti namanya, sekolah sambungan ini kadang-kadang ada yang ditempatkan dalam satu bangunan dengan sekolah-sekolah rakyat. Pada umumnya gedung dan perlengkapan yang digunakannya masih sangat sederhana. Pelajaran yang diberikan oleh sekolah ini adalah sebagai lanjutan pelajaran yang diberikan di sekolah rakyat. Sekolah-sekolah ini dimasuki oleh anak-anak rakyat atau anak penduduk *gampong* yang ekonomi mereka lebih baik dan juga anak-anak dari pegawai rendahan dengan tujuan agar anak-anak mereka dapat menikmati pendidikan lebih lanjut pada sekolah rakyat.

Di samping sekolah-sekolah lanjutan atau sambungan, di Aceh juga terdapat jenis pendidikan dasar milik pemerintah lainnya, yaitu *Hollandsch Inlandsche School* (HIS). Pendidikan ini mempunyai masa belajar selama 7 tahun. Gedung dan perlengkapan yang digunakannya lebih baik daripada sekolah lanjutan/rakyat. Adapun bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Kurikulum pelajaran yang digunakan meliputi bahasa Belanda, berhitung, ilmu bumi, sejarah, biologi, melukis, dan olahraga. Pelajaran ini diberikan dalam bahasa Melayu atau bahasa Belanda. Pendidik pada umumnya terdiri dari orang-orang pribumi, tetapi semua guru kepala pada sekolah ini dipegang oleh orang-orang Eropa atau Belanda.

Karena persyaratan yang ketat, maka hanya anak-anak golongan bangsawan dan anak-anak dari mereka yang mempunyai kedudukan saja yang bersekolah di HIS ini. Sekolah ini pun didirikan terbatas hanya di

kota-kota besar saja, seperti di Kutaraja, Lhokseumawe dan Langsa.

Selain HIS yang khusus untuk anak-anak orang pribumi, pemerintah Hindia Belanda di Aceh juga mendirikan sebuah sekolah yang dinamakan *Hollandsch Chinese School* (HCS) yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak orang Cina yang didirikan di Kutaraja dan Tapaktuan. *Hollandsch Ambonsche School* yang diperuntukkan bagi anak-anak orang Ambon yang berdinasti pada militer Belanda, khususnya yang berada di Kutaraja yang didirikan di Kutaraja pada bulan Oktober 1911.⁹

Pendidikan dasar lainnya yang juga terdapat di Aceh adalah yang disebut *Eropeesche Lager School* (ELS) yang berarti sekolah rendah Eropa. Sesuai dengan namanya, sekolah ini diperuntukkan untuk anak-anak orang Eropa dan sebagian kecil saja anak-anak dari golongan bangsawan.

Berdasarkan laporan inspektur pendidikan sekolah-sekolah pribumi putra, A. Vogel, dapat diketahui pula bahwa di Aceh juga terdapat jenis pendidikan dasar lainnya yang disebut *De 2de klasse Scholen* (Sekolah Kelas Dua), dan *Inlandsche School* (Sekolah Pribumi). Kedua sekolah ini dinamakan *Inlandsche Gouvernementsscholen* (Sekolah Bumiputra Pemerintah). Untuk membantu persiapan memasuki pendidikan dasar, pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan lembaga yang disebut *voorbereiden onderwijs*. Lembaga ini mulai didirikan pada tahun 1915 di Kutaraja yang mempunyai dua sekolah yaitu *de neutrale Frobelschool* dan *de Roomschkatholieke Frobelschool*.¹⁰

Menurut laporan umum pendidikan di Hindia Belanda tahun 1928 telah didirikan pula sekolah yang disebut *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) yang sejak jaman pendudukan Jepang hingga sekarang dikenal dengan nama Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekolah ini merupakan lembaga

⁹*Ibid.*, hal. 26.

¹⁰*Ibid.*, hal. 28.

pendidikan pemerintah Hindia Belanda paling tinggi yang ada di Aceh dan didirikan pertama kali pada tahun ajaran 1920/1921 di Kutaraja dengan lama masa belajar 3 tahun. Pada tahun 1935 jumlah murid sekolah ini adalah 79 orang.¹¹

Pada mulanya maksud didirikan sekolah MULO ini adalah untuk menampung lulusan HIS dan ELS yang berkeinginan untuk melanjutkan pelajarannya juga dalam rangka untuk mendidik kader-kader *uleebalang* yang trampil. Memang pada awal didirikan sekolah ini diperuntukkan bagi putra-putra *uleebalang*, namun sejak masa Residen Jongejans (1936-1938) mulai terbuka kesempatan yang luas kepada suku bangsa (baik Eropa maupun pribumi) untuk memasuki sekolah MULO. Menurut Jongejans, Residen Aceh, pada masa itu di antara murid-murid sekolah itu juga terdapat beberapa putra Aceh dari golongan bangsawan. Menjelang akhir pemerintah Hindia Belanda di Aceh, jumlah sekolah ini tetap 1 buah, tetapi perhatian masyarakat terhadap jenis pendidikan ini semakin besar.

Akibat dari adanya pendidikan yang diusahakan pemerintah melalui politik pasifikasi ini telah lahir satu golongan yang berpendidikan menengah baru di Aceh.

Penutup

Walaupun pada awal diperkenalkannya pendidikan modern oleh pemerintah Hindia Belanda sedikit banyak mendapat tentangan dari kaum pribumi di Aceh, namun kemudian pendidikan ini lama-kelamaan diterima oleh masyarakat. Pihak elite agamapun akhirnya juga turut menyesuaikan diri dengan perkembangan dan mengambil bagian dalam sekolah-sekolah modern walaupun tidak semua kesempatan terbuka bagi mereka.

Lulusan sekolah-sekolah binaan Belanda mulai mendapat pekerjaan sebagai pegawai negeri di kantor-kantor pemerintah dalam negeri, di kantor-kantor kenegerian

⁸ *Ibid.*, hal. 21.

¹¹ *Ibid.*, hal. 29.

(*landschap*), dan lain-lain. Lulusan sekolah negeri yang berbahasa Belanda, yang sebagian besar terdiri dari elite adat, mendapat posisi yang lebih baik daripada lulusan sekolah Melayu. Jabatan-jabatan di perguruan, kepolisian, di perusahaan kereta

api negara dan lain-lain sudah terbuka untuk orang-orang Aceh. Akibatnya, timbullah diferensiasi sosial, mobilitas sosial dan stratifikasi sosial baru dalam masyarakat Aceh.

Dari pemuda-pemuda yang telah mendapat pendidikan modern inilah muncul elite modern yang baru. Mereka mempunyai pandangan dan nilai-nilai baru yang menyangkut tentang sekolah, pikiran untuk merubah adat yang telah usang dan keinginan menghimpun diri dalam organisasi sosial atau politik untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹²

¹²T. Ibrahim Alfian, *op.cit.*, hal. 12.



Dra. Sri Waryanti lahir pada tanggal 23 Oktober 1968 di Bantul, Yogyakarta. Setelah menamatkan pendidikan SMTA di Yogyakarta tahun 1987, kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Sastra Program Studi Sejarah Universitas Gajah Mada dan lulus pada tahun 1992. Selama kuliah aktif berorganisasi di senat mahasiswa. Setelah lulus sarjana, kemudian bekerja di PANIN Bank Jakarta. Pernah pula menjadi sekretaris pada DPD HIPMI DI Yogyakarta. Pada tahun 1993 sampai 1997 sebagai pengelola LPK Studi Bina Artha Yogyakarta. Sejak 1997 bekerja sebagai tenaga teknis Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. Selain penelitian, ia juga aktif menulis artikel di surat kabar.

Sejak tahun 1916 mulai bermunculan organisasi modern yang menampung aspirasi politik dan sosial pemuda-pemuda yang telah mendapat pendidikan modern tersebut. Organisasi-organisasi tersebut di antaranya Serikat Islam (Juli 1916), Serikat Aceh Muda (Juli 1916) Serikat Aceh (1916), dan lain-lain.

Dengan demikian, pendidikan yang diprogramkan oleh pemerintah Hindia Belanda ini telah memunculkan elite modern yang baru yang tidak diperkirakan oleh Belanda sendiri. Dapat dikatakan pendidikan yang diberikan tidak memberikan keuntungan dalam arti yang sesungguhnya bagi penguatan kekuasaan Belanda di Aceh seperti yang mereka harapkan.

Keberadaan Pendidikan Di Aceh Pada Zaman Kolonial Belanda

Oleh Seno

Pendahuluan

Masalah pendidikan di Aceh pada zaman Belanda menarik untuk diperbincangkan karena pada zaman Belanda di Aceh ada tiga lembaga pendidikan, yang mana satu dengan yang lainnya mempunyai kepentingan yang berbeda. Lembaga pendidikan tersebut di antaranya: pertama, lembaga pendidikan Islam tradisional, yaitu lembaga pendidikan yang dipusatkan di *meunasah*, *ranggang* dan *dayah*.¹

Kedua, lembaga pendidikan Barat. Dengan adanya intervensi militer Belanda pada tahun 1873, maka setelah melalui perjuangan yang berat, Aceh berhasil dikuasai Belanda pada tahun 1907 dan resmi menguasai pemerintahan. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Belanda dan serdadu Belanda keturunan bumi putra dan para pendatang lain, maka pemerintah Belanda kemudian mendirikan sekolah Belanda.²

Dalam rangka melaksanakan politik etis dan mengambil simpati rakyat, Belanda membangun sekolah untuk anak-anak Aceh dari kalangan rakyat, yang tenaganya diperlukan sebagai *amdtentar* rendahan yang ketaatannya sangat diperlukan. Untuk merangkul golongan *uleebalang*, Belanda membangun sekolah untuk anak-anak bangsawan dan memberikan beasiswa kepada mereka yang tergolong cerdas.

¹ A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*. (Jakarta: Beuna, 1983), hal. 192.

² Rusdi Sufi (et al.), *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1996), hal. 28.

Ketiga, lembaga pendidikan Islam yang dipadu dengan lembaga pendidikan Barat. Dengan adanya pengaruh organisasi politik Islam yang ditebar dari Jawa, dan para sarjana alumni Timur Tengah, maka tidak mengherankan, jika di Aceh juga muncul lembaga pendidikan Islam modern yang berfungsi sebagai jembatan antara pendidikan Barat dengan pendidikan agama tradisional.³

Pendidikan Islam Tradisional

Sudah sejak zaman Kerajaan Islam dahulu, lembaga pendidikan Islam berkembang di Aceh dan masih tetap eksis sampai zaman Kolonial Belanda. Lembaga pendidikan Islam tersebut yaitu pendidikan yang berlangsung di *meunasah*, *ranggang* dan *dayah*.

Hampir di setiap *gampong*⁴ dapat dijumpai *meunasah*, dan ini berarti anak-anak sejak awal telah memasuki pendidikan di *meunasah*. Setelah dirasa cukup, kemudian melanjutkan pendidikannya di *ranggang* yang terdapat hampir di setiap *mukim*⁵. Anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, dapat meneruskan ke

³*Ibid.*, hal. 30.

⁴*Gampong* adalah sebutan kampung di Aceh yang dikepalai seorang *Keuchik*, merupakan kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak di bawah Kecamatan. Lihat Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1990), hal. 383.

⁵*Mukim* adalah kumpulan dari beberapa *gampong* yang dipimpin Kepala *Mukim*. Biasanya terdapat mesjid yang di dekatnya dibangun *ranggang* tempat mengaji dan belajar *murid*.

pendidikan *dayah* yang terdapat di setiap *sagoe*.⁶

Salah satu ciri yang sangat menonjol dari lembaga pendidikan keagamaan tradisional di Aceh ialah para *murib* (murid) yang mempunyai ikatan emosional yang sangat kuat dengan guru-guru mereka. Guru (*teungku chik*) dianggap sebagai *maksum* yaitu orang yang tidak pernah berbuat salah atau dosa. Kesetiaan kepada guru ini dibentuk semenjak awal *murib* mengikuti pendidikan keagamaan.

Dalam lembaga pendidikan ini, *murib-murib* ditempa dengan kitab-kitab yang dipergunakan sebagai bacaan wajib dalam setiap jenjang pendidikan.

Pengaruh pendidikan Islam tradisional ini begitu kuatnya, sehingga tidak mengherankan jika masyarakat Aceh dalam bertindak, berperilaku dan berfikir selalu diselaraskan dengan kaidah-kaidah Islam. Namun demikian dalam praktek-praktek keagamaan, mereka menyesuaikan dengan tradisi dan adat yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa antara Islam dan adat telah menyatu. Hal ini tercermin dalam ungkapan Aceh yang berbunyi *Adat ngon hukom hanjeut cree lagee zat ngon sifeut*,⁸ yang artinya adat dan hukum syariat Islam tidak dapat dipisahkan seperti unsur dengan sifatnya.

Dalam lembaga pendidikan *dayah* tradisional, bidang studi yang paling menonjol adalah *fiqh* (hukum Islam) karena ilmu ini merupakan ilmu yang banyak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari

di masyarakat. Di sini yang dibahas adalah masalah ibadah *mahdhah* seperti *thaharah* (bersuci), shalat, puasa dan haji.

Pelajaran berikutnya adalah tentang mu'amalah (aturan tentang tatanan sosial), *munakahat*⁹ (aturan tentang kehidupan rumah tangga, kawin, cerai dan rujuk), pewarisan, *jinayah* (aturan pidana) dan jihat (aturan tentang perang di jalan Allah).

Fiqh yang dipelajari di *dayah* adalah *fiqh* yang berkilat pada mazhab Syafi'i. Kitab yang dirujuk adalah kitab-kitab klasik buah pena ulama dari abad pertengahan.

Tidak mengherankan, jika para ulama tradisional yang merupakan jebolan *dayah* tradisional, lebih menguasai ilmu *fiqh* dari pada ilmu-ilmu lain. Para ulama tradisional (*teungku chik*), sesuai dengan latar belakang pendidikannya, cenderung bersikap menolak terhadap upaya pembaharuan, karena hal ini dianggap bertentangan dengan apa yang telah dipelajarinya.¹⁰ Mereka tetap mempertahankan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari, seperti *peusijek, seunujoh, kanduri blang*, dan lain-lain.

Dalam struktur kepemimpinan di lingkungan *dayah* tradisional, para ulama *dayah* (*teungku chik*) berada di posisi paling sentral. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan para ulama tradisional bersumber pada kharisma. Karena itu, dengan merujuk pada tipologi Weber, ulama tradisional dapat dikategorikan sebagai pemimpin kharismatik¹¹.

⁹ Iskandar, *Profil Ulama Tradisional*, (Banda Aceh: Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala, 1997), hal. 7. Lihat juga Zulkarnaini Abdullah, *Alumni Pesantren: Antara Pengukuhan Nilai dan Tantangan Modernitas*, (Banda Aceh: PPIBS Unsyiah, 1997), hal. 9.

¹⁰ Iskandar, *op.cit.*, hal. 8.

¹¹ Zulkarnaini, *op.cit.*, hal. 15.

Pengaruh ulama-ulama *dayah*, *rangkang* dan *meunasah* sangat kuat dan mengakar di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan selama perang kolonial Belanda yang berlangsung hampir 40 tahun. Rakyat begitu patuh pada anjuran para ulama untuk melakukan perang sabil,¹² walaupun harus syahid di medan perang.

Ketika Belanda membangun sekolah-sekolah model Barat dan menganjurkan rakyat untuk masuk ke *Sikula Mukim*, banyak di antara para ulama tradisional (*teungku chik*) yang menentangnya. Mereka menganggap sekolah-sekolah Belanda sebagai tempat untuk mengkafirkan rakyat.

Di kalangan masyarakat banyak yang mengikuti anjuran ulama (*teungku chik*) untuk tidak menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Belanda. Sebaliknya mereka lebih suka memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah tradisional di *meunasah-meunasah*, *dayah-dayah* dan *rangkang-rangkang*.

Pendidikan Barat

Sekurang-kurangnya ada dua faktor utama, mengapa Belanda menerapkan sistem pendidikan Barat di Aceh? Pertama, sejalan dengan diterapkannya politik etis pada awal abad XX, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan tenaga administrasi dan birokrasi yang terampil dari kalangan pribumi.

Hal ini dimungkinkan karena di samping untuk mendapatkan tenaga *amdtendar* yang murah, Belanda juga ingin mengambil simpati rakyat agar tidak memusuhi Belanda. Di sisi lain, tenaga *amdtendar* dari kalangan pribumi juga diharapkan menjadi aparat-aparat yang efektif dalam melancarkan sistem ekonomi dan keuangan pemerintah kolonial Belanda.

¹² H.C. Zentgraaff, *Aceh*, terj. Firdaus Burhan, (Jakarta: Depdikbud Dirjenbud PIDSN, 1982), hal. 379. Lihat juga Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonial Jilid II*, terj. Ng. Singarimbun (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hal. 379.

Kedua, di kalangan Belanda sendiri muncul satu kelompok baru yang dipelopori oleh C. Snouck Hurgronje, seorang orientalis Belanda yang terkenal dengan konsepsinya tentang politik pasifikasi.¹³ Kelompok ini beranggapan, bahwa perlawanan bersenjata yang terjadi di Aceh dalam menentang Pemerintah kolonial Belanda karena digerakkan oleh adanya fanatisme agama Islam yang dianutnya.¹⁴

Menurut Snouck Hurgronje, perlawanan-perlawanan ini hanya mungkin dapat diatasi jika golongan *uleebalang* dapat ditarik dalam lingkungan kebudayaan dan pendidikan Barat. Oleh karena itulah, maka para orientalis yang dipimpin Snouck Hurgronje ini menyarankan kepada Pemerintah Belanda agar dapat menciptakan satu golongan elite baru yang dibina dan dididik menurut sistem nilai Barat¹⁵.

Jika golongan *uleebalang* ini berhasil dididik menurut sistem Barat, maka besar kemungkinan mereka tidak lagi mengikuti seruan para ulama (*teungku chik*) dan tokoh-tokoh agama lainnya yang di masyarakat Aceh pengaruhnya sangat besar.

Untuk mewujudkan sistem pendidikan Barat ini, Pemerintah mulai membangun sekolah-sekolah Belanda. Pada tahun 1901 ada tiga orang putra *Uleebalang* Idi Rayeuk mendapat beasiswa dari Pemerintah Belanda di Kutaraja. Beberapa tahun kemudian banyak putra-putra *Uleebalang* lainnya yang kemudian masuk

¹³ Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*, terj. Tim PSH (Jakarta: Oxford University Press, 1987), hal. 52.

¹⁴ Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid Kedua*, (Medan: Harian Waspada, 1985), hal. 314. Lihat juga Paul Van't Veer, *Perang Belanda di Aceh*, terj. Aboe Bakar (Banda Aceh: 1969), hal. 225.

¹⁵ Rusdi Sufi, *Gerakan Nasionalisme di Aceh (1900-1942)*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1998), hal. 14.

⁶ *Sagoe* adalah kumpulan dari beberapa *mukim* dan dipimpin seorang Panglima *Sagoe*. Misalnya *Sagoe XXII Mukim, Sagoe XXV Mukim, Sagoe XXVI Mukim* dan sebagainya.

⁷ Rusdi Sufi, *Karakteristik Islam di Aceh pada Abad XX*, (Banda Aceh: Balai Kajian Jaramitra Banda Aceh, 1996), hal. 18.

⁸ Rusdi Sufi (et al.), *Peranan Tokoh Agama Dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950 di Aceh*, (Jakarta: PIDSN Dirjenbud Depdikbud, 1997), hal. 22.

sekolah Belanda. Setelah mereka lulus dari sekolah Belanda di Kutaraja, kemudian ada yang di sekolahkan lagi ke sekolah Belanda yang lebih tinggi di luar Aceh. Ada yang dikirim ke Fort de Kock (sekarang Bukit Tinggi), ada pula yang dikirim ke *Hoofdenzoonsschool* di Asahan, MOSVIA di Madiun, OSVIA di Bandung dan Serang, *Bestuurschool* di Batavia (sekarang Jakarta).¹⁶

Untuk memperkecil pengaruh gerakan para Ulama pemimpin Islam tradisional (*Teungku Chik*), pemerintah Gubernemen juga membangun sekolah-sekolah Belanda yang khusus untuk rakyat atau sekolah desa.

Untuk merealisirnya, Belanda pada tahun 1907 membangun *Sikula mukim* di Ulee Lheue dengan jumlah murid sekitar 38 siswa. Satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1908 di Desa Lam Lagang dibangun sekolah scrupa dengan jumlah siswa 35 anak.

Pada akhir tahun 1910 di Aceh sudah terdapat 85 buah *Sikula Mukim* yang terbagi dalam beberapa *afdeeling*. *Afdeeling Groot Atjeh* (Aceh Besar) 53 buah, *Afdeeling Noordkust Van Atjeh* (Aceh Utara) 11 buah, *Afdeeling Oostkust Van Atjeh* (Aceh Timur) 9 buah, *Afdeeling Westkust Van Atjeh* (Aceh Barat) 8 buah dan *Afdeeling Alaslanden* (Negeri Alas) 4 buah.¹⁷

Pada masa pemerintahan Gubernur Swart, sekolah-sekolah Belanda tersebut terus dikembangkan. Pada tahun 1912, sekolah yang dibangun berjumlah 125 buah dengan siswa sebanyak 6000 anak. Setelah 6 tahun kemudian bertambah menjadi 250 buah sekolah dengan jumlah siswa 14751 orang anak. Untuk pengadaan tenaga *amdenar* Guru, pemerintah mendatangkan guru dari

¹⁶ Mawarti Djoenet Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia I*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hal. 127.

¹⁷ Rusdi Sufi (1998), *op.cit.*, hal. 17.

Minangkabau, Mandailing, Jawa dan daerah-daerah lain.¹⁸

Di samping sekolah rakyat, Pemerintah Gubernemen juga membangun sekolah khusus anak-anak perempuan yang bernama *Meisjesschool* (*Meisjescholen*). Dalam pengadaan *Meisjescholen* ini, beberapa istri pejabat tinggi Belanda ikut aktif dalam membidani kelahirannya. Mereka di antaranya yaitu Nyonya Swart (Istri Gubernur Swart), Nyonya Dornik (Istri Residen Dornik) dan Nyonya Nijs (Istri Asisten Residen Nijs).¹⁹

Adapun tujuan didirikan *Meisjesschool* ini juga tidak terlepas dari kepentingan politik kolonial Belanda di Aceh. Salah satu di antaranya yaitu untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta mengurangi kefanatikan wanita-wanita Aceh yang terkenal heroik dalam perjuangannya melawan Belanda.

Dalam usaha pengembangan sekolah-sekolah rakyat dan sekolah putri, Belanda memanfaatkan golongan *Uleebalang* yang tampak pro Belanda untuk merangkul rakyat agar dapat dididik di sekolah-sekolah model Barat. Melalui usaha ini, Belanda berharap dapat mengisolir golongan ulama dan pengikutnya yang fanatik agar tidak dapat mempengaruhi rakyat untuk melawan pemerintah Belanda.

Selain sekolah untuk anak-anak Aceh, Belanda juga membangun sekolah Cina yang bernama *Hollandsch Chineshe School* (HCS). Sekolah untuk anak-anak serdadu Belanda asal Ambon dibangun dengan nama *Hollandsch Ambonsche School* (HAS). Sekolah Melayu bernama *Inlandsche School*; Sekolah Bumiputra Pemerintah (*Inlandsche Gouvernementsscholen*); Sekolah Peng-hubung (*Schakel School*); Sekolah Kelas Dua (*De 2de klasse Scholen*); Sekolah Pertukangan (*Ambachtschool*).

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hal. 22.

²⁰ *Ibid.*, hal. 26-27.

Sekolah Pertanian (*Landbouwschool*) dan kursus guru sekolah rakyat (*Normaal Cursus*).²¹

Sekolah yang diperuntukkan anak-anak Eropa terdapat di Kutaraja bernama *Europeesche Lager School* (ELS) yang berarti sekolah rendah Eropa. *Vervolg School Met Nederlansche* (Sekolah sambungan yang menggunakan bahasa Belanda) dan *Voorbereiden Onderwijs* (Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak).²² Untuk memenuhi kebutuhan sekolah lanjutan pertama, Pemerintah Belanda membangun Sekolah MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*),²³ yang merupakan lembaga pendidikan Belanda tertinggi di Aceh.

Pendidikan Islam Modern

Dengan diberlakukannya lembaga pendidikan modern di Aceh, maka muncul pula kelompok terpelajar Aceh yang militan. Mereka ini beranggapan, bahwa masyarakat Aceh akan maju dan bermartabat, apabila lembaga pendidikan Islam yang selama ini cenderung tradisional, dirombak menjadi lembaga pendidikan Islam yang modern.

Putra-putra Aceh yang pernah belajar di Timur Tengah menjadi kelompok pembaharu dan aktif memodernisir lembaga pendidikan Islam di Aceh. Mereka di antaranya yaitu Tgk. M. Nur Ibrahimy, tamatan Universitas Al-Azhar Cairo; Tgk. Syekh Abdul Hamid, seorang tokoh organisasi Serikat Islam cabang Aceh yang pernah belajar di Mekkah. Beliau pernah mengirim berita rahasia via celah-celah harian berbahasa Arab Ummul Qura kepada rekan-rekannya di Aceh yang isinya menganjurkan agar lembaga pendidikan Islam di Aceh dimodernisir. Jika lembaga pendidikan Islam ini berhasil diperbaharui, maka Aceh akan segera dapat membebaskan diri dari penjajahan dan kebodohan.

²¹ *Ibid.*, hal. 32.

²² *Ibid.*, hal. 28.

²³ Anthony Reid, *op.cit.* hal. 52.

Dengan masuknya berbagai pengaruh ini, maka mulai nampak adanya inisiatif dan usaha baru kaum ulama Aceh untuk membina kembali sistem pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan mereka. Lembaga pendidikan *meunasah*, *rangrang* dan *dayah* tradisional dirubah menjadi sistem Madrasah yang modern. Di sini mulai diperkenalkan sistem pendidikan barat, tetapi juga tidak meninggalkan pendidikan agama. Antara pendidikan Barat dan pendidikan agama menjadi berimbang, sehingga dapat dibentuk generasi penerus berpendidikan modern yang islami.²⁴

Untuk merealisasikan usaha tersebut, pada tahun 1916 dibangun madrasah Al Khairiyah di Kutaraja. Setelah 5 tahun kemudian, muncul berbagai madrasah di seluruh Aceh. Beberapa madrasah yang menonjol, di antaranya: Madrasah Perguruan Islam (tahun 1926); Madrasah Nahdatul Islam (MADNI) (tahun 1927); Madrasah Ahlu'sunah Wal jamaah (tahun 1928) oleh Said Hussein; Madrasah Saadah Adabiyah dan Jamiatul Diniah (tahun 1929) dipimpin oleh Tgk. M. Daud Beureueh.²⁵ Madrasah Al-Muslim dan Al-Islam Peusangan didirikan oleh Teungku Abdul Rahman pada tahun 1930; Jamiatudiniah Al Mutaslah (1931) dipimpin Teungku Syeich Ibrahim.²⁶

Di samping itu, di Kutaraja juga muncul lembaga pendidikan Islam modern lain yang berbeda dengan lembaga pendidikan madrasah. Sekolah-sekolah tersebut di antaranya yaitu Sekolah HIS Muhammadiyah dan lembaga Pendidikan

²⁴ Rusdi Sufi (1998), *op.cit.*, hal. 35. Lihat juga Ibrahim Husein, "Sejarah Singkat Pendidikan Di Aceh", dalam *Perkembangan Pendidikan Di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1994), hal. 50-52.

²⁵ Anthony Reid, *op.cit.*, hal. 56-57.

²⁶ *Ibid.*, hal. 55.

Taman Siswa yang dipimpin oleh Sutikno Padmo Sumarto.²⁷

Sekolah-sekolah Islam modern non madrasah tersebut muncul sebagai akibat adanya pengaruh organisasi Islam modern yang datang dari Jawa, yang pada waktu itu juga sudah sangat militan.

Penutup

Ketika Aceh dikuasai Belanda, lembaga pendidikan Islam tradisional di *meunasah-meunasah*, *ranggang-ranggang* dan *dayah-dayah* masih sangat fanatik anti Barat yang dianggapnya kafir. Para ulama (*teungku chik*) dan *murib-muribnya* berperan sebagai motor penggerak berkobarnya semangat anti Belanda.

Untuk mengatasi fanatisme agama yang anti Belanda ini, maka Pemerintah Kolonial membangun sistem pendidikan yang dianjurkan oleh kelompok orientalis Belanda yang dipimpin oleh C. Snouck Hurgronje. Sejalan dengan politik *pasifikasi*, maka Pemerintah Kolonial Belanda membangun pendidikan model Barat, dengan harapan dapat menekan pengaruh ulama-ulama tradisional yang berbasis pada lembaga pendidikan di *meunasah-meunasah*, *ranggang-ranggang* dan *dayah-dayah*.

Langkah awal Belanda membangun sekolah-sekolah Belanda yang dikhususkan

untuk anak-anak golongan *Uleebalang* yang dikenal dapat dirangkul Belanda. Kemudian Belanda juga membangun sekolah untuk rakyat, dengan harapan dapat merenggalkan jarak antara ulama tradisional dengan rakyatnya, sehingga tidak membenci Belanda lagi.

Keberadaan lembaga pendidikan barat mendorong para pemuda Aceh untuk berjuang dengan caranya sendiri. Mereka beranggapan bahwa Aceh akan makmur dan bermartabat, jika rakyat Aceh dapat terlepas dari belenggu penjajahan. Hal ini hanya dapat tercapai, jika rakyat dapat mengenyam sistem pendidikan yang modern dan islami yang berpegang pada adat-istiadat dan budaya Aceh. Untuk itu maka para pemuda memelopori berdirinya sekolah-sekolah yang islami dan modern, seperti pendidikan Madrasah, pendidikan Muhammadiyah dan pendidikan Taman Siswa.

Perjuangan para sarjana alumni Universitas-Universitas terkemuka di Timur Tengah ini tidak sia-sia. Terbukti mereka berhasil menyatukan visi dan misi perjuangan menentang Kolonialisme Belanda di Aceh. Tidak mengherankan ketika Aceh diserang bala tentara Jepang pada bulan Maret tahun 1942, Belanda dalam waktu singkat dapat dikalahkan karena rakyat Aceh tidak membantunya.

²⁷ Rusdi Sufi (*et al.*), *op.cit.*, hal. 35.



Drs. Seno lahir pada tanggal 26 November 1957 di Boyolali. Setelah tamat SMA Negeri Boyolali, melanjutkan pendidikan di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Jurusan Sejarah, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan lulus sarjana muda tahun 1981. Kemudian melanjutkan S-1 dan lulus tahun 1985. Setelah lulus sarjana sejarah dari Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada tersebut, kemudian mengabdikan diri sebagai guru sejarah Indonesia di SMA Muhammadiyah 2 Klaten di Delanggu. Di samping itu juga mengajar PSPB dan pengantar ilmu pertanian di SPP-SNAKMA

Boyolali. Pada tahun 1990 pindah ke Jakarta dan mengajar sejarah di SMA YMIK 1 Manggarai Jakarta. Sejak tahun 1996 bekerja sebagai tenaga teknis Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. Selain penelitian, ia juga aktif menulis artikel di surat kabar.

Lembaga Pendidikan Dayah Pada Masyarakat Aceh

Oleh Sudirman



Kecenderungan masyarakat untuk melihat kembali keberadaan pendidikan *dayah*, akhir-akhir ini semakin terasa. Mereka itu, baik dari kalangan ekonomi menengah maupun ekonomi atas, yang kembali ingin menitipkan putra-putrinya pada dunia pendidikan di *dayah*. Mereka merasakan bahwa pendidikan di *dayah* mampu memberikan suatu pendidikan yang mempunyai nilai lebih, yang tidak dapat diperoleh di lembaga pendidikan formal pada umumnya.

Daerah Istimewa Aceh, yang dikenal kuat agamanya memberikan landasan bagi pendidikan tradisional, bukan saja pada proses dan metode yang dieunakan, tetapi juga pada arah dan motivasi bagi masyarakat, untuk warga masyarakat suku Aceh yang umumnya beragama Islam, pendidikan agama adalah kunci utama kemajuan manusia baik dunia maupun akhirat.

Perkembangan pendidikan di Aceh merupakan refleksi dari perjalanan sejarah Aceh yang penuh dengan gejolak dan perubahan-perubahan yang drastis. Struktur kehidupan sosial politik masyarakat Aceh mengalami gejolak yang luar biasa sejalan dengan gejolak sejarah Aceh. Sejak meletusnya perang melawan Belanda meliputi serangkaian peperangan yang sangat lama, yang telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat termasuk pendidikan.

Untuk membangun kembali lembaga pendidikan tersebut, maka dimulai dengan pendidikan asli, yaitu pendidikan yang dilaksanakan melalui lembaga *meunasah* dan *dayah*. Dalam konsep ini termasuk juga lembaga yang disebut *balee* dan *ranggang*. Peranan *meunasah* dan *dayah* sebagai lembaga utama pendidikan dalam masyarakat Aceh bukan saja dapat dibaca dalam literatur-

literatur tentang Aceh, tetapi juga pada masih adanya lembaga-lembaga tersebut di masyarakat sampai sekarang ini. Usaha-usaha pendidikan di Aceh melalui *dayah* memang sudah sangat melembaga dan membudaya, sehingga meskipun dewasa ini di Aceh memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang baru, namun masyarakat Aceh tidak serta merta melepaskan keberadaan lembaga ini. Pendidikan yang dilaksanakan melalui *dayah* merupakan pendidikan "dasar" bagi masyarakat Aceh. Setiap daerah di Aceh memiliki *dayah* di samping peranannya sebagai lembaga pendidikan juga mempunyai peranan kemasyarakatan.

Ditinjau dari segi istilah *dayah* berasal dari *zawiyah* dalam bahasa Arab yang berarti sudut, lama-kelamaan lidah orang Aceh menyebutnya dengan *deyah*. Ini disebabkan dalam tradisi Islam pendidikan dan pengajaran pada mulanya dilaksanakan di sudut-sudut mesjid.¹ Pendidikan sistem *dayah* memiliki beberapa ciri penting. Ciri *dayah* yang sangat menonjol adalah pemondokan untuk *murib* dalam satu kompleks bersama-sama *teungku*. Karena pemondokan ini, *dayah* disebut juga dengan pondok atau pondok pesantren, yang berarti tempat tinggal. Kebiasaan *dayah* memberi pemondokan kepada *murib* (murid) masih terus berlanjut sampai sekarang, meskipun ada lembaga-lembaga yang menamakan *dayah* yang tidak memiliki pemondokan yang memenuhi syarat. Ciri lain dari pendidikan *dayah* adalah pengajaran sangat

¹ George Makdisi, *The Rise of Colleges, Institutions of Learning in Islam and the West*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), hal. 10-32.

terpusat pada ilmu-ilmu agama dalam pengertian *dayah* tradisional.

Kehadiran tradisi pendidikan Barat di Aceh yang dibawa oleh Belanda menimbulkan berbagai reaksi dalam masyarakat. Ada golongan yang sangat menentang sistem pendidikan tersebut sampai mengatakan bahwa mengikuti pendidikan di sekolah yang didirikan Belanda lama-kelamaan akan menjadi *kaphe* (kafir).² Meskipun akhirnya dapat menerima sistem pendidikan Barat itu, masyarakat Aceh pada umumnya, terutama dari kalangan ulama tetap tidak puas karena tidak memasukkan pendidikan agama Islam. Untuk mengatasi hal itu, maka lahir lah model ke tiga dalam perkembangan pendidikan di Aceh, yaitu model menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan umum dalam suatu lembaga baru yang disebut dengan madrasah.

Pendidikan Dayah dalam Perspektif Historis

Jika mempelajari "sejarah pendidikan Islam" dalam konteks ke-Aceh-an, maka akan diperoleh sejumlah catatan tentang *dayah*. Ditinjau dari perspektif historis, cikal bakal sistem pendidikan Islam di Aceh dimulai dari *dayah*. Hal itu didukung oleh fakta sejarah yang ada sampai sekarang. Seperti yang diketahui, bahwa pertumbuhan atau terbentuknya sistem pendidikan secara formal, terlebih dahulu dimulai dengan perintisan sistem pendidikan non formal, yang berupa pendidikan *meunasah*, *balee* atau *rangkang*, dan *dayah*.

Tradisi pendidikan *dayah* adalah tradisi sepenuhnya dilaksanakan dan dibiayai oleh masyarakat. Partisipasi pemerintah dalam pengembangan lembaga pendidikan tersebut sangat terbatas. Bahkan yang lebih menonjol lembaga itu pada umumnya dimiliki oleh perorangan, sehingga sangat peka terhadap berbagai perubahan

dalam masyarakat. Kesenambungan pendidikan modal *dayah* semata-mata karena akar budayanya yang sudah begitu mendalam dalam kehidupan masyarakat.³

Menurut Ali Hasjmy lembaga pendidikan *dayah* itu sudah ada pada masa kerajaan Islam Perlak (Aceh Timur) tahun 840 M. Pada waktu itu lembaga pendidikan di tiap-tiap kampung dengan nama madrasah (tempat belajar), lama kelamaan lidah orang Aceh menyebutnya *meunasah*. Di tiap-tiap *mukim* didirikan lembaga pendidikan lanjutan yang bernama *zawiyah* (*dayah*) setingkat SLTP. Dalam *dayah* sudah mulai diajarkan ilmu pengetahuan umum dan bahasa Arab. Pada tempat-tempat tertentu didirikan sebuah lembaga pendidikan lanjutan atas, yang bernama *Dayah Teungku Chiek*, *Balai Setia* bahkan *Jamiah*. Pendidikan di *Dayah Teungku Chiek* semua pelajaran diajarkan dalam bahasa Arab. Demikianlah selanjutnya di Aceh didirikan lembaga-lembaga pendidikan dengan nama seperti di atas.⁴

Pendidikan *dayah* yang tertua di Aceh adalah *Dayah Cotkala* yang didirikan oleh Teungku Chiek Muhammad Amin yang terkenal dengan *Teungku Cotkala* yang kemudian menjadi raja Peurelak (922-964),⁵ kemudian *Dayah Rumpet* yang didirikan oleh Teungku Muhammad Yusuf dengan sebutan Teungku Chiek Dirumpet pada tahun 1607. Pada masa Kerajaan Islam Lingga (Aceh Tengah) pusat pendidikan yang terkenal adalah *Dayah Seuruleu*. Sesudah Kerajaan Indra Purba (Aceh Besar) menjadi kerajaan Islam dengan nama Kerajaan Darussalam, didirikan pula pusat pendidikan Islam dengan nama *Dayah Lam keuneueun* yang dipimpin oleh Syekh Abdullah Kan'an yang kemudian

³Safwan Idris, "Pendidikan di Aceh", dalam *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: MPD, 1995), hal. 10.

⁴ Ali Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam lintasan sejarah*, (Jakarta: Beuna, 1983), hal. 191-194.

⁵ *Ibid.*, hal. 225.

terkenal dengan Teungku Chiek Lam keuneueun.⁶ Pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607-1636 datang dari Baghdad tujuh orang bersaudara, yang tertua adalah Firus Al-Baghdadi yang membangun pusat pendidikan Islam di sebuah desa yang bernama Kampung Tanoh Abec. Kemudian pusat pendidikan tersebut terkenal dengan nama *Dayah Tanoh Abec*. Salah satu *dayah* pembina dalam Kerajaan Aceh Darussalam.

Dalam Kutubkhanah *Dayah Tanoh Abec* masih dapat disaksikan lebih seribu buah naskah kitab tulisan tangan, baik dalam bahasa Melayu, maupun dalam bahasa Arab; yang ditulis baik oleh ulama Aceh-Melayu maupun karangan ulama Arab, Turki, Parsi dan sebagainya. Di samping itu, masih dapat ditemui *sarakata-sarakatu* penting, baik berupa surat keputusan, surat perjanjian maupun surat-surat Teungku Chiek Tanoh Abec. Pada *Dayah Tanoh Abec* diajarkan berbagai ilmu pengetahuan, fiqh, tata negara, hukum internasional, sejarah Islam, akhlak, ilmu hisab, ilmu falak, logika, filsafat dan tafsir. Pada masa pimpinan Syekh Muhamad Said Al-Baghdadi, *Dayah Tanoh Abec* menjadi pusat latihan *perang jihad*, karena pada waktu itu di tanah Aceh meletus perang melawan Belanda.⁷ Sejak pecah perang Aceh melawan Belanda, semua *dayah* di Aceh mengalihkan aktivitasnya ke arah perjuangan politik melawan Belanda, sehingga *dayah* dijadikan markas aktivitas militer. Sejak perang berkecamuk, banyak tenaga ulama yang hilang, karena *syahid* di medan perang.⁸

⁶ Ali Hasjmy, "Pendidikan Islam di Aceh dalam perjalanan sejarah", dalam *Sinar Darussalam* No. 63, Yayasan Pembina Darussalam, hal. 8-9.

⁷ Ali Hasjmy, *Ulama Aceh: Mujahid Perjuangan dan Pembangunan Tamadun bangsa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hal. 9.

⁸ Sanusi Pane, *Sejarah Indonesia Jilid II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1951), hal. 174.

Dayah-dayah yang berkembang sekitar abad ke-20-an di antaranya, *Dayah Kruengkale* yang dipimpin oleh Teungku Hanafiah, *Dayah Jeurela* di Sukamakmur, *Dayah Labuhanhaji*, Aceh Selatan, dan lain sebagainya.

Pada tanggal 4 Februari 1968 didirikan organisasi Persatuan *Dayah* Inshafuddin. Suatu organisasi yang bergerak dalam melestarikan dan mengembangkan pendidikan *dayah* di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian mulai mengembangkan konsep pendidikan pasca *dayah*, yang sasarannya memberikan pendidikan tambahan kepada calon-calon pemimpin *dayah* yang dipusatkan pada lembaga-lembaga tertentu. Oleh karena itu, muncullah *dayah* yang bersifat terpadu dengan sistem madrasah seperti sekarang ini; di antaranya madrasah yang menonjol adalah Madrasah Bustanul Ulum di Langsa dan *Dayah Jeumela Amal* di Pidie. Dengan munculnya sistem terpadu ini bukan berarti *dayah* yang bersifat tradisional lenyap. Bahkan banyak yang bersistem tradisional sampai sekarang berkembang pesat, seperti *Dayah Makhadal Ulum Samalanga*, *Dayah Ibrahimiyah* di Seulimum, *Dayah Baitussari Simpang Ulim*, dan lain sebagainya.

Dayah dan Elemen-Elementnya

Dapat dimengerti bahwa di *dayah* terdapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengkaji dan mendalami berbagai cabang disiplin ilmu agama. Sistem pendidikan di *dayah* tidak dikenal persentase pembagian kesempatan mempelajari ilmu-ilmu agama, seperti yang ada pada lembaga pendidikan formal, walaupun sekarang sudah mulai bergeser ke arah itu. Akan tetapi, pada umumnya tidak dikenal pada sistem pendidikan *dayah*.

Dengan tidak adanya sistem pembagian seperti itu, maka para *murid* yang memang sejak semula ingin mendalami ilmu agama, akan leluasa mengkaji sepuas-puasnya khazanah ilmu keislaman di *dayah*. *Dayah* sebagai tempat yang strategis untuk

²10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan, (Banda Aceh: Yayasan Pembina Darussalam, 1969), hal. 327.

mempelajari ilmu-ilmu agama, walaupun tidak menutup kemungkinan di perguruan umum; karena di *dayah* kesempatan untuk mempelajari agama tidak terbatas.

Lembaga pendidikan *dayah* juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu dapat dipergunakan sebagai wahana pembinaan kader. Kader pemimpin agama sebagai juru dakwah atau kader pemimpin bangsa. Di *dayah* calon-calon pemimpin atau kader-kader pemimpin itu, dapat dikenai secara mendetail pola kepemimpinan nabinya. Mereka dapat diarahkan untuk dapat memahami "*sistem leadership*" yang pernah diterapkan oleh nabinya, walaupun untuk waktu yang dahulu: cara pengenalannya bersifat sederhana. Kepada mereka selalu ditanamkan akhlak pemimpin yang mulia, dahulu pernah dicontohkan oleh nabinya, melalui sejarah perjuangan nabi dan para sahabatnya.

Selain *dayah* mempunyai fungsi seperti tersebut di atas, juga ada fungsi yang lain, seperti sebagai tempat *training* pemantapan keimanan, yaitu suatu keyakinan akan kebenaran yang mutlak dari Islam, sehingga dengan adanya keyakinan semacam itu ada kesanggupan bagi para *murib* untuk membela dan memperjuangkan agama Islam. *Training* pemantapan keimanan, itu sangat dimungkinkan untuk diberikan di lembaga *dayah*. Di *dayah*, situasi dan kondisinya masih murni, bersih dan tidak banyak terjadi akulturasi dengan berbagai ideologi dari luar. Ideologi kapitalisme, materialisme, sekularisme tidak pernah mampir di dunia *dayah*. Ketiga ideologi di atas tidak pernah menyeruak di dalam tatanan kehidupan *dayah*, yang serba agamis dan ritualistik. Di *dayah*, akibat para *murib* senantiasa disentuh dengan kajian-kajian ilmu keislaman dan kegiatan-kegiatan yang bersifat Islami, maka lambat laun sikap mantap dan keyakinan terhadap kebenaran Islam akan semakin besar dan kokoh.

Di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, ilmu agama disebut dengan istilah *eleumee*, yaitu ilmu yang pada pokoknya mempelajari

kehendak dan perintah-perintah Tuhan. Ilmu itu meliputi ilmu bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan Hadist.⁹ Bahasa Arab penting, karena merupakan kunci untuk memahami Al-Quran. Dengan demikian, *eleumee* itu pada pokoknya mempelajari kewajiban-kewajiban Islam secara rinci, menyusun kedalam bentuk hukum, dan membuat lembaga dan metode untuk mentaati syariat secara terus-menerus.

Dayah di Aceh pada umumnya mempelajari ilmu-ilmu seperti tersebut di atas. Para *murib* yang telah menguasai ilmu-ilmu itu dapat disebut sebagai *teungku*. Bahkan, kadang-kadang *murib* yang baru dapat menguasai bahasa Arab sudah disebut *teungku*. Mendidik, membina dan mengkader *teungku* untuk meneruskan dan mendakwahkan Islam salah satu tujuan yang menradisi di *dayah*.

Sistem pendidikan *dayah* merupakan peniruan dari sistem pendidikan yang umum dikenal di dunia Islam. Sistem yang demikian itu dapat dijumpai di Maroko, Tunisia, Mesir, Samarkand dan Cardova.¹⁰

Keberadaan *dayah* tidak dapat lepas dari elemen-elemen yang sudah menjadi tradisi, yaitu *rangkang*, mesjid, kitab-kitab Islam klasik dan *murib* serta *teungku*; dua yang terakhir adalah unsur yang terpenting. Karisma *teungku* dan jumlah murid yang berhasil dididiknya menentukan besar dan kecilnya sebuah *dayah*.

Rangkang adalah tempat tinggal para *murib*. *Rangkang* disediakan oleh *dayah* dengan bangunan yang sederhana. Pembangunan *rangkang* disebabkan, pertama kemasyhuran seorang *teungku* dan kedalaman ilmunya tentang Islam, menarik *murib-murib* dari jauh, sehingga harus menetap di dekat kediaman *teungku* tersebut agar dapat menggali ilmunya secara teratur. Kedua, di sekitar lingkungan *dayah* tidak menyediakan

⁹ Ismail R. Faruqi dan Lois Lamnya, *The Cultural Atlas of Islam*, (New York, 1986), hal. 230.

¹⁰ Djelani, *Sistem Pendidikan Pondok Pesantren*, (Bogor, 1983), hal. 39.

akomodasi yang cukup untuk para *murib*, sehingga perlu adanya *rangkang* khusus. Ketiga, adanya sikap timbal balik antara *teungku* dengan *murib*. *Murib* menganggap *teungku* sebagai orang tua sendiri, dan *teungku* menganggap murid sebagai "utusan" Tuhan yang harus dilindungi.

Mesjid adalah unsur yang dominan untuk mendidik para *murib*, terutama untuk praktek shalat lima waktu, khutbah dan shalat Jumat serta pengajaran kitab-kitab Islam klasik (*theuet kitab kuneeng*). Kedudukan mesjid sebagai pusat pendidikan Islam dalam tradisi *dayah* merupakan manifestasi yang umum dari sistem pendidikan Islam tradisional. *Teungku* yang ingin mengembangkan sebuah *dayah* harus mendirikan mesjid di dekat rumah atau *dayahnya*.

Kitab-kitab Islam klasik (*kitab kuneeng*) yang diajarkan di *dayah* terdiri dari bahasa Arab, fiqh, hadist, tauhid, akhlak, etika dan sejarah. Kitab-kitab tersebut ada yang sangat ringkas dan ada pula yang berjilid-jilid tebalnya. Kitab-kitab itu dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu kitab-kitab dasar, kitab-kitab tingkat menengah dan kitab-kitab besar. Kitab-kitab inilah yang umumnya diajarkan di Aceh, sehingga tercipta homogenitas pandangan hidup, kultural dan praktek-praktek keagamaan.

Murib merupakan elemen penting dalam lembaga-lembaga *dayah*. Seorang alim hanya dapat disebut *teungku* apabila memiliki *dayah* dan *murib* untuk mempelajari kitab-kitab kuning. Menurut tradisi *dayah* terdapat dua kelompok *murib*, yaitu *murib mukim* dan *murib kalong*. *Murib mukim* adalah murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap di *dayah*, sedangkan *murib kalong* adalah *murib-murib* yang berasal dari desa-desa di sekitar *dayah* dan biasanya tidak menetap di *dayah*.

Teungku adalah elemen terpenting dari *dayah*. Kata-kata *teungku* dalam bahasa Aceh dipakai untuk dua jenis gelar, yaitu gelar bagi orang yang taat beragama; dan

gelar yang diberikan masyarakat kepada orang ahli agama yang memiliki *dayah* atau pemimpin *dayah*, imam *meunasah*, imam mesjid, dan orang-orang yang mengajarkan membaca Al-Quran.¹¹ Kata *teungku* dalam pengertian yang kedua inilah yang berkaitan dengan tradisi *dayah*.

Metode pengajaran *dayah*

Di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sebagian besar penduduknya beragama Islam, pada dasarnya hanya ada satu jenis ilmu atau pengajaran (Aceh; *eleumee*, dari kata Arab ilmu). Ilmu itu meliputi segala sesuatu yang harus dipercayai dan dilaksanakan orang sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang diwahyukan kepada nabi-Nya. Ilmu itu diarahkan untuk mencapai cita-cita yang tinggi dan mulia serta praktis, yaitu memungkinkan manusia hidup bahagia dan membukakan kepadanya pintu menuju keselamatan abadi. Di samping itu, semua ilmu lainnya dianggap mempunyai derajat yang lebih rendah dan hanya berfungsi untuk mencapai cita-cita duniawi, baik yang dibenarkan maupun yang dilarang oleh hukum Yang Maha Suci.¹²

Sudah menjadi kebiasaan di Aceh, yang seakan-akan merupakan aturan tiap-tiap *dayah*, bahwa orang yang baru mulai belajar tidak dapat langsung belajar dari *teungku dibalee* (kepala *dayah*), tetapi terlebih dahulu belajar pada *teungku dirangkang* (asisten *teungku dibalee* yang sudah tinggi ilmunya). Setelah belajar dasar-dasar ilmu yang diajarkan di *dayah* tersebut, kemudian baru belajar kepada *teungku dibalee*.¹³ Belajar pada *teungku dibalee* merupakan pendalaman ilmu-ilmu agama dan masalah-masalah

¹¹ Alfian, *The Ulama in Aceh Society: A Preliminary Observation*, (Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Aceh, 1975), hal. 2.

¹² Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonial Jilid II*, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hal. 1.

¹³ Ali Hasymy, *op.cit.*, hal. 75.

lain yang belum dapat dibahas oleh *teungku dirangkang*.

Para ulama biasanya menyampaikan pengajaran kepada para *murib* melalui salah satu dari dua cara berikut ini. *Pertama*, satu demi satu *murib* mendatangi dengan membawa satu buku yang sedang dipelajari. Guru membaca salah satu bab, memberikan penjelasan lalu menyuruh *murib* membaca ulang teks yang bersangkutan dan mengulangi atau menuliskan penjelasan yang tadinya telah disampaikan. *Kedua*, para *murib* duduk melingkar di sekeliling *teungku* yang membaca dan menjelaskan teks yang ada dalam kitab.¹⁴ Kitab-kitab pegangan itu dibaca kalimat per kalimat di bawah bimbingan *teungku*. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Aceh atau Melayu secara harfiah dari bahasa Arabnya. Istilah-istilah teknis biasanya tidak diterjemahkan. *Teungku* kemudian melanjutkan terjemahan kalimat dengan keterangan penjelas. Untuk membuat maksud pengarang kitab menjadi jelas, kemudian memberikan kesempatan kepada *murib* untuk bertanya.

Dayah di antara Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan bakat alamiah kehidupan manusia yang selalu datang dan meninggalkan jejak, yang sebagian positif dan bermanfaat dan ada segingnya yang merugikan. Persoalannya, bagaimana mengelola suatu sistem perubahan yang lebih banyak manfaatnya bagi pengembangan kualitas kehidupan manusia.

Salah satu bentuk perubahan manusia yang bersifat global dan berhubungan dengan komunitas muslim adalah perubahan perilaku dan fungsi lembaga keagamaan. Berbagai nilai yang tumbuh dan berkembang dari cara manusia merealisasikan ajaran agamanya mulai dipertanyakan fungsi-fungsinya dalam modernitas kehidupan masyarakat. Demikian pula tata kelakuan dan interaksi sosial

¹⁴ Snouck Hurgronje, *op.cit.*, hal. 31-32.

komunitas muslim mulai mengarah tema modernitas yang sulit ditemukan dalam doktrin agamanya yang berlaku.

Persoalan di atas tidak hanya dapat dijelaskan dengan menempatkan perubahan sebagai yang berada di luar agama. Akan tetapi, membutuhkan suatu penjelasan yang memberikan tempat bagi manusia untuk tetap kreatif melakukan perannya sebagai pemimpin. Untuk itu, dibutuhkan keberanian moral selalu memeriksa dan meninjau secara kritis konsep-konsep yang selama ini berlaku. Pertanyaan mengenai fungsi keagamaan di atas banyak berkaitan dengan sistem pendidikan, bahkan dianggap paling bertanggung jawab terhadap perubahan dan kemampuan manusia untuk menjawab, mengarahkan dan menempatkan dirinya secara tepat dalam perubahan tersebut.

Dalam kerangka itu, ketika berbagai perubahan masyarakat semakin cepat dan komplek sejak awal abad ke-20. Hal itu mendorong berbagai usaha merumuskan sistem pendidikan Islam yang bukan saja sebagai jawaban atas perubahan, akan tetapi sekaligus sebagai pengarah dari perubahan itu sendiri. Salah satu jawaban adalah modernisasi sistem pendidikan Islam.¹⁵

Pendidikan modern sebagai suatu sistem, ditempatkan berdampingan atau sama sekali diartifungsikan secara lain dari sistem pendidikan yang dikenal dengan *dayah*. Setelah lama dipraktikkan dan telah menghasilkan banyak manusia modern, orang belum juga merasa puas. Hal ini mendorong peninjauan kembali kepada *dayah* yang masih tegak di tengah modernitas. Walaupun terpaksa melakukan berbagai macam penyesuaian dalam berbagai hal, namun tetaplah *dayah* adalah sesuatu yang lain di tengah modernitas tersebut. Bagaimana *dayah* menjejaskan di tengah-tengah modernitas, dengan tetap secara positif

¹⁵ Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 22-29.

memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi masyarakat.

Manusia atau masyarakat yang berkualitas adalah yang memiliki kesiapan menghadapi segala permasalahan kehidupan. Salah satu upaya formal itu adalah melalui pendidikan.

Selanjutnya, mengingat perubahan masyarakat yang semakin cepat dan meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan beragama. Untuk itu, upaya pendidikan harus memberi peluang berkembangnya kualitas kepribadian yang memiliki kesiapan dan kemampuan memecahkan berbagai persoalan secara kreatif dan dinamis. Oleh karena itu, penyelenggara pendidikan Islam perlu dibebaskan dari penyajian bahan secara keddoktrinatif yang dikembangkan sebagai suatu dialog kreatif. Memberi peluang peserta didik di samping memahami Islam dengan benar dan mendalam juga bagi perkembangan keterampilan serta intelektualitas sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Hal itu, dilakukan dengan pendekatan pengembangan moralitas baik bagi calon intelektual maupun tidak. Untuk menjadi catatan, pendidikan Islam yang indoktrinatif justru akan menumbuhkan pertentangan internal dalam diri calon intelektual profesional yang tidak kondusif bagi tumbuhnya kepribadian muslim kreatif, yang memiliki kesiapan memecahkan berbagai persoalan kehidupan dalam masyarakat industrial.

Di sisi lain, mengingat ciri khusus *dayah* yang bersifat komunal dalam jalinan hubungan organik, yang tersusun berdasarkan basis hubungan *teungku* dengan *murib*. Hal itu, tidak sekedar berada dalam batas-batas rasionalitas, serta tersedianya waktu untuk terjadi dialog intensif antara *murib* dengan *teungku*. Dengan demikian, kehilangan sisi manusia dalam modernitas dapat ditemukan. Kemandirian dunia *dayah* lebih memiliki peluang untuk secara unik memperlakukan kekhususan wilayah, budaya dan tingkat sosial suatu masyarakat bahkan individu secara tersendiri. Hal ini mengingat konsep

baru pendidikan sebagai kegiatan kehidupan untuk pencapaian perwujudan manusia. Oleh karena itu, harus menekankan pengembangan konsep diri yang baik, sehingga dapat dianggap sebagai daya pengarah perbuatan atau *performance* orang.¹⁶

Di tengah sistem pendidikan Islam yang mencari dan merumuskan jati dirinya, kehadiran *dayah* sebagaimana dibuktikan oleh sejarah tetap relevan dan diperlukan. Namun demikian, untuk tetap berfungsi dengan baik memerlukan pengembangan kreatif tanpa harus mengganti atau bahkan menjual kejadiannya. Untuk itu pertamanya perlu memantapkan landasan pokok keberadaan *dayah* yang selama ini sudah ada. Langkah berikutnya adalah penetapan pola kajian pokok dengan memperhatikan lingkungan geografis dan sosial tempat *dayah* didirikan.

Agar penetapan tersebut bermakna, maka apapun pola kajian pokok tampak *dayah* perlu dengan serius memahami masyarakatnya. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis sangat dibutuhkan di samping apa yang selama ini menjadi bahan kajian utamanya. *Kedua*, agar *dayah* memiliki visi ke depan dengan tetap teguh pada jati dirinya. Dalam landasan pokok dan kajian pokoknya perlu mengembangkan kemampuan pendekatan filosofis, yang bukan semata-mata dititikberatkan pada pendekatan teologis. *Ketiga*, agar secara pragmatis dunia *dayah* dapat hadir setiap saat dalam masyarakat, perlu pengembangan profesionalitas yang relevan dengan masyarakatnya. Pengembangan profesionalitas dapat dilakukan dengan titik berat tertentu, misalnya: di desa, kota, daerah pantai, pertanian, perkebunan, kawasan industri dan sebagainya. Untuk *dayah* tertentu mungkin perlu pengembangan ilmu-ilmu

¹⁶ Sodik A. Kuntoro, "Memahami Konsep Dasar Pendidikan dalam Rangka Perubahan Kehidupan", dalam M Rusli Karim (ed.) *Seluk Beluk Perubahan Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, tt.), hal. 208.

murni tertentu, laboratorium fisika, kimia, biologi dan keterampilan lain seperti menjahit, bengkel, montir dan sebagainya, disamping itu perlu juga perpustakaan yang lengkap. Dengan cara ini *dayah* dapat menjadi pusat "kehidupan" masyarakat.

Penutup

Masyarakat Aceh sebelum mengenal sistem pendidikan Barat telah mengenal sistem pendidikan yang Islami di *dayah*. Masyarakat yang dibentuk berlandaskan ajaran Islam termanifestasi dengan jelas dalam sistem pendidikan yang dianut masyarakat. Pendidikan yang diberikan kepada anak-anak sejak di lingkungan keluarga hingga tingkat selanjutnya dititikberatkan pada penguasaan ilmu pengetahuan agama. Proses belajar belum mengenal kurikulum secara ketat. Keadaan ini berbeda jauh dengan sistem pendidikan Barat yang diperkenalkan pada waktu yang lebih kemudian.

Pendidikan *dayah* merupakan warisan yang sangat penting dari sistem pendidikan di Aceh. Pendidikan *dayah* sudah berkembang ratusan tahun yang lalu dan telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan agama Islam di Aceh.

Dayah mempunyai pola umum dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhnya sebuah *dayah* dimulai dengan adanya pengakuan suatu lingkungan masyarakat tertentu terhadap kelebihan ilmu agama dan kesalihan seorang *teungku*. Penduduk dalam lingkungan itu banyak yang datang kepadanya untuk belajar. Pada umumnya *teungku* dianggap sebagai cikal bakal daerah baru. Oleh karena itu, pengaruhnya sebagai

primus inter pares sangat besar terhadap lingkungan masyarakatnya.

Dayah sebagai konstitusi merupakan bagian dari masyarakat, memiliki keterbatasan dan kelebihan identitas. Sistem perencanaan dan manajemen pada umumnya dapat menerangkan dengan jelas problema dan pragnosa, motif dan metode, program dan proyek serta politik pengembangan kelembagaannya, baik secara mandiri maupun dengan kerjasama. Dengan kerjasama ini dicoba membangun komitmen untuk mendahulukan prestasi *dayah* melalui pendekatan manusiawi, fungsi dan teknologi yang Islami dalam membina pengembangan pendidikan Islam untuk masa mendatang.

Mengingat tua dan luasnya penyebaran *dayah*, dapat difahami bahwa pengaruh lembaga itu pada masyarakat di sekelilingnya sangat besar. Sebagai lembaga sosial yang berada di akar bawah, *dayah* memiliki peranan strategis dalam memacu dinamika desa yang memerlukan peran serta masyarakat dari perencanaan bawah. Menghubungkan *dayah* dengan dinamika desa tidak berarti memperkuat gambaran umum tentang *dayah* sebagai lembaga sosial yang bersipat rural, pastoral, idelik mitos-mitos akardian orang kota tentang desa. *Dayah* tidak lagi dilihat sebuah subkultur dalam artian gejala yang unik dan terpisah dari dunia luar, dengan alasan yang sama, *dayah* juga tidak dapat digambarkan semata-mata sebagai "sektor tradisional" dari masyarakat ganda. Hal itu seperti dijelaskan oleh Boeke, membuat tipologi tentang gejala yang sedang berubah selalu akan terjatuh ke dalam simplikasi berlebihan. *Dayah* sebagai "lembaga tua" tanpa mengenal watak-watak barunya tidak akan menolong dalam analisis sosial dunia *dayah*.



Sudirman, S.S. lahir di Aceh Barat pada tanggal 8 April 1971. Setelah menamatkan SMA Negeri 1 Manggeng, kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Sastra, Program Studi Sejarah Indonesia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini magang di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

Pembaharuan Pendidikan Agama di Aceh Pada Masa Kolonial Belanda

Oleh Sri Wahyuni

Pendahuluan

Awal abad kedua puluh adalah masa lahirnya gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Lahirnya gerakan ini tidak lepas dari munculnya tokoh-tokoh baru di kalangan Islam yang sangat menyadari akan pentingnya pendidikan. Akan tetapi, gerakan pembaharuan ini tidak menekankan pada sistem pendidikan tradisional, tetapi lebih menekankan pada sistem pendidikan modern. Munculnya gerakan ini tidak terlepas dari gerakan pembaharuan Islam yang muncul di Timur Tengah, yang sangat memperhatikan pembaharuan pendidikan Islam dan pembaharuan ini pun terjadi sebagai respon aktif terhadap munculnya pendidikan Barat di wilayah-wilayah Islam.

Kehadiran tradisi pendidikan Barat di Aceh yang dibawa oleh Belanda menimbulkan berbagai reaksi dalam masyarakat Aceh. Ada golongan masyarakat yang sangat menentang sistem pendidikan tersebut sampai mengatakan bahwa mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah Belanda lama-lama akan menjadi *kaphe* (kafir). Golongan ini masih tetap mendidik anak-anak mereka melalui pendidikan tradisional yang ada pada masyarakat Aceh, yaitu lembaga pendidikan *meunasah* dan *dayah*. Walaupun pada akhirnya dapat menerima sistem pendidikan Barat tersebut, namun ulama tidak puas karena pendidikan agama tidak dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Untuk mengatasi hal ini, maka lahir model ketiga dalam perkembangan pendidikan di Aceh, yaitu model mengawinkan pendidikan agama dengan pendidikan umum dalam satu lembaga baru yang disebut dengan madrasah.

Sistem Pendidikan Tradisional pada Masyarakat Aceh

Pendidikan dasar pada masyarakat Aceh dilaksanakan di *meunasah* yang terdapat pada setiap *gampong* di Aceh untuk anak laki-laki. Guru yang mengajar di *meunasah* tersebut adalah *teungku imum* dengan dibantu oleh satu-dua orang guru bantu lainnya, sesuai kebutuhan. Bagi anak-anak perempuan, pendidikan dilaksanakan di rumah *teungku imum*, dengan istrinya sebagai guru yang disebut *teungku di rumoh*. Pelajaran yang pertama-tama diajarkan, baik di rumah maupun di *meunasah* adalah membaca Al-Quran. Hal itu dimulai dengan memperkenalkan huruf Hijaiyah (alfabet) seperti yang tercantum dalam buku Qaidah Baghdadiyah. Setelah buku tersebut selesai, pendidikan berpindah kepada Juz Amma, yaitu juz ke-30 dari Al-Quran, sesudah itu selesai kemudian diajarkan Al-Quran besar yang terdiri dari 30 juz.

Teungku Imum yang mengajar di *meunasah*, selain mengajarkan membaca Al-Quran, juga mengajarkan kitab *jawoe* (kitab dengan bahasa Melayu tulisan Arab) pada tingkat yang masih rendah, tingkat selanjutnya diajarkan bahasa Arab yang disebut dengan *malem nahu*, disebut *malem nahu*, karena orang tidak dapat membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab tanpa terlebih dahulu belajar *nahu* (tata bahasa Arab). Pelajaran semacam ini tidak diajarkan di *meunasah*, melainkan di *dayah*.¹

¹ Ismuha, "Latar Belakang Ulama dan Pendidikannya", dalam *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : tt), hal. 18-19.

Cara memberi pelajaran, *teungku* membaca dan para murid mendengar. Setelah dibaca, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan kadang-kadang juga ke dalam bahasa Aceh. Untuk membantu murid mengetahui kedudukan kata dalam kalimat, maka ditentukan cara menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu - Aceh.

Pendidikan di Meunasah. Sebagai usaha yang melembaga pada masyarakat Aceh, maka pendidikan di Aceh yang asli adalah pendidikan yang dilaksanakan melalui lembaga *meunasah*. Peranan *meunasah* sebagai lembaga utama pendidikan dalam masyarakat Aceh tidak saja dapat dibaca dalam literatur tentang Aceh, tetapi juga pada masih adanya lembaga-lembaga tersebut dalam masyarakat Aceh sampai sekarang ini. Usaha-usaha pendidikan di Aceh melalui *meunasah* sudah melembaga dan membudaya, sehingga meskipun dewasa ini di Aceh memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang baru, namun masyarakat Aceh tidak mudah melepaskan keberadaan lembaga pendidikan ini.² Pendidikan yang dilaksanakan melalui *meunasah* merupakan pendidikan dasar bagi masyarakat Aceh. Setiap kampung di Aceh memiliki *meunasah* yang di samping peranannya sebagai lembaga pendidikan juga mempunyai peranan kemasyarakatan lainnya.

Pendidikan di Rangkang. Menurut *kanun meukuta alam*, bahwa tiap-tiap mukim harus ada satu mesjid, seperti halnya di tiap-tiap kampung satu *meunasah*. Mesjid adalah tempat segala kegiatan umat, termasuk kegiatan pemuda. Oleh karena itu, mesjid merupakan madrasah tingkah menengah, yang sekarang dapat dikatakan dengan sekolah tingkat pertama. Kebanyakan murid terus menetap di mesjid, sehingga di sekeliling mesjid didirikan asrama. Pada

pendidikan *rangkang*, sudah mulai diajarkan bahasa Arab, dengan menggunakan buku bahasa Arab.

Pendidikan di Dayah. Sebenarnya pendidikan *dayah* adalah kelanjutan dari pendidikan yang sudah ada pada masa Kesultanan Aceh. Sejak Kerajaan Aceh terlibat perang dengan Belanda, pendidikan *dayah* terhenti sama sekali karena pemimpinnya ikut berperang melawan Belanda. Setelah perang mulai mereda, para ulama dan pemimpin-pemimpin lainnya kembali ke kampung dan mengaktifkan kembali pendidikan *dayah*.

Ditinjau dari istilahnya, *dayah* berasal dari kata *zawiyah* dalam bahasa Arab yang berarti sudut. Hal ini disebabkan dalam tradisi Islam pendidikan dan pengajaran pada mulanya dilaksanakan di sudut-sudut mesjid. Setelah lembaga yang memakai tempat di sudut-sudut mesjid ini menjadi besar, maka diperlengkapi dengan fasilitas-fasilitas lainnya, namun mesjid tetap menjadi pusatnya.³

Pendidikan sistem *dayah* memiliki beberapa ciri penting. Ciri *dayah* yang paling menonjol adalah pemondokan untuk *murid-murid* dalam satu kompleks bersama-sama dengan guru,⁴ karena pemondokan ini *dayah* kadang-kadang disebut juga pondok pesantren. Ciri lain pendidikan *dayah* adalah pengajarannya sangat terpusat pada ilmu-ilmu agama dalam pengertian *dayah* tradisional. Tradisi pendidikan *dayah* adalah tradisi sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dan dibiayai oleh masyarakat. Partisipasi pemerintah dalam pengembangan pendidikan ini sangat terbatas. Tradisi pendidikan yang sebelumnya dilaksanakan oleh masyarakat ini, berasal dari zaman lampau yang dibangun oleh para ulama. Ciri yang lebih menonjol lagi pada lembaga ini

³ Ibid.

⁴ "Apresiasi Dayah sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Aceh", Hasil Seminar *Dayah Inshafuddin*, (Banda Aceh: P.B. Inshafuddin, 1987), hal. 9-10.

² Safwan Idris, "Pendidikan di Aceh, dalam *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 1995), hal. 9.

pada umumnya dimiliki oleh perorangan. Kesenambungan pendidikan modal *dayah* semata-mata karena akar budayanya yang sudah begitu mendalam dalam kehidupan masyarakat.

Pendidikan di Dayah Teungku Chiek. Pendidikan ini dapat disamakan dengan perguruan tinggi atau akademi. Ilmu yang diajarkan pada *dayah teungku chiek*, antara lain hukum Islam, tafsir, tauhid, akhlak, bahasa Arab, sejarah, tata negara, logika, ilmu falak, dan sebagainya.

Pembaharuan Pendidikan Agama di Aceh

Sistem pemerintahan Kesultanan Aceh makin lama semakin lemah dalam mengendalikan kekuasaannya, terlebih pada saat peperangan melawan Belanda. Tokoh tokoh pemimpin masyarakat sibuk mengatur peperangan, namun masalah pendidikan tetap terus berjalan. Bahkan pusat-pusat pendidikan *dayah* menjadi tempat pembinaan, latihan kader-kader pemimpin pejuang untuk melanjutkan peperangan mengusir penjajahan.

Pada awal abad ke-20 mulai meredanya peperangan di Aceh, maka melalui putra-putra Aceh yang belajar di Minangkabau, Pulau Pinang, dan Timur Tengah, masuklah pengaruh-pengaruh modernisasi dalam berbagai bidang pendidikan agama di Aceh. Di samping itu, dari para ulama muncul inisiatif dan usaha-usaha baru untuk membina kembali sistem pendidikan tradisional menjadi madrasah. Mata pelajaran yang diajarkan tidak hanya berkisar pada ilmu agama, tetapi juga ditambah dengan ide-ide realistik dan yang berhubungan dengan kepentingan sosial kehidupan untuk kesejahteraan dalam masyarakat.

Lembaga-lembaga pendidikan Hindia Belanda, berupa Sekolah Desa yang pertama di Aceh didirikan pada tanggal 30 September 1907 di Ulhee Lheue, Banda Aceh. Sedangkan pendidikan agama yang disebut madrasah, pertama kali didirikan di Banda Aceh (Kutaraja) pada awal tahun

1916.⁵ Pembangunan sistem madrasah, berarti bertambahnya lembaga pendidikan di Aceh di samping sekolah desa dan *dayah*, pendidikan madrasah adalah bentuk klassikal-modern.

Pembaharuan sistem pendidikan agama itu berjalan dengan pesat, walaupun mendapat tantangan dari sebagian ulama yang masih mempertahankan sistem pendidikan tradisional, akan tetapi tidak menghambat jalannya pembaharuan. Dalam waktu yang relatif singkat, pembaharuan telah merata keseluruh tanah Aceh, sampai tahun 1939 hampir setiap kecamatan terdapat dua sampai tiga buah sekolah madrasah.

Madrasah-madrasah yang mengembangkan sistem pendidikan modern pada waktu itu, antara lain :

Madrasah Al-Khairiyah tahun 1916. Madrasah ini didirikan atas inisiatif Tuanku Raja Keumala, yang meminta izin kepada Gubernur Belanda di Aceh H.N.A. Swart untuk mendirikan madrasah tersebut di Kutaraja. Permintaan itu dikabulkan dengan suratnya pada tanggal 16 Nopember No.979/15, memenuhi surat permintaan surat Raja Keumala tanggal 22 Oktober 1915.⁶

Pada tahun 1916 dengan resmi madrasah dibuka dengan mengambil tempat di halaman belakang Mesjid Raya Baiturrahman Kutaraja, dengan pemimpinnya yang pertama dipilih Teungku Muhammad Saman Tiro, seorang yang sudah lama belajar di Mekkah. Sistem belajarnya dengan menggunakan bangku, papan tulis, dan peralatan lainnya. Pada tahun 1926 madrasah itu mulai mengajarkan mata pelajaran umum, seperti sejarah, ilmu bumi, berhitung dan lain-lain.

Izin mendirikan madrasah tersebut diberikan oleh Gubernur Swart dengan

⁵ Badruzzaman Ismail, "Peranan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Agama di Aceh" dalam *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 1995), hal. 157.

⁶ Ibid.

ketentuan; *pertama*, kepada Tuanku Raja Keumala yang tinggal di Kampung Keudah Kutaraja, diizinkan mendirikan sebuah madrasah tempat belajar orang-orang dewasa dan pemuda-pemuda. *Kedua*, mata pelajaran yang boleh diajarkan hanya menulis dan membaca bahasa Arab, sehingga dapat memahami kitab-kitab agama Islam dengan baik, ilmu tauhid dan ilmu fiqh. *Ketiga*, diwajibkan kepada Tuanku Raja Keumala untuk membuat daftar murid-murid sebagaimana dimaksud Staatbad tahun 1905 No. 550 dengan ditentukan syarat-syarat Bijblad No.6363. *Keempat*, murid-murid yang datangnya dari Kutaraja, haruslah membawa keterangan dari pemerintah setempat. *Kelima*, tiap-tiap tanggal 2 Januari, April, Juli dan Oktober setiap tahun harus memberi laporan kepada pemerintah setempat di Kutaraja, melalui komisi yang diangkat untuk itu. *Keenam*, untuk mengawasi madrasah tersebut, diangkat sebuah komisi yang terdiri dari Teungku Syekh Ibrahim Beurawe sebagai ketua, Hoofd jaksa dan kepala penghulu pada landraad Kutaraja sebagai anggota. *Ketujuh*, kalau syarat-syarat yang telah ditetapkan dilanggar, Tuanku Raja Keumala akan dihukum dan madrasah akan ditutup.⁷

Menurut James Siegel, dalam bukunya *The rope of God*, menjelaskan bahwa Madrasah Ahlussunnah Waljamaah adalah madrasah yang pertama didirikan di Aceh pada tahun 1928, bukan Madrasah Khairiyah. Akan tetapi, Antony Reid, dalam bukunya *The Blood of the People*, menjelaskan bahwa pada tahun 1926 di Sculimuem, Aceh Besar didirikan sebuah madrasah yang diberi nama Perguruan Islam. Dengan demikian, ada perbedaan tentang madrasah yang pertama didirikan di Aceh.⁸

⁷ *Ibid*, hal. 158.

⁸ M. Nur El Ibrahimy, "Sekitar Pembaharuan Sistem Pendidikan di Aceh", dalam *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh : Majelis Pendidikan Daerah, 1995), hal. 97.

Madrasah Ahlussunnah Waljamaah Idi, Aceh Timur. Atas prakarsa Sayed Husen Syahab di Idi didirikan sebuah madrasah yang diberi nama Madrasah Ahlussunnah Waljamaah. Untuk memenuhi tuntutan zaman yang menghendaki sistem pembaharuan pendidikan Islam, maka pada tahun 1935 madrasah ini diganti namanya menjadi Madrasah Nahdatul Islam.

Sistem pendidikan yang diterapkan pada madrasah ini adalah dengan memadukan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum.⁹ Sayed Husen Syahab yang mendirikan madrasah ini adalah seorang warga negara Indonesia keturunan Arab, dia salah seorang guru pada Madrasah Jamiah Khair. Kedatangannya ke Aceh dalam rangka penyebaran Dakwah Islamiyah yang disesuaikan dengan tuntutan zaman, antara lain penerapan cara baru dalam menyampaikan dakwah dan pembaharuan sistem pendidikan Islam dengan mempergunakan cara-cara yang dapat menggalakkan anak-anak dan pemuda-pemuda untuk belajar pada sekolah-sekolah Islam.

Madrasah Adabiyah. Pada tahun 1929 lahir suatu perkumpulan keagamaan di Blang Paseh, Sigli, yang bernama Jamiatuddiniyah diketuai oleh Teungku Daud Beureueh. Perkumpulan ini mendirikan suatu lembaga pendidikan yang diberi nama Saadah Adabiyah pada tahun 1930. Pendirian madrasah tersebut disokong oleh Teuku Bentara Pineung (*uleebalang* setempat). Salah seorang guru pertama adalah Teungku Abdullah Ujong Rimba. Nama Blang Paseh menjadi masyhur, karena banyak pelajar-pelajar dari seluruh Aceh menjadi murid pada sekolah tersebut.¹⁰

Di antara sebab-sebab yang mendorong berdirinya madrasah ini, tidak terlepas dari peran yang dilakukan oleh Teungku Syekh Abdul Hamid, seorang ulama

⁹ *Ibid*, hal. 93-94.

¹⁰ Badruzzaman Ismail, *op.cit.*, hal. 159.

Aceh yang berasal dari Samalanga, Aceh Utara. Dia adalah anggota Sarikat Islam (SI) yang aktif dan dikejar-kejar oleh Belanda untuk ditangkap dan diinternir ke Boven Digoel. Akan tetapi tidak dapat ditangkap karena terlebih dahulu telah melarikan diri ke Mekkah melalui Pulau Pinang, Malaysia.¹¹ Sebagai orang yang gemar berpolitik, selama di Mekkah Teungku Syekh Abdul Hamid sering berhubungan dengan tokoh-tokoh politik dunia Islam. Abdul Hamid mengirim surat kepada Teungku Abdullah Ujong Rimba, yang ditulis celah-celah berita dalam majalah *Ummul Quran*, terbitan Mekkah. Isi surat itu menganjurkan Abdullah Ujong Rimba dan ulama-ulama Aceh supaya merubah sistem pendidikan Islam di Aceh secepat mungkin, kalau sekiranya Aceh ingin maju.

Lama belajar di sekolah ini 7 tahun, pelajar dianjurkan tinggal di asrama dan mereka harus hidup mandiri. Dana pendidikan diperoleh dari sumbangan para dermawan dan iuran para pelajar, karena setiap pelajar diharuskan membayar uang sekolah, minimal 1 gulden setiap bulan. Murid-murid yang diterima di sekolah ini adalah tamatan *Volkschool/Vervolgschool* atau murid yang sudah pandai membaca Al-Quran. Adapun mata pelajaran yang diajarkan adalah bahasa Arab, tafsir Al-Quran, Hadist, fiqh, bahasa Inggris, sejarah Islam dan Umum, bahasa Indonesia, ilmu keschatan, tata negara, ilmu bumi, kaligrafi Arab, berhitung, aljabar dan ilmu ukur. Di samping itu ada juga kegiatan ekstra kurikuler, seperti kegiatan kepanduan, kegiatan gerak badan, berorganisasi, berpidato dan sebagainya.¹²

¹¹ Ali Hasjmy, *Semangat Merdeka*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hal. 41.

¹² Ibrahim Husen dan Yacob Ali, "Madrasatussaadah al-Abadiyah" dalam *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh : Majelis Pendidikan daerah, 1995), hal. 118-120.

Apabila diperhatikan materi yang diajarkan di madrasah ini, maka dapat disimpulkan bahwa sudah termasuk tingkat menengah pertama menurut tingkat pendidikan sekarang ini. Pada waktu itu hampir semua mata pelajaran diberikan dalam bahasa Arab, sehingga tamatan madrasah ini lancar berbahasa Arab.

Di luar jam sekolah, terutama pada waktu malam hari, para pelajar yang tinggal di asrama mendapat pengawasan ketat dari pimpinan asrama. Pada waktu malam hari, para pelajar harus belajar di bilik asrama masing-masing dan tidak dibenarkan meninggalkan asrama. Pengawasan yang keras dilakukan oleh Teungku Daud Beureueh dan yang melanggar disiplin dikenakan hukuman asrama.

Waktu belajar dibagi dua, pagi dan siang; dari jam 8 sampai jam 13 bagi kelas yang lebih tinggi, dan dari jam 14 sampai jam 18 bagi kelas yang lebih rendah yaitu untuk kelas satu dan kelas dua.

Jamiah Al-Islam Wal-Irsyad Arabia. Pada tahun 1927 di Lhokseumawe didirikan sebuah kelompok pendidikan yang bernama Jamiah Al-Islam Wal-Irsyad Al-Arabia, dipimpin oleh seorang Arab yang bernama Syekh Muhanumad Ibnu Salim Al-Khalaly, mendirikan sebuah madrasah Al-Irsyad sebagai cabang Al-Irsyad Surabaya. Pimpinan madrasah tersebut ditunjuk Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shadiqi yang menamatkan pendidikannya pada madrasah Al-Irsyad Surabaya bagian Aliyah.¹³

Pada awalnya pendidikan tersebut bersifat kelompok pengajian atau semacam kursus agama oleh syekh Al-Khalaly yang dibantu oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shadiqi. Pengajian tersebut menjadi topik pembicaraan yang hangat antara santri-santri *Dayah Meunasah Meucap* dan *Dayah Cot Meurah*. Hal tersebut karena dalam pengajian Al-Khalaly ditampilkan ajaran-ajaran yang bagi orang Aceh merupakan

¹³ Badruzzaman Ismail, *op.cit.*, hal. 158-159.

barang baru yang tidak pernah didengar. Antara lain disebutkan bahwa setiap hukum yang tidak berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist harus ditolak, walaupun yang memberi fatwa itu ulama besar yang ternama. Masalah tersebut menimbulkan reaksi dari masyarakat Aceh terhadap pengajian tersebut dengan berbagai cara dan ancaman.¹⁴

Madrasah Al-Muslim. Pada tanggal 14 November 1928 di Matang Glumpang Dua, Peusangan Aceh Utara, didirikan sebuah organisasi yang diberi nama dengan Al-Muslim. Ketua persatuan Al-Muslim itu dipimpin oleh Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap. Organisasi ini mendapat bantuan dari uleebalang setempat, yaitu Teuku Chiek Peusangan. Tujuan Al-Muslim adalah untuk mendirikan lembaga-lembaga sekolah sebanyak mungkin dalam madrasah-madrasah dalam rangka modernisasi sistem pendidikan agama di wilayah Peusangan dan Aceh Utara pada umumnya.¹⁵

Madrasah Al-Muslim dalam melakukan perubahan dari sistem tradisional ke dalam sistem madrasah sesuai dengan tanda-tanda perubahan zaman, telah memasukkan dan mengembangkan dalam kurikulumnya beberapa mata pelajaran yang bersifat umum, meskipun dalam bahasa Arab sebagaimana pelajaran agama. Maka pelajaran umum yang diberikan dalam bahasa Arab adalah berhitung (ilmu hisab), kesehatan, ilmu bumi, ilmu jiwa, logika, olah raga dan sebagainya.

Selain diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan pada madrasah tersebut juga diberikan latihan-latihan dalam bidang pidato dan kepanduan. Perkampungan Al-Muslim sangat pesat dan cepat di wilayah Peusangan, bahkan sampai ke Aceh Barat dan Aceh Selatan.

Pembaharuan yang dilakukan oleh Al-Muslim itu dalam pelaksanaannya di masyarakat tidak menimbulkan pertentangan-pertentangan, karena sudah diambil

¹⁴ M.Nur El Ibrahimy, *op.cit*, hal 101-103.

¹⁵ Badruzzaman Ismail, *op.cit*, hal. 160.

kebijaksanaan-kebijaksanaan. Hal itu karena para ulama pengurus Al-Muslim berpegang pada prinsip-prinsip, seperti: pertama, bertujuan mengembalikan ajaran Islam kepada kedudukan yang asli, yaitu Al-Quran dan Hadist. Kedua, memperlihatkan dan mengamalkan kemajuan-kemajuan yang dikehendaki oleh Islam yang sebenarnya. Ketiga, berusaha menghapuskan khurafat dan kepercayaan-kepercayaan animisme yang dapat merusak keimanan umat Islam. Keempat, kitab-kitab mazhab Syafi'i selalu dipelajari untuk menjadi pengetahuan dasar bagi mereka yang akan melanjutkan pengetahuan agama yang lebih luas untuk kepentingan masyarakat. Kelima, untuk maksud di atas selalu diadakan tabligh umum atau ceramah-ceramah agama berupa rapat-rapat terbuka sampai ke kampung-kampung dan pelosok-pelosok daerah.¹⁶

Dengan terjadinya perubahan pemerintahan tahun 1942, maka tokoh-tokoh Al-Muslim terpaksa melibatkan diri dalam politik, dengan tujuan membebaskan diri dari cengkaman penjajah Belanda. Mereka bersama-sama dengan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) ikut dalam gerakan di bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Belanda. Oleh karena itu, turut membantu masuknya tentara Jepang dengan mengharapkan bahwa Jepang dapat bekerjasama untuk mengusir penjajah Belanda.

Jamiah Diniyah Montasik. Pada dekade akhir pemerintahan kolonial Belanda, Jamiah Diniyah Al-muntasiyah sebuah pendidikan Islam yang didirikan pada tahun 1931 di Montasik, Aceh Besar, berkembang pesat dan dikenal seluruh Aceh. Madrasah ini didirikan oleh Teungku Ibrahim Lamnga.¹⁷

¹⁶ Mahyuddin Yusuf, "Pendidikan Agama di Aceh dalam Pembangunan", dalam *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 1995), hal. 148.

¹⁷ Badruzzaman Ismail, *op.cit*, hal. 162.

Sebelum Jamiah Diniyah ini didirikan, di Montasik telah ada beberapa lembaga pendidikan yang berbentuk *dayah* dan *rangkang*, antara lain di Lamjampok dan mesjid Montasik yang dipimpin oleh Teungku Syekh Mahmud. Ketika Syekh Mahmud menunaikan ibadah haji ke tanah suci, lembaga ini diserahkan kepada Teungku Syekh Ibrahim; dia mengadakan peningkatan seperti pengadaan asrama bagi para *murib*. Teungku Syekh Ibrahim adalah seorang yang berpandangan luas dan idealis. Setelah menamatkan Sekolah Desa (*Volkschool*) di Cot Pendom Montasik, kemudian melanjutkan ke Pesantren Lambirah dan menambah ilmu pengetahuan di Mekkah ketika beliau naik haji. Pekerjaannya sehari-hari adalah pembela perkara dalam masyarakat, karena sebagai orator, dia sering terjun ke daerah-daerah seluruh Aceh untuk berdakwah dan memaparkan cita-citanya memajukan pendidikan.

Seorang tokoh lain dari Montasik yang ikut memajukan pendidikan adalah Wan Muhammad Yunus, pada tahun 1929 mengelola suatu lembaga pendidikan yang berbentuk sekolah dengan menggunakan bangku dan papan tulis. Wan Muhammad Yunus memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah seperti ilmu bumi, ilmu kesehatan, berhitung dan ketrampilan. Murid-murid yang diterima adalah anak-anak yang belum pernah sekolah, sedangkan dikelas-kelas yang lebih tinggi diterima dari anak-anak yang pernah bersekolah di *Volkschool* dan sekolah-sekolah lainnya. Akibat dari kekurangan guru, Wan Muhammad Yunus memakai sistem tutor di sekolahnya, yaitu murid kelas tinggi ditugaskan mengajar dikelas yang lebih rendah, sedangkan Wan Muhammad Yunus sendiri mengajar pada kelas yang tertinggi.¹⁸

¹⁸ Zakaria Ali, "Sekilas Riwayat JADAM", dalam *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 1995), hal. 133.

Peranan Teungku Syekh Ibrahim dalam memelopori Jamiah Diniyah itu banyak menimbulkan simpati dari masyarakat, sehingga masyarakat bersedia berkorban harta dan tenaga untuk membantu usaha tersebut. Partisipasi masyarakat timbul karena kepemimpinan dan pendekatan yang dijalankan oleh Syekh Ibrahim mendapat tempat di hati masyarakat. Akan tetapi, peran Syekh Ibrahim dalam masyarakat dianggap berbahaya oleh kolonial Belanda, sehingga dia harus meninggalkan Aceh, menyingkir ke Singapura pada tahun 1941. Di samping menerbitkan majalah "Dunia Akhirat" yang juga dikirim ke Montasik untuk memberikan semangat perjuangan kepada masyarakat.

Perubahan sistem pendidikan dimulai dengan para murid, yang dulunya duduk bersimpuh di lantai, sudah memakai atau mempergunakan bangku. Para guru yang sebelumnya hanya membacakan kitab dan menerjemahkan serta menjelaskan maksudnya secara lisan, sudah menggunakan papan tulis sebagai alat untuk memudahkan para pelajar memahami apa yang diterangkan oleh guru. Akan tetapi, karena Kutaraja termasuk daerah yang diperintah langsung oleh Belanda, tidak seperti lainnya di luar Aceh Besar, maka dia terkena Ordonansi Guru Stbl.1905 No.55 yang mengadakan pengawasan yang sangat ketat terhadap pelaksanaan pendidikan di Aceh.

Penutup

Pengaruh kebangkitan nasionalisme baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri ke Aceh telah mendorong para pemuda untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan, dalam arti tidak terbatas dalam mempelajari ilmu agama saja.

Kedatangan Sarikat Islam ke Aceh membawa kesegaran berpikir orang Aceh, yaitu supaya bersatu dengan suku-suku bangsa lain di Indonesia untuk menentang penjajahan Belanda. Selain perkumpulan yang datang dari Jawa menganjurkan agar merubah siasat perjuangan orang Aceh dari

memangkul senjata kepada bergabung dan mengukuhkan persatuan dan persaudaraan di antara sesama bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Himbauan Sarikat Islam itu dapat diterima sebagian rakyat Aceh.

Pemimpin Aceh pada waktu itu menyadari bahwa merebut kemerdekaan tidak cukup dengan memiliki semangat dan sentimen agama saja, akan tetapi mereka juga harus memiliki ilmu-ilmu modern. Di samping itu sistem pendidikan harus diubah, sehingga kurikulum pendidikan bukan hanya terdiri dari ilmu agama dan bahasa Arab saja.

akan tetapi harus dilengkapi dengan ilmu-ilmu dan pengetahuan yang lain. Oleh karena itu, didirikanlah madrasah-madrasah yang pada hakekatnya masih merupakan pendidikan agama, hanya kurikulumnya yang sudah diperluas dengan ilmu-ilmu yang baru, seperti sejarah Islam dan umum, tata negara, ilmu bumi, ilmu alam, aljabar, ilmu ukur, ketrampilan dan lainnya. Akan tetapi, pada umumnya pembaharuan sistem pendidikan di Aceh dilaksanakan melalui organisasi-organisasi pendidikan tidak melalui orang perorang.



Sri Wahyuni S.Sos. lahir pada tanggal 1 Maret 1974 di Kutatuha Blang Pidie, Aceh Selatan. Setelah menamatkan pendidikan SMTA di SMA Negeri 3 Banda Aceh tahun 1992 kemudian melanjutkan pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (UNHAS) Ujung Pandang dan lulus tahun 1996. Semasa kuliah aktif sebagai pengurus Ikatan Kekerabatan Antropologi (IKA-FISIP UNHAS). Sejak 1997 bekerja sebagai tenaga teknis pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

Sistem Pendidikan Rangkang Pada Masyarakat Aceh

Oleh Cut Nadia Fitrina

Pendahuluan

Kehadiran Pendidikan Islam di daerah Aceh bersamaan dengan kehadiran agama Islam di daerah tersebut. Pada awal keberadaan agama Islam di Aceh, penyiaran agama Islam dilakukan dengan sistem dakwah. Salah satu dari kegiatan dakwah itu adalah lewat pendidikan dengan cara memasukkan unsur-unsur ajaran Islam ke dalam sistem pendidikan tersebut, sehingga lambat laun Islam telah menjadi dasar pendidikan bagi masyarakat di daerah Aceh. Islam sebagai dasar pendidikan, oleh sebab itu, pendidikan yang diterapkan bertujuan untuk membina manusia-manusia yang sanggup menjalankan dan memperjuangkan Islam.

Bersamaan dengan meluasnya unsur-unsur ajaran Islam di Aceh, dalam waktu relatif singkat terbentuk pula keluarga-keluarga Islami yang mencrapkan dasar-dasar ajaran Islam dalam kehidupannya. Pendidikan yang diterapkan dimulai di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya pendidikan Islam, maka dirasa perlu didirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian, terbentuklah lembaga-lembaga pendidikan seperti *meunasah*, *rangkang* dan *dayah* sehingga pendidikan Islam tidak terbatas hanya di lingkungan keluarga, tetapi juga di lingkungan *meunasah*, *rangkang* dan *dayah*.

Pendidikan *rangkang* merupakan kelanjutan dari pendidikan di *meunasah* dan diselenggarakan di setiap *mukim*. Menurut

ketentuan Kanum Meukuta Alam, dalam tiap-tiap *mukim* harus ada satu mesjid seperti halnya di tiap-tiap kampung satu *meunasah*. Mesjid adalah tempat berbagai aktivitas umat termasuk pendidikan. Jadi, mesjid merupakan madrasah tingkat menengah yang kalau sekarang dapat disamakan dengan sekolah menengah pertama atau tsanawiyah. Kebanyakan murid terus menetap di mesjid, sehingga di keliling mesjid dibangun *rangkang* sebagai tempat murid tinggal. Pada pendidikan *rangkang*, sudah mulai diajarkan bahasa Arab dengan menggunakan buku berbahasa Arab. Di samping itu, juga diajarkan sedikit ilmu-ilmu umum seperti ilmu bumi, sejarah, berhitung serta Akhlak.¹

Sejarah Pendidikan Rangkang

Sejarah pendidikan *rangkang* pada masyarakat Aceh dimulai bersamaan dengan masuknya agama Islam di daerah Aceh. Sebelum kehadiran sistem pendidikan *rangkang*, pada awalnya sistem pendidikan di Aceh dimulai di rumah (*rumoh*). Anak-anak dididik oleh orang tuanya dimulai dengan pengajaran dasar-dasar akidah (kepercayaan), ibadah dan *muamalah* Islam di *rumoh* mereka masing-masing. Pada awalnya *rumoh* merupakan lembaga pendidikan formal Islam tingkat dasar yang pertama lahir di Aceh. Sebagai lembaga pendidikan formal, sejak itu *rumoh* merupakan tempat belajar yang utama

¹A.Hasjmy, "Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan", dalam *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980, hal. 212).

dimana orang-orang terutama keluarga-keluarga di *gampong* mulai berdatangan ke *rumoh-rumoh* keluarga yang dianggap alim oleh penduduk setempat. Sejak saat itu pula istilah *teungku di rumoh* mulai dikenal. Kemudian dalam waktu relatif singkat keluarga-keluarga Islam telah tersebar luas di *gampong-gampong*, sehingga terbentuklah masyarakat *gampong* Islam. Beriringan dengan lahirnya masyarakat *gampong* Islam didirikan pula lembaga *gampong* yang dikenal dengan nama *meunasah* yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan, khususnya bagi anak laki-laki dan para pemuda di *gampong*.²

Selanjutnya *gampong-gampong* yang telah membentuk masyarakat Islam, jumlahnya semakin bertambah. Oleh karena itu, tiga atau lebih masyarakat *gampong* yang berdekatan mulai merencanakan untuk mendirikan sebuah mesjid sebagai tempat shalat Jum'at. Selain berfungsi sebagai tempat shalat, mesjid juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam. Sebagai lembaga pendidikan, mesjid merupakan tempat berbagai aktivitas umat. kebanyakan murid mondok di mesjid, sehingga di sekeliling kampus mesjid arah samping dan belakang didirikanlah bangunan-bangunan kecil yang dikenal dengan nama *rangkang*, tempat tinggal para pemuda yang sedang belajar di mesjid tersebut.³

Rangkang merupakan rumah panggung kecil yang memuat dua orang tiap rumah atau merupakan rumah panjang yang dibagi dalam beberapa bilik, yang tiap bilik ditempati oleh dua orang. Semua pekerjaan di *rangkang* dilakukan sendiri oleh para murid seperti memasak sendiri, berkongsi dua atau

empat orang, mencari kayu api sendiri, berbelanja sendiri, mencuci sendiri dan sebagainya. Waktu-waktu luang di *rangkang* digunakan untuk menanam sayur sayuran, bawang dan sebagainya. Kadang-kadang waktu luang juga digunakan para murid membantu *teungku di bale* untuk memotong padi yang sudah masak. Dengan demikian, kebanyakan para murid di *rangkang* telah dilatih untuk dapat berdiri sendiri.⁴

Rangkang didirikan pula untuk anak-anak yang ingin dan sanggup melanjutkan pelajaran setelah tamat pendidikan *meunasah*. Kajian pendidikan *rangkang* umumnya telah meningkat kepada berbagai masalah hukum Islam (fiqh) secara lebih luas dan mendalam. Dengan demikian, *rangkang* merupakan lembaga pendidikan Islam tingkat menengah yang lahir di Aceh setelah lembaga pendidikan *meunasah*. Apabila ulamannya cukup besar dan berilmu di *rangkang*, biasanya seperti terjadi pada beberapa *gampong*, maka ditingkatkan menjadi *dayah* sehingga merupakan sebuah kompleks yang di dalamnya tergabung *rangkang* dengan jumlah yang cukup dan sebuah atau beberapa buah *bale*.⁵

Sistem Pendidikan Rangkang

Pendidikan *rangkang* merupakan pendidikan tingkat lanjutan dan dapat disamakan dengan tingkat SLTP sekarang. *Rangkang* merupakan suatu lembaga pendidikan yang didirikan hampir pada setiap mesjid yang umumnya dibangun seperti bentuk-bentuk rumah kecil yang sederhana di sekeliling mesjid, kecuali pada

⁴Ismuha, "Latar belakang Ulama dan Pendidikannya", dalam *Agama dan perubahan Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt), hal.20.

⁵Baihaqi A.K., "Peranan Ulama Dalam Masyarakat Tradisional Aceh", dalam *Agama dan Perubahan Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt), hal. 131-132.

halaman bagian depan. Pendirian *rangkang* biasanya atas inisiatif masyarakat *gampong* yang ada dalam suatu wilayah *mukim* tertentu. *Rangkang* dikelola oleh *teungku-teungku* yang telah memperoleh pendidikan lebih tinggi dari *rangkang*, yang dibantu oleh seorang asisten yang disebut *teungku rangkang* yang merangkap sebagai pimpinan pelajar yang dalam istilah Aceh disebut *murib* (murid) yang tinggal di *rangkang*. *Teungku di rangkang* memberikan penjelasan ulang atau tambahan atas hal-hal yang belum jelas diterangkan *teungku* atau *guree* (guru) di *meunasah*.⁶

Anak-anak yang akan belajar ke lembaga pendidikan *rangkang*, biasanya diantar oleh orang tua mereka yang disebut *intat beuet bak teungku* (mengantar anak mengaji ke *teungku*). Sudah menjadi adat bagi orang tua *murib*, ketika mengantar anaknya ke *teungku* membawa serta satu hidangan nasi ketan dan peralatan upacara tepung tawar untuk acara *peusujuk* untuk mengambil berkah. Setiap anak yang diantar ke *rangkang*, mereka langsung tinggal di sana dalam rumah-rumah kecil atau asrama yang telah disediakan di bawah pengawasan *teungku* yang memimpin *rangkang* yang bersangkutan.⁷

Kegiatan belajar di *rangkang* biasanya berlangsung pada malam hari, yaitu setelah Maghrib dan setelah shalat Isya. Akan tetapi, tidak jarang dilakukan pada pagi hari, yaitu setelah shalat Subuh dan pada sore hari setelah shalat Ashar. Kegiatan belajar itu berlangsung sepanjang minggu, kecuali malam dan hari Jum'at.

Pada pendidikan *rangkang* tersebut diajarkan bahasa Arab dengan menggunakan semua kitab yang berbahasa Arab, yang

⁶Rusdi Sufi, *Karakteristik Islam di Aceh Pada Abad XIX*, (Banda Aceh: BKSNT Banda Aceh, 1996), hal. 10-11.

⁷*Ibid.*, hal.12.

dititikberatkan pada tata bahasa (*qawa'id*), agar murib dapat memahami kitab-kitab yang digunakan untuk mempelajari kitab-kitab yang berbahasa Arab.

Mata pelajaran yang diajarkan pada pendidikan *rangkang*, yaitu ; pertama, *nahwu* dengan kitab-kitab yang dipelajari *Tahrirul Aqwal*, *Matan Al-Ajurrumiyah* dan *Mutammimah*. Kedua, *sharaf* dengan kitab yang dipelajari *Matan Bina Salsalul Mudkhal*, *Al-Kailani* dan kadang-kadang sampai dengan *Al-Mathlub*. Ketiga, *fikih* dengan kitab yang dipelajari *Matan Taqriebe*, *Fathul Qarieb* atau *Al-Bajuri*, *Fathul Mu'in* atau *I'anatut Thalibien*. Keempat, *tauhid* dengan kitab yang dipelajari *Matan as Sanusi*, *Kifayatul Awam* dan *Hudhudi*. Kelima, *ushul fiqh* dengan kitab yang dipelajari *Al-Wasaa'at*, *Luthaiful Isyarah* dan kadang-kadang sampai dengan *Ghayatul Wushul*. Keenam, *manthiq* dengan kitab yang dipelajari *Matan As-Sullam* dan *Idhahul Mubham*. Ketujuh, *adabul alim* dengan kitab yang dipelajari *Majmu'khamisir Rassail* dan *Al-Bayan*. Kedelapan, *tasawwuf* (akhlak) dengan kitab yang dipelajari *Marqi Al-Ubudiyyah* dan *Tanbih Al-Ghafilin*. Dan kesembilan, kitab-kitab lainnya sesuai dengan petunjuk *teungku-teungku* setempat.⁸

Semua kitab itu dipelajari menurut urutannya yang tetap. Setelah tamat dan mengerti yang satu barulah pindah kepada yang lainnya (biasanya banyak *murib* yang menjadi pendengar pada pelajaran yang lebih tinggi). Jangka waktu belajar tidak dapat ditetapkan dengan tahun, tetapi didasarkan kepada tamatnya kitab yang dipelajari.⁹

Pelajaran dimulai dengan *saraf* (perubahan kata) di mana satu kata dapat berubah menjadi lima puluh empat kata,

⁸Baihaqi A.K., "Ulama dan pendidikan", dalam *Agama dan perubahan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt), hal. 159.

⁹*Ibid.*, hal. 159.

²Nasrudin Sulaiman dkk, *Aceh "Manusia Masyarakat Adat dan Budaya"*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1992), hal. 170-171.

³*Ibid.*, hal. 171-172.

sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah disusun rapi. *Saraf* ini diperlukan untuk mengetahui asal kata. Untuk dapat mempergunakan kamus, harus dapat terlebih dahulu mengetahui asal sesuatu kata. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari *nahwu* dimulai dengan kitab *Ajrumiyah*, selanjutnya *Makhtashar*, *Mutammimah* dan akhirnya *Alfiyah* bersama syarahnya. *Nahwu* ini diperlukan untuk dapat membaca huruf akhir, baik dari kata kerja maupun dari kata benda, sebab kitab-kitab ditulis dengan huruf gundul. Sesudah itu baru diajarkan kitab-kitab *fikih* yang membicarakan hukum dimulai dengan *Safinatu'n Naja*, *Matan Taqrib*, kemudian *Fathul-Qarib*, *Fathul-Mu'in*, *Jahrir*, *Iqna'*, *Fathul-Wahab*, *Mahally*, *Tuhfan* dan *Nihayah* sampai dengan kitab-kitab selanjutnya.¹⁰ Pada tingkat pendidikan *ranggang* diajarkan juga berbagai ilmu yang mandiri seperti *Fiqh*, *Tafsir*, *Hadist*, *Tasauf*, *Akhlak*, *Tauhid*, *Mantiq*, ilmu hisab dan lain sebagainya.

Hubungan Ranggang dengan Teungku dan Masyarakat sekitarnya

Pendidikan *ranggang* dipimpin oleh *teungku-teungku di ranggang* yang diangkat oleh *teungku di bale*. *Teungku-teungku di ranggang* tersebut pada awalnya merupakan *murib-murib* yang dalam jangka waktu tertentu mampu menamatkan kitab yang telah ditentukan (ada yang lebih dari 10 tahun) tepat pada waktunya. *Murib-murib* diranggang meningkat menjadi *murib di bale*. Mereka itulah yang diangkat oleh *teungku di bale* menjadi guru-guru bantu yang mengajar di *ranggang* dan sejak itu mereka diberi gelar *teungku di ranggang* (guru pendidikan menengah).¹¹

Ditinjau dari segi tugasnya *teungku di ranggang* bertugas memimpin dan

mengajar *murib-murib* tingkat lanjutan pertama. Dengan demikian, *murib-murib* mempunyai ikatan yang erat dan kuat dengan *teungku-teungku* mereka. *Teungku di ranggang* merupakan seorang yang taat dan tinggi ilmunya, sehingga ia sangat dihormati dan dimuliakan oleh *murib-muribnya*.

Teungku ranggang selain membina lembaga pendidikan *ranggang*, juga mendidik *murib-murib* di *ranggang* dalam usaha pembinaan akhlak dan tingkah laku. Mereka memiliki ilmu dan berbagai disiplin serta memanfaatkannya untuk kepentingan pendidikan. Oleh karena kehidupan di *ranggang* dibentuk dalam suasana keagamaan, maka *teungku-teungku ranggang* mengharapakan *murib-murib* akan terdidik dan terbiasa dengan kehidupan keagamaan. Dengan demikian, kehidupan beragama semakin berkembang dalam diri *murib-murib* tersebut.

Pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada lingkungan *ranggang* atau lingkungan lembaga pendidikan Islam lainnya, tetapi juga di lingkungan masyarakat sekitarnya. Lembaga pendidikan *ranggang* memenuhi fungsinya karena tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan turut mengembangkan nilai-nilai kultural lingkungannya. *Ranggang* sebagai wadah pendidikan Islam, maka azas pendidikan juga mengatur sistem pembinaan melalui teladan dan persuasi serta kebersamaan dalam setiap kegiatan sehingga setiap orang merasa saling memiliki. Melalui lembaga pendidikan *ranggang* masyarakat mengantungkan pendidikannya dengan mengharapakan bimbingan ilmu, baik dari segi jasmaniah dan rohaniah dengan perbaikan dibidang fisik material maupun mental spirituil.

Kesimpulan

Nilai dan tingkah laku kehidupan masyarakat di Aceh memperlihatkan corak Islam dalam hampir segenap aspeknya.

Islam merupakan bingkai utama penglihatan dan landasan bagi masyarakat dalam mengatur kehidupan sosial dan pribadi serta menjadi dasar pendidikan utama bagi masyarakat di daerah Aceh.

Dalam usaha penyaluran pendidikan Islam, didirikanlah pranata-pranata sosialisasi yang umum berlaku, yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh ulama-ulama yang memimpin masyarakat ke arah pendalaman proses islamisasi. Salah satu lembaga pendidikan tersebut adalah *ranggang*.

Ranggang merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah dan lanjutan dari pendidikan di tingkat *meunasah* dan

diselenggarakan di setiap mukim dengan tenaga pengajar yang disebut dengan istilah *teungku di ranggang*. Pendidikan tingkat menengah ini dilakukan oleh para *murib* (pelajar yang sedang menuntut ilmu di *ranggang*) yang ingin dan sanggup melanjutkan pelajaran setelah tamat dari pendidikan *meunasah*. Pelajaran yang diberikan berupa kitab pelajaran dalam bahasa Arab disamping ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu bumi, sejarah, berhitung serta akhlak. Melalui pendidikan ditingkat *ranggang* ini, diharapkan *murib-murib* dapat beriman, beribadah dan bekerja sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.



Cut Nadia Fitrina, S.Sos, lahir pada tanggal 26 Oktober 1973. Setelah menamatkan pendidikan SMTA di SMA Negeri 1 Sabang tahun 1992 kemudian melanjutkan studi pada Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan. Saat ini magang pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

¹⁰ Ismuha, *op.cit*, hal. 20-21.

¹¹ Baihaqi A.K., *op.cit*, hal. 160.

Haba Jugi Tapa

Jugi Tapa merupakan seorang yang berperilaku jahat, untuk mencapai segala keinginannya Jugi Tapa melakukan pertapaan terakhir setelah sebelumnya menculik ibu Nyak Amat. Dari keterangan seekor kepiting dan Ni Purba, Nyak Amat dapat menemukan ibunya kembali dan membunuh Jugi Tapa.

Bak masa awai gampông Jugi Tapa nyan di Meureudu. Nan gobnyan Leubé Muda. Bak siroe geubeudöh Leubé Muda nyan geujak duek u Batée Geuneungku. Ban trôk u Batéc geulungku geucok inong gob. ma si Nyak Amat.

Nyak Amat dalam masa nyan lalé jak keumawé lam uteuen bangka. Teungoh lalé jikcumawé jikheun lé bieng pho. "Hai Nyak Amat, gata bèk lalé takeumawé mateuh maté ka Jugi ba!"

"Peue ka peugah!" seuôt Nyak Amat.

"Hana peue kupeugah, biet chiet nyo" jaweueb bieng pho.

Lheuh nyan jiseuôt Nyak Amat lom. "Ma lôn kon ureueng sibarangasoe, hana keumah jiba!"

"Nyo Nyak Amat! Ma gata hana lé. kajiba ka jicok keu peurmaisuri Jugi." khcun bieng pho.

"Nyang kon-kon buet ka peugah. Kucuh gö kawé patah pha siblah hana katuho ba," kheun si Amat. Nyan sabab nyan sampoc jinoc kaki bieng pho ubit siblah.

"O ma got kupubuet jeuheut mubalah, phakuh siblah ka binasa, alah hai Nyak Amat." suôt bieng pho.

Jibeudöh Nyak Amat jiwoe laju u rumoh. Ban trôk u rumoh ji-eu majih ka hana lé, maka teupiké bit nyo majih ka jiba lé Jugi Tapa. Lheuh nyan jibeudöh Nyak Amat jiseutôt laju u Batée Geulungku. Trôk u Batée Geuleungku Jugi Tapa hana lé di sinan ka jibeurangkat keudéh u Sawang Krueng Manè sira jiba mak Nyak Amat. Trôk u Sawang Krueng Mane si Jugi Tapa nyan ka jiduck bak saboh teunpat. Di sinan jih ka

meuneuntang ngon Teungku Lhok Drien. Ma Nyak Amat ka jikeubah di sinan.

Nyak Amat jijak laju seutôt Jugi Tapa nyan. 'Oh trôk Nyak Amat u Sawang Krueng Manè. teurnyata Jugi tapa hana lé di sinan. Ka jibeudöh lom ka jijak meutapa u gunong Geureudong, seudangkan ma Nyak Amat ka jeuet keu bateueng, nyang sampoe jinoc mantông na beukaih. 'Oh trôk keudéh bak kuta Jugi nyang na di sinan Ni Purba. Ban trôk keunan geutanyông lé Ni Purba. "Ho si Nyak Jak?" "Ulon jak seutôt Jugi, "jaweueb Nyak Amat.

Ban geudeungö lagée nyan geukhcun laju lé Ni Purba.

"O. Jugi hana lé, jih ka jijak tapa."

Jugi nyan jijak tapa seuneulheueh lantaran jih ka jimeuui-uji ngon Teungku Lhok Drien. Jinoc meunyo na gata tameukeusut keu manusia lom nyang göt gata jinoc tajak drob cicém pala di cong bak geulumpang. Cicém pala nyan tempat keuneubah Jugi. Nyawông Jugi di sinan jikeubah bak cicém pala nyan. Cabeueng bak geulumpang nyan na lhéc krak. Ban trôk keunan tatak cabeueng nyan dua krak. Ban ka cabeueng nyan tinggai sikrak treuk barô gata keumah tadrob cicém pala nyan. Ban tateumée tawiet laju pha jih. Tapi ingat bèk sagai tawiet takue, meunyo tawiet takuc ma gata hana soe pcu-udép lé singoh."

Ban trôk keunan, Nyak ji-ék laju u cong bak geulumpang ngon guda teureubang. Trôk u cong bak jitak treuk dheuen bak geulumpang nyan dua boh cabeueng lagée geupeugah lé Ni Purba. Ban putoh cabeueng nyan meujidrob lé cicém pala. Lheuh nyan laju jiwiet pha.

'Oh lheuh nyan Nyak Amat jiteureubang laju ngon guda teureubang keudéh bak Jugi Tapa u Gunong Geureudong. Ban trôk u Gunong Geureudong jijak laju bak Jugi Tapa. Trôk keunan ji-eu Jugi Tapa teungoh teungeut, meujipeugoe treuk lé Nyak Amat. Tapi Jugi Tapa hana cit jaga. Ban lheuh nyan meujicok lé palée nyang na di sinan laju ji phok bak bruek nab Jugi Tapa nyan. Ban jikhok meuteukeujot treuk Jugi. Ban teukeujot jikalôn Nyak Amat na di geuniréngjih maka jitanyong bak Nyak Amat. "Ho ka meujak?"

Teuma jijaweueb lé Nyak Amat. "Peue ho kujak!" Ma kée nyang ka kapeujeuet keu bateueng, meunyo hana ka peu-udép keulai beujeuet keu manusia kah kupoh bumaté."

"Bèk kapoh kée, makah kupeu-udép keumbali lagée manusia biasa. "Kheun si Jugi. "Biet lagée kapeugah." seuôt Nyak Amat.

"Biet nyo, makah kupeu-udép lom. Kah jcuet kajak woe laju." jikheun lé si Jugi.

Lheuh nyan Nyak Amat jiteureubang laju ngon guda teureubang keudéh jibalék u

Sawang Krueng Manè. Ban trôk keudéh ji-eu majih ka udép lom meujigisa treuk bak Jugi jijak wiet takue Jugi hingga Jugi ka maté. Ban lheuh nyan Nyak Amat jiteureubang keulai. 'Oh trôk bak bak geulumpang meumeusawak treuk gudajih hingga Nyak Amat rhöt u miyub. Ban trôk u miyub jih göt that sosah sampé-sampé ulée jih meu-asék-asék.

Nyankeuh seubabjih sampé 'an jinoc keuturunan Nyak Amat (Banta Amat) meu-asék-asék ulée.

'Oh Lheuh nibak nyan Banta Amat teuma geuwoe u nanggroec u Meureudu. 'Oh rôk u Meureudu gobnyan geumat kuasa lagéc biasa. Gobnyan ka jiangkat lom keu peumimpin nanggroec Meureudu lé rakyat sampé keuturunan gobnyan jeuet keu keuturunan ulée balang. (Disadur dari Buku *Cerita Rakyat Tokoh Utama Mitologis dan Legendaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, oleh M. Adnan Hanafiah dkk. Pusat Penelitian Sejarah Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Depdikbud 1978/1979, oleh Sri Wahyuni S.Sos).